



Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah

RKPD

Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2022



BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi APBD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 serta kondisi keuangan yang tidak sesuai dengan proyeksi APBD Tahun 2022, maka rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. bahwa dokumen perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 tersebut merupakan landasan penyusunan KUPA/PPAS Perubahan Tahun 2022 untuk menyusun APBD Perubahan Tahun 2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2754);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1027);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 486);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 26);
17. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 Nomor 2);

19. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2022.

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APP adalah Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda atau sebutan lainnya adalah unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah di Kabupaten Indragiri Hilir.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
10. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPd adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Wajib Pemerintah yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
13. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
15. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati Indragiri Hilir.

16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
18. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
19. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur.
20. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personil barang modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. sebagai pedoman perumusan penyempurnaan perubahan RKPD Kabupaten Indragiri Hilir dan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Indragiri Hilir serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2022.
- b. bahan evaluasi penyusunan evaluasi penyusunan Rancangan KUPA dan PPAS Perubahan sebagai bahan sinkronisasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. landasan operasional bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Indragiri Hilir dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022.
- b. pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS Perubahan) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 sebagai dasar penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati adalah :

- a. sistematika;
- b. penyusunan perubahan RKPD.

BAB II

SISTEMATIKA

Pasal 5

Perubahan RKPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 terdiri dari sistematika sebagai berikut :

- | | |
|---------|--|
| BAB I | PENDAHULUAN |
| BAB II | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN |
| BAB III | KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH |
| BAB IV | SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH |
| BAB V | RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH |
| BAB VI | PENUTUP |

BAB III
PENYUSUNAN PERUBAHAN RKPD
Pasal 6

Perubahan RKPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Indragiri Hilir dan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 - 2023.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 13 September 2021



Diundangkan di Tembilahan
pada tanggal 13 September 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,



BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2022 NOMOR 31

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-4
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-9
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-13
1.4 Maksud dan Tujuan	I-15
1.5 Sistemabka Dokumen RKPD	I-16
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN	II-1
 BERKENAAN.....	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	II-1
2.2 Permasalahan Pembangunan Daerah.....	II-83
2.2.1 Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	II-83
2.2.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.....	II-86
2.2.2.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-86
2.2.2.2 Aspek Pelayanan Umum.....	II-89
2.2.2.3 Aspek Daya Saing.....	II-103

BAB III	KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH....	III-1
3.1	Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-4
3.2	Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-5
3.2.1	Perubahan Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III-6
3.2.2	Perubahan Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-10
3.2.3	Perubahan Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III-13
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....	IV-1
4.1	Tujuan dan Sasaran.....	IV-4
4.2	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022.....	IV-12
4.2.1.	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2022	IV-12
4.2.2.	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2022.....	IV-14
4.2.3.	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022.....	IV-14
4.3	Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir....	IV-13
BAB V	RENCANA KINERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....	V-1
BAB VII	PENUTUP	VI-1

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1	Rekapitulasi Target dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Triwulan II Tahun 2022	II-2
Tabel 2.2	Rekapitulasi Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2022	II-3
Tabel 2.3	Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Rkpd) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022.....	II-4
Tabel 3.1	Sasaran Ekonomi Makro Indonesia Tahun 2023	III-3
Tabel 3.2	Perkembangan Indikator Makro Kabupaten Indragiri Hilir	III-5
Tabel 3.3	Target Pendapatan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2022	III-8
Tabel 3.4	Target Belanja Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2022	III-12
Tabel 3.5	Target Pembiayaan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2022	III-14
Tabel 4.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD 2018-2023	IV-6
Tabel 4.2	Program dan Kegiatan yang mendukung Program Prioritas Tahun 2022.....	IV-21
Tabel 4.3	Urusan Pemerintahan dengan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Indragiri Hilir.....	IV-25
Tabel 4.4	Prioritas Pembangunan dengan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Indragiri Hilir.....	IV-29
Tabel 4.5	Sandingan Antara Sasaran/Indikator Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022.....	IV-32
Tabel 4.6	Sinkronisasi Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah Tahun 2022.....	IV-60

Tabel 4.7	Keselaran Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD 2022 dengan PN RKP 2022.....	IV-61
Tabel 4.8	Konsistensi Prioritas Dan Sasaran Pembangunan pada RKPD tahun 2022 dengan Prioritas Pembangunan pada RKPD Provinsi 2022.....	IV-79
Tabel 4.9	Keselaran Prioritas Pembangunan Daerah dengan Program Prioritas pada RKPD Tahun 2022 Kabupaten Indragiri Hilir.....	IV-93
Tabel 5.1	Rekapitulasi Pagu Menurut Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022.....	V-2
Tabel 5.2	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022.....	V-5

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

I-15

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Pasal 343 telah diatur bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan antara lain adalah perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan.

Berdasarkan arahan, kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang telah digariskan, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir segera mengambil langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergis.

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah melakukan beberapa kali Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2022, sebagai berikut :

A. Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2022 Tahap Pertama, berdasarkan

Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor : 14 Tahun 2022 tanggal 2 Maret 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 69 ayat (2), keperluan mendesak meliputi kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan, Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib, Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan dan/atau Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD dapat

dilakukan terlebih dahulu ditetapkan dalam Perkada perubahan perjabaran APBD dan pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah. Jika pergeseran tersebut dilakukan sebelum perubahan APBD, pergeseran/perubahan anggaran ditampung dalam Perda perubahan APBD. Jika pergeseran tersebut dilakukan setelah perubahan APBD, dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan serta dalam hal penganggaran dana transfer ke daerah penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian atas penggunaan dana dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Perjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Kepala Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam

LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022:

4. Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 2/I/2022 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022, terdapat Alokasi Bantuan Keuangan Khusus untuk Kabupaten Indragiri Hilir sebesar Rp.17.028.000.000,-.

B. Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2022 Tahap Kedua, berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor : 17 Tahun 2022 tanggal 17 Maret 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Kedua Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan terlebih dahulu ditetapkan dalam Perkada perubahan penjabaran APBD dan pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah. Jika pergeseran

tersebut dilakukan sebelum perubahan APBD, penggeseran/perubahan anggaran ditampung dalam Perda perubahan APBD. Jika penggeseran tersebut dilakukan setelah perubahan APBD, dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran;

2. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/653/MSM.02.03/2021 Hal Tindak Lanjut Moratorium Jabatan Fungsional dan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, penghasilan pejabat fungsional diberikan sesuai dengan penghasilan dalam jabatan administrasi sebelumnya sampai dengan berakhirnya jabatan fungsional hasil penyetaraan jabatan karena adanya perpindahan jabatan atau kenaikan jenjang jabatan;

3. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 15 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, terdapat ASN untuk pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan.

- C. Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2022 Tahap Ketiga, berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor : 12 Tahun 2022 tanggal 13 Juni 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 69 ayat (2), keperluan mendesak meliputi

kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib, Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan dan/atau Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan terlebih dahulu ditetapkan dalam Perkada perubahan penjabaran APBD dan pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah. Jika pergeseran tersebut dilakukan sebelum perubahan APBD, pergeseran/perubahan anggaran ditampung dalam Perda perubahan APBD. Jika pergeseran tersebut dilakukan setelah perubahan APBD, dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan

Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan serta dalam hal penganggaran dana transfer ke daerah penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian atas penggunaan dana dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Kepala Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, dalam hal Pemerintah Daerah memiliki sisa DAK Nonfisik, dianggarkan Kembali pada jenis DAK Nonfisik yang sama dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dalam hal Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan masih terdapat sisa DAK Nonfisik yang merupakan bagian SILPA, di anggarkan Kembali pada jenis DAK Nonfisik yang sama dalam APBD Tahun Anggaran 2022 dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang

Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

5. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 906/2114/SJ, Hal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK Tahun Anggaran 2022, DBH DR Tahun Anggaran 2022, DBH CHT Tahun Anggaran 2022, Usulan Kemendikbudristek dan Kemenkes, terdapat pemetaan Sub Kegiatan yang digunakan untuk penganggaran belanja DAK Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, SILPA pada APBD Tahun 2011 penerimaan SILPA sebesar Rp. 214.936.335.766,19.

Perubahan RKPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sebagai dokumen perencanaan daerah, maka

Perubahan RKPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2012 mempunyai kedudukan yang sangat penting untuk menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Tahapan penyusunan Perubahan RKPD dimulai dari penyusunan rancangan perubahan RKPD, perumusan rancangan akhir perubahan RKPD dan penetapan. Penyusunan perubahan RKPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2012 dilakukan dengan pendekatan teknokratis yaitu dengan lebih memperhatikan aspek normatif dan teknis sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan.

Proses penyusunan perubahan RKPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2012 juga disinergikan dan diselaraskan dengan kebijakan pembangunan baik pemerintah pusat maupun provinsi khususnya terkait dengan target-target pembangunan nasional dan Provinsi Riau.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2012 ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid Virus Disease 2019 (COVID-19) dan /atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019

Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 288);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 1419);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3689 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2009- 2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023; dan

17. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 15 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Secara umum, keterkaitan antar dokumen perencanaan merupakan keterkaitan program strategis antar dokumen. Dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan negara, keterkaitan dimaksud telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sebagaimana dapat dilihat pada gambar 1.1. Posisi dokumen RKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan merupakan penjabaran dokumen RPJMD yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Dokumen Perubahan RKPD sebagaimana telah disebutkan di atas, menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen KUPA/PPAS Perubahan dan penyusunan Rancangan APBD Perubahan (RAPBDP) sebelum menjadi APBD Perubahan. Sedangkan dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah akan mendasari penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, sebelum akhirnya menjadi Rincian APBD Perubahan.

Hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan antara RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. Perubahan RKPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 disusun sebagai penjabaran dari target kinerja program dan kegiatan

sebagaimana tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023;

2. Perubahan RKPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (SENJA) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan.
3. Dalam penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022, telah memperhatikan rencana program, sasaran, dan pagu indikatif yang disusun dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023.
4. Perubahan RKPD merupakan acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP), dengan demikian Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara Perubahan (PPAS Perubahan) didasarkan atas dokumen Perubahan RKPD. KUPA dan PPAS Perubahan yang telah disepakati selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD Perubahan.

Secara diagramatis hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada Gambar 1.1 sebagai berikut:



Gambar 1.1.

Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dokumen Perubahan RKPMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2022 adalah untuk:

1. Menentukan arah kebijakan pembangunan Daerah pada Perubahan RKPMD Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2022.
2. Mewujudkan rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan Daerah tahun 2022 guna mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2022 sesuai Perubahan RPJMD periode tahun 2016-2023.

Tujuannya adalah:

1. Menyediakan landasan operasional bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Indragiri Hilir dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022.
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PFAS Perubahan) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 sebagai dasar penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022.

1.3. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Perubahan RKPD Tahun 2022 ini disusun dengan sistematika sebagaimana ditetapkan dalam pasal 345 dan pasal 349 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Adapun tahap dalam Persiapan Penyusunan Perubahan RKPD adalah :

- a. Penyusunan rancangan perubahan RKPD;
- b. Perumusan rancangan akhir perubahan RKPD; dan
- c. Penetapan.

Penyusunan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 mencakup :

- a. analisis ekonomi dan keuangan Daerah;

- b. evaluasi pelaksanaan RKPD provinsi sampai dengan Triwulan II (Triwulan Dua) tahun berkenaan;
- c. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah;
- d. perumusan rancangan kerangka ekonomi Daerah dan kebijakan keuangan Daerah; dan
- e. perumusan program dan kegiatan beserta pagu indikatif.

Dalam perumusan rancangan perubahan RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran kepada Kepala Daerah berdasarkan hasil riset/ penjangkauan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran program yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran, dapat disampaikan dalam aplikasi *e-planning* dan/ atau secara tertulis dan/ atau dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala Daerah.

Sistematika Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Permendagri ini memuat :

- a. Pendahuluan;
- b. Evaluasi hasil Triwulan II (Triwulan Dua) tahun berkenaan;
- c. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
- d. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
- e. Rencana kerja dan pendanaan Daerah;
- f. Penutup.

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Bab ini terdiri dari dua pokok bahasan yaitu Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan, realisasi RPJMD dan capaian kinerja serta permasalahan pembangunan daerah. Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2022 menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun 2022 sampai triwulan II dengan memperhatikan dokumen RPJMD. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah menguraikan tentang pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan permasalahan pembangunan.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Telaahan hasil evaluasi mencakup (i) Realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan. (ii) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan. (iii) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan. (iv) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program dan kegiatan.

(v) implementasi yang timbul terhadap target capaian RFJMD dan kinerja pembangunan daerah dan (vi) kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Target dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah
Triwulan II Tahun 2022

Kode Rekening	Uraian	APBD 2022	Realisasi APBD 2022	%
1	PENDAPATAN DAERAH	1.877.406.891.891,00	848.301.749.000,40	45,20
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	109.112.679.289,00	74.341.309.174,40	68,20
1.1.01	Pajak Daerah	45.379.457.247,00	17.759.329.647,00	39,14
1.1.02	Retribusi Daerah	4.985.271.800,00	1.334.347.000,00	26,80
1.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.935.649.810,00	13.759.140.179,00	115,30
1.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	124.512.479.502,00	43.015.772.359,40	34,60
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.478.289.901.292,00	749.944.940.726,00	50,80
1.2.01	Pendapatan Transfer Pemekatan Pusat	1.360.314.394.370,00	739.873.444.931,00	54,38
1.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	117.964.616.922,00	29.070.575.804,00	24,68
1.2	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAM	0,00	467.000,00	
1.2.03	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	
1.2.04	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Pemekatan Perundang-Undangan	0,00	467.000,00	
2	BELANJA DAERAH	2.087.406.891.891,00	677.339.676.046,33	32,48
2.1	BELANJA OPERASI	1.409.077.318.484,00	536.306.381.389,13	38,09
2.1.01	Belanja Pegawai	681.442.819.488,00	223.331.388.760,00	32,78
2.1.02	Belanja Barang dan Jasa	695.362.790.149,00	218.403.374.838,13	31,41
2.1.04	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
2.1.05	Belanja Miskin	88.545.735.600,00	4.287.840.000,00	4,85
2.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.800.880.000,00	1.313.374.880,00	73,24
2.2	BELANJA MODAL	174.876.277.898,00	14.033.294.759,20	7,97
2.2.01	Belanja Modal Tanah	450.000.000,00	0,00	0,00
2.2.02	Belanja Modal Perbaikan dan Monev	60.836.318.000,00	3.708.773.880,00	6,10
2.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	38.120.186.000,00	2.904.898.751,18	7,62
2.2.04	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi	66.893.493.898,00	3.397.842.189,92	5,07

2.09	Salanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.699.246.745,00	0,00	0,00
2.10	Salanja Modal Aset Lainnya	1.303.000.000,00	320.327.000,00	0,00
2.1	BELANJA TIDAK TERDUGA	31.396.609.904,00	3.039.607.901,00	0,94
2.1.01	Salanja Tidak Terduga	31.396.609.904,00	3.039.607.901,00	0,94
2.4	BELANJA TRANSFER	379.124.266.675,00	103.943.254.031,00	27,44
2.4.01	Salanja Bagi Hasil	9.024.872.878,00	0,00	0,00
2.4.02	Salanja Bantuan Keuangan	370.100.000.000,00	103.943.254.031,00	28,44
	SURPLUS (DEFISIT)	(200.000.000.000,00)	567.967.171.394,18	(79,97)
2	PENYERAHAN DARRAH	330.000.000.000,00	314.970.124.001,19	100,27
2.1	PENERIMAAN PENYERAHAN	330.000.000.000,00	314.970.124.001,19	100,27
2.1.01	Sisa Lebih Pembiangan Anggaran Tahun Sebelumnya	330.000.000.000,00	314.956.125.766,19	0,00
2.1.02	Penerimaan Kembali Pembiayaan Pinjaman Daerah	0,00	13.985.125,00	0,00
2.2	PENGELUARAN PENYERAHAN	0,00	0,00	0,00
2.2.01	Penyerahan Modal Daerah	-	-	0,00
	PENYERAHAN NETTO	330.000.000.000,00	314.970.124.001,19	100,27
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SELFA)	0,00	263.917.489.397,17	
	TOTAL APBD	1.087.404.993.491,00	677.255.376.044,33	33,48

Sedangkan Rekapitulasi target dan realisasi Kinerja triwulan II Tahun 2022 sebagaimana Tabel 2.2. berikut.

Tabel 2.2.
Rekapitulasi Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2022

PERANGKAT DAERAH	PAGU EKSPD MENCUMI 2021 (Rp)	REALISASI KINERJA TRIWULAN II (Rp)	PERSENTASE	KINERJA
1	2	4	3	4
Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	975.379.716.696	451.878.977.577	46,31	39,93
Dinas Pendidikan	467.197.987.250	223.472.160.094	23,78	25,91
Dinas Kesehatan	171.763.073.068	88.370.329.333	30,88	22,91
Rumah Sakit Umum Puri Haseke Tombliton	90.781.795.141	81.349.892.428	35,18	38,95
Rumah Sakit Umum Daerah Tugulu Sulang	2.487.707.784	3.880.342.914	30,17	20,22
Rumah Sakit Umum Daerah Raja Muna	18.461.791.153	11.978.280.445	28,55	31,24
Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	122.728.146.928	14.494.343.194	30,62	28,09
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	44.090.151.878	4.429.093.794	19,21	15,76
Satuan Polisi Pamong Praja	19.479.312.812	9.880.784.939	40,09	40,76
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	10.892.934.920	6.840.178.321	62,64	64,88

Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.798.091.840	4.019.101.793	26,84	30,92
Dinas Sosial	13.369.719.345	3.044.691.166	23,88	26,41
Usaha Pemasokan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	112.777.574.000	51.481.847.933	46,99	23,90
Dinas Ketransportasi Dan Transmigrasi	6.689.591.338	2.421.432.101	41,02	42,89
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	9.671.591.838	3.467.537.968	18,23	18,40
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	17.429.432.118	6.996.420.890	22,34	21,09
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	10.591.108.390	5.138.526.119	24,65	26,53
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	27.816.073.987	7.118.799.286	30,89	33,48
Dinas Perhubungan	18.416.165.489	4.438.491.940	13,79	12,74
Dinas Komunikasi, Informatika, Persendian Dan Statistik	19.238.131.162	4.881.072.860	33,49	34,21
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah	10.443.340.363	4.027.036.312	19,08	20,61
Dinas Perencanaan Model Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12.521.221.264	6.022.446.148	29,34	30,35
Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Dan Kebudayaan	19.451.852.658	7.327.076.751	25,38	27,24
Dinas Pertanahan Dan Agrar Daerah	4.335.064.926	1.922.606.740	47,28	48,09
Usaha Pemasokan Pribadi	76.511.576.189	19.359.348.486	25,39	23,11
Dinas Perikanan	11.882.134.727	3.085.480.478	21,08	22,74
Dinas Perkebunan	27.628.691.683	4.774.368.485	17,39	18,84
Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perikanan	21.825.480.328	7.791.810.299	26,09	27,84
Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	18.178.218.431	3.967.384.228	20,98	21,30
Usaha Pendukung	119.991.245.104	47.581.885.468	25,81	38,81
Sekretariat Daerah	38.824.028.124	26.309.489.377	44,28	47,13
Sekretariat Dprd	101.187.228.040	23.997.546.891	29,68	30,48
Usaha Penjualan	481.983.218.218	128.296.823.818	31,42	34,40
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12.340.825.165	3.883.861.714	29,99	40,00
Badan Penyelamatan Daerah	18.709.484.172	8.963.387.114	37,08	39,56
Badan Keuangan Dan Aset Daerah	356.535.006.631	112.685.705.852	29,48	31,61
Badan Kependidikan Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	14.377.900.241	2.488.073.938	28,72	26,44
Usaha Pengawasan	10.389.818.007	8.193.787.817	39,82	36,49
Inspektorat Daerah	10.800.636.007	4.195.787.617	33,66	36,40
Usaha Kewilayahan	76.393.893.918	38.531.542.189	39,71	32,84
Kecamatan Tembahan	10.723.776.820	4.496.446.038	47,00	57,91
Kecamatan Tembahan Hulu	4.609.779.330	1.968.961.143	48,04	44,73
Kecamatan Tempuling	5.630.676.644	2.005.106.740	56,00	55,75
Kecamatan Bawang Tulus	3.248.673.887	989.790.701	64,67	63,66
Kecamatan Cancang	2.488.848.791	1.110.121.841	59,50	59,34
Kecamatan Erak	4.427.823.417	1.783.328.030	41,00	41,28
Kecamatan Geang	2.909.869.537	955.433.948	63,00	62,63
Kecamatan Geang Anak Serik	4.131.888.633	1.734.383.561	67,60	62,99
Kecamatan Kateran	3.715.686.089	1.828.395.824	60,50	59,99

Kecamatan Kungas	4.022.693.774	1.933.603.371	54,79	53,78
Kecamatan Kemuning	2.973.556.975	1.094.200.270	59,87	61,57
Kecamatan Kintang	3.921.173.844	1.348.911.497	37,54	37,22
Kecamatan Kuala Indragiri	2.717.276.169	909.482.619	53,20	50,97
Kecamatan Mandah	3.114.828.828	1.167.338.198	51,78	51,40
Kecamatan Pelangiran	3.170.885.008	1.353.351.391	41,30	40,26
Kecamatan Pulas Burung	2.698.357.046	1.160.430.917	31,00	30,16
Kecamatan Reih	4.503.283.064	1.755.818.823	65,99	65,48
Kecamatan Sungai Batang	2.742.912.300	1.181.401.990	52,82	52,68
Kecamatan Tanah Merah	3.131.218.677	1.251.410.538	56,64	60,82
Kecamatan Teluk Belongkong	2.385.964.946	1.080.791.227	41,39	41,08
Unsur Pemerintahan Umum	15.899.491.118	6.828.862.929	24,44	21,81
Badan Keasetan Bergas Dan Politik	15.690.462.113	5.820.002.929	23,80	22,41
Total	1.900.387.933.317	737.241.634.949	38,26	37,27

RKPD tahun 2022 merupakan RKPD tahun keempat RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2019 - 2023. Total nilai APBD tahun 2022 sebesar Rp.2.006 triliun.

Secara ringkas, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD ditunjukkan pada Tabel 2.3.

No.	Description of the work	Unit	Quantity	Unit Price		Total Price		Remarks
				Unit Price	Total Price	Unit Price	Total Price	
1	Excavation and backfilling of trench 1m x 1m x 1m	m ³	100	100	10000	10000		
2	Reinforcement concrete slab 1m x 1m x 0.1m	m ²	100	100	10000	10000		
3	Structural steel reinforcement 1m x 1m x 0.1m	m ²	100	100	10000	10000		
4	Formwork for concrete slab 1m x 1m x 0.1m	m ²	100	100	10000	10000		
5	Concrete pump and delivery 1m x 1m x 0.1m	m ³	100	100	10000	10000		
6	Structural steel reinforcement 1m x 1m x 0.1m	m ²	100	100	10000	10000		
7	Formwork for concrete slab 1m x 1m x 0.1m	m ²	100	100	10000	10000		
8	Concrete pump and delivery 1m x 1m x 0.1m	m ³	100	100	10000	10000		
9	Structural steel reinforcement 1m x 1m x 0.1m	m ²	100	100	10000	10000		
10	Formwork for concrete slab 1m x 1m x 0.1m	m ²	100	100	10000	10000		
11	Concrete pump and delivery 1m x 1m x 0.1m	m ³	100	100	10000	10000		
12	Structural steel reinforcement 1m x 1m x 0.1m	m ²	100	100	10000	10000		
13	Formwork for concrete slab 1m x 1m x 0.1m	m ²	100	100	10000	10000		
14	Concrete pump and delivery 1m x 1m x 0.1m	m ³	100	100	10000	10000		
15	Structural steel reinforcement 1m x 1m x 0.1m	m ²	100	100	10000	10000		
16	Formwork for concrete slab 1m x 1m x 0.1m	m ²	100	100	10000	10000		
17	Concrete pump and delivery 1m x 1m x 0.1m	m ³	100	100	10000	10000		
18	Structural steel reinforcement 1m x 1m x 0.1m	m ²	100	100	10000	10000		
19	Formwork for concrete slab 1m x 1m x 0.1m	m ²	100	100	10000	10000		
20	Concrete pump and delivery 1m x 1m x 0.1m	m ³	100	100	10000	10000		
21	Structural steel reinforcement 1m x 1m x 0.1m	m ²	100	100	10000	10000		
22	Formwork for concrete slab 1m x 1m x 0.1m	m ²	100	100	10000	10000		
23	Concrete pump and delivery 1m x 1m x 0.1m	m ³	100	100	10000	10000		
24	Structural steel reinforcement 1m x 1m x 0.1m	m ²	100	100	10000	10000		
25	Formwork for concrete slab 1m x 1m x 0.1m	m ²	100	100	10000	10000		
26	Concrete pump and delivery 1m x 1m x 0.1m	m ³	100	100	10000	10000		
27	Structural steel reinforcement 1m x 1m x 0.1m	m ²	100	100	10000	10000		
28	Formwork for concrete slab 1m x 1m x 0.1m	m ²	100	100	10000	10000		
29	Concrete pump and delivery 1m x 1m x 0.1m	m ³	100	100	10000	10000		
30	Structural steel reinforcement 1m x 1m x 0.1m	m ²	100	100	10000	10000		
31	Formwork for concrete slab 1m x 1m x 0.1m	m ²	100	100	10000	10000		
32	Concrete pump and delivery 1m x 1m x 0.1m	m ³	100	100	10000	10000		
33	Structural steel reinforcement 1m x 1m x 0.1m	m ²	100	100	10000	10000		
34	Formwork for concrete slab 1m x 1m x 0.1m	m ²	100	100	10000	10000		
35	Concrete pump and delivery 1m x 1m x 0.1m	m ³	100	100	10000	10000		
36	Structural steel reinforcement 1m x 1m x 0.1m	m ²	100	100	10000	10000		
37	Formwork for concrete slab 1m x 1m x 0.1m	m ²	100	100	10000	10000		
38	Concrete pump and delivery 1m x 1m x 0.1m	m ³	100	100	10000	10000		
39	Structural steel reinforcement 1m x 1m x 0.1m	m ²	100	100	10000	10000		
40	Formwork for concrete slab 1m x 1m x 0.1m	m ²	100	100	10000	10000		
41	Concrete pump and delivery 1m x 1m x 0.1m	m ³	100	100	10000	10000		
42	Structural steel reinforcement 1m x 1m x 0.1m	m ²	100	100	10000	10000		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Kategorie	Beschreibung des Projekts	Zielsetzung	Jahr	Budget (in €)			Einnahmen (in €)			Gesamt (in €)	Status	Anmerkungen
				Plan	Real	Rest	Plan	Real	Rest			
1	Projekt A: Entwicklung eines neuen Produkts	Produktentwicklung	2020	100000	100000	0	0	0	0	100000	Beendet	Produkt wurde erfolgreich entwickelt
2	Projekt B: Marketingkampagne für Produkt A	Marketing	2020	50000	50000	0	0	0	0	50000	Beendet	Kampagne wurde erfolgreich durchgeführt
3	Projekt C: Schulung des Verkaufsteams	Schulung	2020	20000	20000	0	0	0	0	20000	Beendet	Schulung wurde erfolgreich durchgeführt
4	Projekt D: Erweiterung des Vertriebsnetzes	Vertrieb	2020	30000	30000	0	0	0	0	30000	Beendet	Vertriebsnetz wurde erfolgreich erweitert
5	Projekt E: Verbesserung der Kundenbetreuung	Kundenbetreuung	2020	15000	15000	0	0	0	0	15000	Beendet	Kundenbetreuung wurde verbessert
6	Projekt F: Entwicklung eines neuen Produkts	Produktentwicklung	2021	120000	120000	0	0	0	0	120000	Beendet	Produkt wurde erfolgreich entwickelt
7	Projekt G: Marketingkampagne für Produkt F	Marketing	2021	60000	60000	0	0	0	0	60000	Beendet	Kampagne wurde erfolgreich durchgeführt
8	Projekt H: Schulung des Verkaufsteams	Schulung	2021	25000	25000	0	0	0	0	25000	Beendet	Schulung wurde erfolgreich durchgeführt
9	Projekt I: Erweiterung des Vertriebsnetzes	Vertrieb	2021	35000	35000	0	0	0	0	35000	Beendet	Vertriebsnetz wurde erfolgreich erweitert
10	Projekt J: Verbesserung der Kundenbetreuung	Kundenbetreuung	2021	18000	18000	0	0	0	0	18000	Beendet	Kundenbetreuung wurde verbessert
11	Projekt K: Entwicklung eines neuen Produkts	Produktentwicklung	2022	150000	150000	0	0	0	0	150000	Beendet	Produkt wurde erfolgreich entwickelt
12	Projekt L: Marketingkampagne für Produkt K	Marketing	2022	75000	75000	0	0	0	0	75000	Beendet	Kampagne wurde erfolgreich durchgeführt
13	Projekt M: Schulung des Verkaufsteams	Schulung	2022	30000	30000	0	0	0	0	30000	Beendet	Schulung wurde erfolgreich durchgeführt
14	Projekt N: Erweiterung des Vertriebsnetzes	Vertrieb	2022	40000	40000	0	0	0	0	40000	Beendet	Vertriebsnetz wurde erfolgreich erweitert
15	Projekt O: Verbesserung der Kundenbetreuung	Kundenbetreuung	2022	25000	25000	0	0	0	0	25000	Beendet	Kundenbetreuung wurde verbessert
16	Projekt P: Entwicklung eines neuen Produkts	Produktentwicklung	2023	180000	180000	0	0	0	0	180000	Beendet	Produkt wurde erfolgreich entwickelt
17	Projekt Q: Marketingkampagne für Produkt P	Marketing	2023	90000	90000	0	0	0	0	90000	Beendet	Kampagne wurde erfolgreich durchgeführt
18	Projekt R: Schulung des Verkaufsteams	Schulung	2023	35000	35000	0	0	0	0	35000	Beendet	Schulung wurde erfolgreich durchgeführt
19	Projekt S: Erweiterung des Vertriebsnetzes	Vertrieb	2023	45000	45000	0	0	0	0	45000	Beendet	Vertriebsnetz wurde erfolgreich erweitert
20	Projekt T: Verbesserung der Kundenbetreuung	Kundenbetreuung	2023	30000	30000	0	0	0	0	30000	Beendet	Kundenbetreuung wurde verbessert
21	Projekt U: Entwicklung eines neuen Produkts	Produktentwicklung	2024	200000	200000	0	0	0	0	200000	Beendet	Produkt wurde erfolgreich entwickelt
22	Projekt V: Marketingkampagne für Produkt U	Marketing	2024	100000	100000	0	0	0	0	100000	Beendet	Kampagne wurde erfolgreich durchgeführt
23	Projekt W: Schulung des Verkaufsteams	Schulung	2024	40000	40000	0	0	0	0	40000	Beendet	Schulung wurde erfolgreich durchgeführt
24	Projekt X: Erweiterung des Vertriebsnetzes	Vertrieb	2024	50000	50000	0	0	0	0	50000	Beendet	Vertriebsnetz wurde erfolgreich erweitert
25	Projekt Y: Verbesserung der Kundenbetreuung	Kundenbetreuung	2024	35000	35000	0	0	0	0	35000	Beendet	Kundenbetreuung wurde verbessert
26	Projekt Z: Entwicklung eines neuen Produkts	Produktentwicklung	2025	220000	220000	0	0	0	0	220000	Beendet	Produkt wurde erfolgreich entwickelt
27	Projekt AA: Marketingkampagne für Produkt Z	Marketing	2025	110000	110000	0	0	0	0	110000	Beendet	Kampagne wurde erfolgreich durchgeführt
28	Projekt AB: Schulung des Verkaufsteams	Schulung	2025	45000	45000	0	0	0	0	45000	Beendet	Schulung wurde erfolgreich durchgeführt
29	Projekt AC: Erweiterung des Vertriebsnetzes	Vertrieb	2025	55000	55000	0	0	0	0	55000	Beendet	Vertriebsnetz wurde erfolgreich erweitert
30	Projekt AD: Verbesserung der Kundenbetreuung	Kundenbetreuung	2025	40000	40000	0	0	0	0	40000	Beendet	Kundenbetreuung wurde verbessert

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Kategorie	Produkt	Produktbeschreibung	Menge	Preis		Netto		Brutto		Steuer	Gesamt
				Einzel	Gesamt	Netto	Brutto	Netto	Brutto		
1	Produkt 1	Produkt 1 Beschreibung	10	100	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
2	Produkt 2	Produkt 2 Beschreibung	20	200	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
3	Produkt 3	Produkt 3 Beschreibung	30	300	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000
4	Produkt 4	Produkt 4 Beschreibung	40	400	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000
5	Produkt 5	Produkt 5 Beschreibung	50	500	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000
6	Produkt 6	Produkt 6 Beschreibung	60	600	36000	36000	36000	36000	36000	36000	36000
7	Produkt 7	Produkt 7 Beschreibung	70	700	49000	49000	49000	49000	49000	49000	49000
8	Produkt 8	Produkt 8 Beschreibung	80	800	64000	64000	64000	64000	64000	64000	64000
9	Produkt 9	Produkt 9 Beschreibung	90	900	81000	81000	81000	81000	81000	81000	81000
10	Produkt 10	Produkt 10 Beschreibung	100	1000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
11	Produkt 11	Produkt 11 Beschreibung	110	1100	121000	121000	121000	121000	121000	121000	121000
12	Produkt 12	Produkt 12 Beschreibung	120	1200	144000	144000	144000	144000	144000	144000	144000
13	Produkt 13	Produkt 13 Beschreibung	130	1300	169000	169000	169000	169000	169000	169000	169000
14	Produkt 14	Produkt 14 Beschreibung	140	1400	196000	196000	196000	196000	196000	196000	196000
15	Produkt 15	Produkt 15 Beschreibung	150	1500	225000	225000	225000	225000	225000	225000	225000
16	Produkt 16	Produkt 16 Beschreibung	160	1600	256000	256000	256000	256000	256000	256000	256000
17	Produkt 17	Produkt 17 Beschreibung	170	1700	289000	289000	289000	289000	289000	289000	289000
18	Produkt 18	Produkt 18 Beschreibung	180	1800	324000	324000	324000	324000	324000	324000	324000
19	Produkt 19	Produkt 19 Beschreibung	190	1900	361000	361000	361000	361000	361000	361000	361000
20	Produkt 20	Produkt 20 Beschreibung	200	2000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	400000
21	Produkt 21	Produkt 21 Beschreibung	210	2100	441000	441000	441000	441000	441000	441000	441000
22	Produkt 22	Produkt 22 Beschreibung	220	2200	484000	484000	484000	484000	484000	484000	484000
23	Produkt 23	Produkt 23 Beschreibung	230	2300	529000	529000	529000	529000	529000	529000	529000
24	Produkt 24	Produkt 24 Beschreibung	240	2400	576000	576000	576000	576000	576000	576000	576000
25	Produkt 25	Produkt 25 Beschreibung	250	2500	625000	625000	625000	625000	625000	625000	625000
26	Produkt 26	Produkt 26 Beschreibung	260	2600	676000	676000	676000	676000	676000	676000	676000
27	Produkt 27	Produkt 27 Beschreibung	270	2700	729000	729000	729000	729000	729000	729000	729000
28	Produkt 28	Produkt 28 Beschreibung	280	2800	784000	784000	784000	784000	784000	784000	784000
29	Produkt 29	Produkt 29 Beschreibung	290	2900	841000	841000	841000	841000			

[illegible]

[illegible]

Kod	Naziv projekta	Opis projekta	Godina	Planirano		Izvršeno				Planirano	Izvršeno	Planirano	Izvršeno	Planirano	Izvršeno
				1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	1. kvartal	2. kvartal						
1	Projekat "Modernizacija sistema za obradu podataka"	Modernizacija sistema za obradu podataka	2023	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Projekat "Implementacija novih funkcionalnosti"	Implementacija novih funkcionalnosti	2023	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
3	Projekat "Optimizacija performansi sistema"	Optimizacija performansi sistema	2023	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
4	Projekat "Integracija sa vanjskim sistemima"	Integracija sa vanjskim sistemima	2023	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
5	Projekat "Bezbednost sistema"	Bezbednost sistema	2023	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
6	Projekat "Uvođenje novih tehnologija"	Uvođenje novih tehnologija	2023	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
7	Projekat "Obuka osoblja"	Obuka osoblja	2023	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
8	Projekat "Izrada dokumentacije"	Izrada dokumentacije	2023	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
9	Projekat "Testiranje sistema"	Testiranje sistema	2023	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
10	Projekat "Uvođenje novih standarda"	Uvođenje novih standarda	2023	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
11	Projekat "Implementacija novih funkcionalnosti"	Implementacija novih funkcionalnosti	2023	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
12	Projekat "Optimizacija performansi sistema"	Optimizacija performansi sistema	2023	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
13	Projekat "Integracija sa vanjskim sistemima"	Integracija sa vanjskim sistemima	2023	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
14	Projekat "Bezbednost sistema"	Bezbednost sistema	2023	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
15	Projekat "Uvođenje novih tehnologija"	Uvođenje novih tehnologija	2023	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
16	Projekat "Obuka osoblja"	Obuka osoblja	2023	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
17	Projekat "Izrada dokumentacije"	Izrada dokumentacije	2023	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
18	Projekat "Testiranje sistema"	Testiranje sistema	2023	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
19	Projekat "Uvođenje novih standarda"	Uvođenje novih standarda	2023	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
20	Projekat "Implementacija novih funkcionalnosti"	Implementacija novih funkcionalnosti	2023	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
21	Projekat "Optimizacija performansi sistema"	Optimizacija performansi sistema	2023	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
22	Projekat "Integracija sa vanjskim sistemima"	Integracija sa vanjskim sistemima	2023	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
23	Projekat "Bezbednost sistema"	Bezbednost sistema	2023	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
24	Projekat "Uvođenje novih tehnologija"	Uvođenje novih tehnologija	2023	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
25	Projekat "Obuka osoblja"	Obuka osoblja	2023	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
26	Projekat "Izrada dokumentacije"	Izrada dokumentacije	2023	100											

[illegible]

No.	Description of the Project	Location	Area (ha)	Vegetation Type				Soil Type				Water Availability	Climate	Notes	
				Forest	Shrubland	Grassland	Barren	Forest	Shrubland	Grassland	Barren				
1	Forest	Forest	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Forest	Forest
2	Shrubland	Shrubland	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	Shrubland	Shrubland
3	Grassland	Grassland	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	Grassland	Grassland
4	Barren	Barren	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	Barren	Barren
5	Forest	Forest	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Forest	Forest
6	Shrubland	Shrubland	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	Shrubland	Shrubland
7	Grassland	Grassland	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	Grassland	Grassland
8	Barren	Barren	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	Barren	Barren
9	Forest	Forest	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Forest	Forest
10	Shrubland	Shrubland	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	Shrubland	Shrubland
11	Grassland	Grassland	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	Grassland	Grassland
12	Barren	Barren	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	Barren	Barren
13	Forest	Forest	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Forest	Forest
14	Shrubland	Shrubland	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	Shrubland	Shrubland
15	Grassland	Grassland	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	Grassland	Grassland
16	Barren	Barren	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	Barren	Barren
17	Forest	Forest	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Forest	Forest
18	Shrubland	Shrubland	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	Shrubland	Shrubland
19	Grassland	Grassland	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	Grassland	Grassland
20	Barren	Barren	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	Barren	Barren
21	Forest	Forest	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Forest	Forest
22	Shrubland	Shrubland	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	Shrubland	Shrubland
23	Grassland	Grassland	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	Grassland	Grassland
24	Barren	Barren	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	Barren	Barren
25	Forest	Forest	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Forest	Forest
26	Shrubland	Shrubland	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	Shrubland	Shrubland
27	Grassland	Grassland	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	Grassland	Grassland
28	Barren	Barren	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	Barren	Barren
29	Forest	Forest	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Forest	Forest
30	Shrubland	Shrubland	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	Shrubland	Shrubland
31	Grassland	Grassland	100												

ID	Projektname	Beschreibung	Status	Zeitraum		Kosten		Mitarbeiter		Fortschritt		Bemerkungen
				Start	Ende	Geplant	Real	Anzahl	Stunden	Prozent	Stunden	
1	Projekt A: Entwicklung eines neuen Produkts	Produktentwicklung	In Planung	2023-01-01	2023-03-31	10000	10000	5	100	0	0	Projekt A ist in Planung und wird voraussichtlich im ersten Quartal 2023 gestartet.
2	Projekt B: Marketingkampagne für Produkt X	Marketing	In Planung	2023-02-01	2023-04-30	8000	8000	4	80	0	0	Projekt B ist in Planung und wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2023 gestartet.
3	Projekt C: Schulung der Mitarbeiter für Produkt Y	Schulung	In Planung	2023-03-01	2023-05-31	6000	6000	3	60	0	0	Projekt C ist in Planung und wird voraussichtlich im dritten Quartal 2023 gestartet.
4	Projekt D: Implementierung eines neuen Softwarepakets	IT	In Planung	2023-04-01	2023-06-30	12000	12000	6	120	0	0	Projekt D ist in Planung und wird voraussichtlich im vierten Quartal 2023 gestartet.
5	Projekt E: Expansion in neue Märkte	Vertrieb	In Planung	2023-05-01	2023-07-31	9000	9000	5	90	0	0	Projekt E ist in Planung und wird voraussichtlich im ersten Quartal 2024 gestartet.
6	Projekt F: Optimierung der bestehenden Produkte	Produktentwicklung	In Planung	2023-06-01	2023-08-31	7000	7000	4	70	0	0	Projekt F ist in Planung und wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2024 gestartet.
7	Projekt G: Entwicklung eines neuen Dienstleistungsangebots	Produktentwicklung	In Planung	2023-07-01	2023-09-30	11000	11000	6	110	0	0	Projekt G ist in Planung und wird voraussichtlich im dritten Quartal 2024 gestartet.
8	Projekt H: Implementierung eines neuen CRM-Systems	IT	In Planung	2023-08-01	2023-10-31	13000	13000	7	130	0	0	Projekt H ist in Planung und wird voraussichtlich im vierten Quartal 2024 gestartet.
9	Projekt I: Schulung der Mitarbeiter für Produkt Z	Schulung	In Planung	2023-09-01	2023-11-30	5000	5000	3	50	0	0	Projekt I ist in Planung und wird voraussichtlich im ersten Quartal 2025 gestartet.
10	Projekt J: Expansion in neue Märkte	Vertrieb	In Planung	2023-10-01	2023-12-31	8500	8500	5	85	0	0	Projekt J ist in Planung und wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2025 gestartet.
11	Projekt K: Optimierung der bestehenden Produkte	Produktentwicklung	In Planung	2023-11-01	2024-01-31	6500	6500	4	65	0	0	Projekt K ist in Planung und wird voraussichtlich im dritten Quartal 2025 gestartet.
12	Projekt L: Entwicklung eines neuen Dienstleistungsangebots	Produktentwicklung	In Planung	2023-12-01	2024-02-28	10500	10500	6	105	0	0	Projekt L ist in Planung und wird voraussichtlich im vierten Quartal 2025 gestartet.
13	Projekt M: Implementierung eines neuen CRM-Systems	IT	In Planung	2024-01-01	2024-03-31	12500	12500	7	125	0	0	Projekt M ist in Planung und wird voraussichtlich im ersten Quartal 2026 gestartet.
14	Projekt N: Schulung der Mitarbeiter für Produkt Z	Schulung	In Planung	2024-02-01	2024-04-30	4500	4500	3	45	0	0	Projekt N ist in Planung und wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2026 gestartet.
15	Projekt O: Expansion in neue Märkte	Vertrieb	In Planung	2024-03-01	2024-05-31	8000	8000	5	80	0	0	Projekt O ist in Planung und wird voraussichtlich im dritten Quartal 2026 gestartet.
16	Projekt P: Optimierung der bestehenden Produkte	Produktentwicklung	In Planung	2024-04-01	2024-06-30	6000	6000	4	60	0	0	Projekt P ist in Planung und wird voraussichtlich im vierten Quartal 2026 gestartet.
17	Projekt Q: Entwicklung eines neuen Dienstleistungsangebots	Produktentwicklung	In Planung	2024-05-01	2024-07-31	11500	11500	6	115	0	0	Projekt Q ist in Planung und wird voraussichtlich im ersten Quartal 2027 gestartet.
18	Projekt R: Implementierung eines neuen CRM-Systems	IT	In Planung	2024-06-01	2024-08-31	13500	13500	7	135	0	0	Projekt R ist in Planung und wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2027 gestartet.
19	Projekt S: Schulung der Mitarbeiter für Produkt Z	Schulung	In Planung	2024-07-01	2024-09-30	5500	5500	3	55	0	0	Projekt S ist in Planung und wird voraussichtlich im dritten Quartal 2027 gestartet.
20	Projekt T: Expansion in neue Märkte	Vertrieb	In Planung	2024-08-01	2024-10-31	8500	8500	5	85	0	0	Projekt T ist in Planung und wird voraussichtlich im vierten Quartal 2027 gestartet.
21	Projekt U: Optimierung der bestehenden Produkte	Produktentwicklung	In Planung	2024-09-01	2024-11-30	6500	6500	4	65	0	0	Projekt U ist in Planung und wird voraussichtlich im ersten Quartal 2028 gestartet.
22	Projekt V: Entwicklung eines neuen Dienstleistungsangebots	Produktentwicklung	In Planung	2024-10-01	2024-12-31	10500	10500	6	105	0	0	Projekt V ist in Planung und wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2028 gestartet.
23	Projekt W: Implementierung eines neuen CRM-Systems	IT	In Planung	2024-11-01	2025-01-31	12500	12500	7	125	0	0	Projekt W ist in Planung und wird voraussichtlich im dritten Quartal 2028 gestartet.
24	Projekt X: Schulung der Mitarbeiter für Produkt Z	Schulung	In Planung	2024-12-01	2025-02-28	4500	4500	3	45	0	0	Projekt X ist in Planung und wird voraussichtlich im vierten Quartal 2028 gestartet.
25	Projekt Y: Expansion in neue Märkte	Vertrieb	In Planung	2025-01-01	2025-03-31	8000	8000	5	80	0	0	Projekt Y ist in Planung und wird voraussichtlich im ersten Quartal 2029 gestartet.
26	Projekt Z: Optimierung der bestehenden Produkte	Produktentwicklung	In Planung	2025-02-01	2025-04-30	6000	6000	4	60	0	0	Projekt Z ist in Planung und wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2029 gestartet.

[illegible]

[illegible]

Kategorie	Beschreibung des Produkts	Materialien	Menge	Kosten		Preis		Gewinn		Anmerkungen
				Einzelkosten	Gesamtkosten	Einzelpreis	Gesamtpreis	Einzelgewinn	Gesamtgewinn	
1	Produkt A	Material A	100	10	1000	15	1500	5	500	
2	Produkt B	Material B	200	20	4000	30	6000	10	2000	
3	Produkt C	Material C	50	5	250	8	400	3	150	
4	Produkt D	Material D	300	30	9000	40	12000	10	3000	
5	Produkt E	Material E	150	15	2250	20	3000	5	750	
6	Produkt F	Material F	80	8	640	12	960	4	320	
7	Produkt G	Material G	120	12	1440	18	2160	6	720	
8	Produkt H	Material H	250	25	6250	35	8750	10	2500	
9	Produkt I	Material I	70	7	490	10	700	3	210	
10	Produkt J	Material J	180	18	3240	25	4500	7	1260	
11	Produkt K	Material K	90	9	810	14	1260	5	450	
12	Produkt L	Material L	220	22	4840	32	7040	10	2200	
13	Produkt M	Material M	60	6	360	9	540	3	180	
14	Produkt N	Material N	160	16	2560	22	3520	6	960	
15	Produkt O	Material O	110	11	1210	16	1760	5	550	
16	Produkt P	Material P	280	28	7840	38	10640	10	2800	
17	Produkt Q	Material Q	40	4	160	6	240	2	80	
18	Produkt R	Material R	190	19	3610	27	5130	8	1520	
19	Produkt S	Material S	75	7.5	562.5	11	825	3.5	262.5	
20	Produkt T	Material T	210	21	4410	31	6510	10	2100	
21	Produkt U	Material U	55	5.5	302.5	8.5	467.5	3	165	
22	Produkt V	Material V	170	17	2890	24	4080	7	1190	
23	Produkt W	Material W	105	10.5	1102.5	15.5	1627.5	5	525	
24	Produkt X	Material X	260	26	6760	36	9360	10	2600	
25	Produkt Y	Material Y	35	3.5	122.5	5.5	192.5	2	70	
26	Produkt Z	Material Z	140	14	1960	20	2800	6	840	
27	Produkt AA	Material AA	95	9.5	902.5	13.5	1282.5	4	380	
28	Produkt AB	Material AB	230	23	5290	33	7590	10	2300	
29	Produkt AC	Material AC	65	6.5	422.5	9.5	617.5	3	195	
30	Produkt AD	Material AD	185	18.5	3422.5	26.5	4902.5	8	1480	
31	Produkt AE	Material AE	115	11.5	1322.5	16.5	1897.5	5	575	
32	Produkt AF	Material AF	275	27.5	7562.5	37.5	10312.5	10	2750	
33	Produkt AG	Material AG	45	4.5	202.5	7.5	337.5	3	135	
34	Produkt AH	Material AH	165	16.5	2722.5	23.5	3857.5	7	1132.5	
35	Produkt AI	Material AI	100	10	1000	14	1400	4	400	
36	Produkt AJ	Material AJ	205	20.5	4202.5	30.5	6152.5	10	2050	
37	Produkt AK	Material AK	50	5	250	8	400	3	150	
38	Produkt AL	Material AL	175	17.5	3062.5	25.5	4462.5	8	1400	
39	Produkt AM	Material AM	125	12.5	1562.5	18.5	2312.5	6	1750	
40	Produkt AN									

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No.	Description of the work	Description of the work	Unit	Quantity		Unit Price		Total Price		Remarks	Remarks	Remarks
				Quantity	Unit Price	Quantity	Unit Price	Quantity	Unit Price			
1	Excavation and backfilling of foundation	Excavation and backfilling of foundation	m ³	100	100	100	100	100	100			
2	Reinforcement of foundation	Reinforcement of foundation	m ³	100	100	100	100	100	100			
3	Formwork for foundation	Formwork for foundation	m ²	100	100	100	100	100	100			
4	Concrete pouring for foundation	Concrete pouring for foundation	m ³	100	100	100	100	100	100			
5	Foundation completion	Foundation completion	m ³	100	100	100	100	100	100			
6	Excavation and backfilling of foundation	Excavation and backfilling of foundation	m ³	100	100	100	100	100	100			
7	Reinforcement of foundation	Reinforcement of foundation	m ³	100	100	100	100	100	100			
8	Formwork for foundation	Formwork for foundation	m ²	100	100	100	100	100	100			
9	Concrete pouring for foundation	Concrete pouring for foundation	m ³	100	100	100	100	100	100			
10	Foundation completion	Foundation completion	m ³	100	100	100	100	100	100			
11	Excavation and backfilling of foundation	Excavation and backfilling of foundation	m ³	100	100	100	100	100	100			
12	Reinforcement of foundation	Reinforcement of foundation	m ³	100	100	100	100	100	100			
13	Formwork for foundation	Formwork for foundation	m ²	100	100	100	100	100	100			
14	Concrete pouring for foundation	Concrete pouring for foundation	m ³	100	100	100	100	100	100			
15	Foundation completion	Foundation completion	m ³	100	100	100	100	100	100			
16	Excavation and backfilling of foundation	Excavation and backfilling of foundation	m ³	100	100	100	100	100	100			
17	Reinforcement of foundation	Reinforcement of foundation	m ³	100	100	100	100	100	100			
18	Formwork for foundation	Formwork for foundation	m ²	100	100	100	100	100	100			
19	Concrete pouring for foundation	Concrete pouring for foundation	m ³	100	100	100	100	100	100			
20	Foundation completion	Foundation completion	m ³	100	100	100	100	100	100			
21	Excavation and backfilling of foundation	Excavation and backfilling of foundation	m ³	100	100	100	100	100	100			
22	Reinforcement of foundation	Reinforcement of foundation	m ³	100	100	100	100	100	100			
23	Formwork for foundation	Formwork for foundation	m ²	100	100	100	100	100	100			
24	Concrete pouring for foundation	Concrete pouring for foundation	m ³	100	100	100	100	100	100			
25	Foundation completion	Foundation completion	m ³	100	100	100	100	100	100			
26	Excavation and backfilling of foundation	Excavation and backfilling of foundation	m ³	100	100	100	100	100	100			
27	Reinforcement of foundation	Reinforcement of foundation	m ³	100	100	100	100	100	100			
28	Formwork for foundation	Formwork for foundation	m ²	100	100	100	100	100	100			
29	Concrete pouring for foundation	Concrete pouring for foundation	m ³	100	100	100	100	100	100			
30	Foundation completion	Foundation completion	m ³	100	100	100	100	100	100			
31	Excavation and backfilling of foundation	Excavation and backfilling of foundation	m ³	100	100	100	100	100	100			
32	Reinforcement of foundation	Reinforcement of foundation	m ³	100	100	100	100	100	100			
33	Formwork for foundation	Formwork for foundation	m ²	100	100	100	100	100	100			
34	Concrete pouring for foundation	Concrete pouring for foundation	m<									

[illegible]

Kategorie	Produkt	Beschreibung	Menge	Preis			Menge			Preis			Anmerkungen
				Stück	Netto	Brutto	Stück	Netto	Brutto	Stück	Netto	Brutto	
1	1	Produkt 1	100	10	1000	1100	100	10	1000	1100	100	10	Produkt 1
2	2	Produkt 2	200	20	4000	4400	200	20	4000	4400	200	20	Produkt 2
3	3	Produkt 3	300	30	9000	9900	300	30	9000	9900	300	30	Produkt 3
4	4	Produkt 4	400	40	16000	17600	400	40	16000	17600	400	40	Produkt 4
5	5	Produkt 5	500	50	25000	27500	500	50	25000	27500	500	50	Produkt 5
6	6	Produkt 6	600	60	36000	39600	600	60	36000	39600	600	60	Produkt 6
7	7	Produkt 7	700	70	49000	53900	700	70	49000	53900	700	70	Produkt 7
8	8	Produkt 8	800	80	64000	70400	800	80	64000	70400	800	80	Produkt 8
9	9	Produkt 9	900	90	81000	89100	900	90	81000	89100	900	90	Produkt 9
10	10	Produkt 10	1000	100	100000	110000	1000	100	100000	110000	1000	100	Produkt 10
11	11	Produkt 11	1100	110	121000	133100	1100	110	121000	133100	1100	110	Produkt 11
12	12	Produkt 12	1200	120	144000	158400	1200	120	144000	158400	1200	120	Produkt 12
13	13	Produkt 13	1300	130	169000	185900	1300	130	169000	185900	1300	130	Produkt 13
14	14	Produkt 14	1400	140	196000	215600	1400	140	196000	215600	1400	140	Produkt 14
15	15	Produkt 15	1500	150	225000	247500	1500	150	225000	247500	1500	150	Produkt 15
16	16	Produkt 16	1600	160	256000	281600	1600	160	256000	281600	1600	160	Produkt 16
17	17	Produkt 17	1700	170	289000	315300	1700	170	289000	315300	1700	170	Produkt 17
18	18	Produkt 18	1800	180	324000	356400	1800	180	324000	356400	1800	180	Produkt 18
19	19	Produkt 19	1900	190	361000	395900	1900	190	361000	395900	1900	190	Produkt 19
20	20	Produkt 20	2000	200	400000	440000	2000	200	400000	440000	2000	200	Produkt 20
21	21	Produkt 21	2100	210	441000	485100	2100	210	441000	485100	2100	210	Produkt 21
22	22	Produkt 22	2200	220	484000	532400	2200	220	484000	532400	2200	220	Produkt 22
23	23	Produkt 23	2300	230	529000	580700	2300	230	529000	580700	2300	230	Produkt 23
24	24	Produkt 24	2400	240	576000	631600	2400	240	576000	631600	2400	240	Produkt 24
25	25	Produkt 25	2500	250	625000	687500	2500	250	625000	687500	2500	250	Produkt 25
26	26	Produkt 26	2600	260	676000	738400	2600	260	676000	738400	2600	260	Produkt 26
27	27	Produkt 27	2700	270	729000	793800	2700	270	729000	793800	2700	270	Produkt 27
28	28	Produkt 28	2800	280	784000	854400	2800	280	784000	854400	2800	280	Produkt 28
29	29	Produkt 29	2900	290	841000	910900	2900	290	841000	910900	2900	290	Produkt 29
30	30	Produkt 30	3000	300	900000	990000	3000	300	900000	990000	3000	300	Produkt 30
31	31	Produkt 31	3100	310	961000	1056100	3100	310	961000	1056100	3100	310	Produkt 31
32	32	Produkt 32	3200	320	1024000	1126400	3200	320	1024000	1126400	3200	320	Produkt 32
33	33	Produkt 33	3300	330	1089000	1200300	3300	330	1089000	1200300	3300	330	Produkt 33
34	34	Produkt 34	3400	340	1156000	1278400	3400	340	1156000	1278400	3400	340	Produkt 34
35	35	Produkt 35	3500	350	1225000	1367500	3500	350	1225000	1367500	3500	350	Produkt 35
36	36	Produkt 36	3600	360	1296000	1461600	3600	360	1296000	1461600	3600	360	Produkt 36
37	37	Produkt 37	3700	370	1369000	1561300	3700	370	1369000	1561300	3700	370	Produkt 37
38	38	Produkt 38	3800	380	1444000	1667200	3800	380	1444000	1667200	3800	380	Produkt 38
39	39	Produkt 39	3900	390	1521000	1780100	3900	390	1521000	1780100	3900	390	Produkt 39
40	40	Produkt 40	4000	400	1600000	1920000	4000	400	1600000	1920000	4000	400	Produkt 40
41	41	Produkt 41	4100	410	1681000	2020100	4100	410	1681000	2020100	4100	410	Produkt 41
42	42	Produkt 42	4200	420	1764000	2127600	4200	420	1764000	2127600	4200	420	Produkt 42
43	43	Produkt 43	4300	430	1849000	2242900	4300	430	1849000	2242900	4300	430	Produkt 43
44	44	Produkt 44	4400	440	1936000	2366400	4400	440	1936000	2366400	4400	440	Produkt 44
45	45	Produkt 45	4500	450	2025000	2498500	4500	450	2025000	2498500	4500	450	Produkt 45
46	46	Produkt 46	4600	460	2116000	2639600	4600	460	2116000	2639600	4600	460	Produkt 46
47	47	Produkt 47	4700	470	2209000	2789700	4700	470	2209000	2789700	4700	470	Produkt 47
48	48	Produkt 48	4800	480	2304000	2948400	4800	480	2304000	2948400	4800	480	Produkt 48
49	49	Produkt 49	4900	490	2401000	3115900	4900	490	2401000	3115900	4900	490	Produkt 49
50	50	Produkt 50	5000	500	2500000	3300000	5000	500	2500000	3300000	5000	500	Produkt 50

[illegible]

Kategorie	Beschreibung des Projekts	Zielsetzung	Status	Zeitraum		Kosten		Ressourcen		Risikofaktor	Bemerkungen
				Start	Ende	Geplant	Real	Mitarbeiter	Material		
1	Projekt A: Entwicklung eines neuen Produkts	Produktentwicklung	In Planung	2023	2024	1000	1200	5	10	1	Produktentwicklung
2	Projekt B: Marketingkampagne	Marketing	In Planung	2023	2024	500	600	2	5	1	Marketing
3	Projekt C: IT-Systeme	IT	In Planung	2023	2024	800	900	4	8	1	IT
4	Projekt D: Personalmanagement	Personal	In Planung	2023	2024	300	350	1	3	1	Personal
5	Projekt E: Finanzmanagement	Finanzen	In Planung	2023	2024	200	250	1	2	1	Finanzen
6	Projekt F: Rechtliche Angelegenheiten	Recht	In Planung	2023	2024	150	180	1	1.5	1	Recht
7	Projekt G: Öffentlichkeitsarbeit	PR	In Planung	2023	2024	100	120	1	1.2	1	PR
8	Projekt H: Qualitätsmanagement	QM	In Planung	2023	2024	120	140	1	1.4	1	QM
9	Projekt I: Umweltmanagement	Umwelt	In Planung	2023	2024	110	130	1	1.3	1	Umwelt
10	Projekt J: Sicherheitsmanagement	Sicherheit	In Planung	2023	2024	130	160	1	1.6	1	Sicherheit
11	Projekt K: Energieeffizienz	Energie	In Planung	2023	2024	140	170	1	1.7	1	Energie
12	Projekt L: Wasserwirtschaft	Wasser	In Planung	2023	2024	160	190	1	1.9	1	Wasser
13	Projekt M: Abfallwirtschaft	Abfall	In Planung	2023	2024	170	200	1	2.0	1	Abfall
14	Projekt N: Luftreinhaltung	Luft	In Planung	2023	2024	180	210	1	2.1	1	Luft
15	Projekt O: Lärmschutz	Lärm	In Planung	2023	2024	190	220	1	2.2	1	Lärm
16	Projekt P: Klimaschutz	Klima	In Planung	2023	2024	200	230	1	2.3	1	Klima
17	Projekt Q: Biodiversität	Biodiversität	In Planung	2023	2024	210	240	1	2.4	1	Biodiversität
18	Projekt R: Naturschutz	Naturschutz	In Planung	2023	2024	220	250	1	2.5	1	Naturschutz
19	Projekt S: Landschaftsschutz	Landschaft	In Planung	2023	2024	230	260	1	2.6	1	Landschaft
20	Projekt T: Denkmalschutz	Denkmäler	In Planung	2023	2024	240	270	1	2.7	1	Denkmäler
21	Projekt U: Archäologie	Archäologie	In Planung	2023	2024	250	280	1	2.8	1	Archäologie
22	Projekt V: Historische Baudenkmäler	Baudenkmäler	In Planung	2023	2024	260	290	1	2.9	1	Baudenkmäler
23	Projekt W: Museen	Museen	In Planung	2023	2024	270	300	1	3.0	1	Museen
24	Projekt X: Bibliotheken	Bibliotheken	In Planung	2023	2024	280	310	1	3.1	1	Bibliotheken
25	Projekt Y: Archive	Archive	In Planung	2023	2024	290	320	1	3.2	1	Archive
26	Projekt Z: Dokumentenmanagement	Dokumente	In Planung	2023	2024	300	330	1	3.3	1	Dokumente
27	Projekt AA: Informationsmanagement	Information	In Planung	2023	2024	310	340	1	3.4	1	Information
28	Projekt AB: Wissensmanagement	Wissen	In Planung	2023	2024	320	350	1	3.5	1	Wissen
29	Projekt AC: Innovationsmanagement	Innovation	In Planung	2023	2024	330	360	1	3.6	1	Innovation
30	Projekt AD: Zukunftsmanagement	Zukunft	In Planung	2023	2024	340	370	1	3.7	1	Zukunft

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No.	Name of the project	Description of the project	Year	Budget (in Lakhs)		Actual Expenditure (in Lakhs)				Total Expenditure (in Lakhs)	Percentage of Expenditure (in %)	Remarks
				Approved	Spent	Capital	Revenue	Grant	Other			
1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.2	1.1.1.1.3	1.1.1.1.4	1.1.1.1.5	1.1.1.1.6	1.1.1.1.7	1.1.1.1.8	1.1.1.1.9
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.1.1.2	2.1.1.1.3	2.1.1.1.4	2.1.1.1.5	2.1.1.1.6	2.1.1.1.7	2.1.1.1.8	2.1.1.1.9
3	3.1	3.1.1	3.1.1.1	3.1.1.1.1	3.1.1.1.2	3.1.1.1.3	3.1.1.1.4	3.1.1.1.5	3.1.1.1.6	3.1.1.1.7	3.1.1.1.8	3.1.1.1.9
4	4.1	4.1.1	4.1.1.1	4.1.1.1.1	4.1.1.1.2	4.1.1.1.3	4.1.1.1.4	4.1.1.1.5	4.1.1.1.6	4.1.1.1.7	4.1.1.1.8	4.1.1.1.9
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.1.1	5.1.1.1.2	5.1.1.1.3	5.1.1.1.4	5.1.1.1.5	5.1.1.1.6	5.1.1.1.7	5.1.1.1.8	5.1.1.1.9
6	6.1	6.1.1	6.1.1.1	6.1.1.1.1	6.1.1.1.2	6.1.1.1.3	6.1.1.1.4	6.1.1.1.5	6.1.1.1.6	6.1.1.1.7	6.1.1.1.8	6.1.1.1.9
7	7.1	7.1.1	7.1.1.1	7.1.1.1.1	7.1.1.1.2	7.1.1.1.3	7.1.1.1.4	7.1.1.1.5	7.1.1.1.6	7.1.1.1.7	7.1.1.1.8	7.1.1.1.9
8	8.1	8.1.1	8.1.1.1	8.1.1.1.1	8.1.1.1.2	8.1.1.1.3	8.1.1.1.4	8.1.1.1.5	8.1.1.1.6	8.1.1.1.7	8.1.1.1.8	8.1.1.1.9
9	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.1.1.1.1	9.1.1.1.2	9.1.1.1.3	9.1.1.1.4	9.1.1.1.5	9.1.1.1.6	9.1.1.1.7	9.1.1.1.8	9.1.1.1.9
10	10.1	10.1.1	10.1.1.1	10.1.1.1.1	10.1.1.1.2	10.1.1.1.3	10.1.1.1.4	10.1.1.1.5	10.1.1.1.6	10.1.1.1.7	10.1.1.1.8	10.1.1.1.9
11	11.1	11.1.1	11.1.1.1	11.1.1.1.1	11.1.1.1.2	11.1.1.1.3	11.1.1.1.4	11.1.1.1.5	11.1.1.1.6	11.1.1.1.7	11.1.1.1.8	11.1.1.1.9
12	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.1.1.1.2	12.1.1.1.3	12.1.1.1.4	12.1.1.1.5	12.1.1.1.6	12.1.1.1.7	12.1.1.1.8	12.1.1.1.9
13	13.1	13.1.1	13.1.1.1	13.1.1.1.1	13.1.1.1.2	13.1.1.1.3	13.1.1.1.4	13.1.1.1.5	13.1.1.1.6	13.1.1.1.7	13.1.1.1.8	13.1.1.1.9
14	14.1	14.1.1	14.1.1.1	14.1.1.1.1	14.1.1.1.2	14.1.1.1.3	14.1.1.1.4	14.1.1.1.5	14.1.1.1.6	14.1.1.1.7	14.1.1.1.8	14.1.1.1.9
15	15.1	15.1.1	15.1.1.1	15.1.1.1.1	15.1.1.1.2	15.1.1.1.3	15.1.1.1.4	15.1.1.1.5	15.1.1.1.6	15.1.1.1.7	15.1.1.1.8	15.1.1.1.9
16	16.1	16.1.1	16.1.1.1	16.1.1.1.1	16.1.1.1.2	16.1.1.1.3	16.1.1.1.4	16.1.1.1.5	16.1.1.1.6	16.1.1.1.7	16.1.1.1.8	16.1.1.1.9
17	17.1	17.1.1	17.1.1.1	17.1.1.1.1	17.1.1.1.2	17.1.1.1.3	17.1.1.1.4	17.1.1.1.5	17.1.1.1.6	17.1.1.1.7	17.1.1.1.8	17.1.1.1.9
18	18.1	18.1.1	18.1.1.1	18.1.1.1.1	18.1.1.1.2	18.1.1.1.3	18.1.1.1.4	18.1.1.1.5	18.1.1.1.6	18.1.1.1.7	18.1.1.1.8	18.1.1.1.9
19	19.1	19.1.1	19.1.1.1	19.1.1.1.1	19.1.1.1.2	19.1.1.1.3	19.1.1.1.4	19.1.1.1.5	19.1.1.1.6	19.1.1.1.7	19.1.1.1.8	19.1.1.1.9
20	20.1	20.1.1	20.1.1.1	20.1.1.1.1	20.1.1.1.2	20.1.1.1.3	20.1.1.1.4	20.1.1.1.5	20.1.1.1.6	20.1.1.1.7	20.1.1.1.8	20.1.1.1.9
21	21.1	21.1.1	21.1.1.1	21.1.1.1.1	21.1.1.1.2	21.1.1.1.3	21.1.1.1.4	21.1.1				

Kategorie	Produkt	Beschreibung	Jahr	Produktionskosten (in Mio. €)			Vertriebskosten (in Mio. €)			Gesamtkosten (in Mio. €)	Umsatz (in Mio. €)	Gewinn (in Mio. €)
				Material	Fertigung	Gesamt	Interne Vertriebskosten	Externe Vertriebskosten	Gesamt			
1	Produkt A	Produkt A - Standard	2017	10	20	30	5	5	10	40	50	10
			2018	12	22	32	6	6	12	44	55	11
			2019	15	25	40	7	7	14	54	60	6
			2020	18	28	46	8	8	16	62	65	3
2	Produkt B	Produkt B - Standard	2017	8	15	23	4	4	8	31	40	9
			2018	9	16	25	4	4	8	33	42	9
			2019	10	17	27	5	5	10	37	45	8
			2020	11	18	29	5	5	10	39	48	9
3	Produkt C	Produkt C - Standard	2017	12	25	37	6	6	12	49	60	11
			2018	14	27	41	7	7	14	55	65	10
			2019	16	30	46	8	8	16	62	70	8
			2020	18	32	50	9	9	18	68	75	7
4	Produkt D	Produkt D - Standard	2017	15	30	45	8	8	16	61	75	14
			2018	17	32	49	9	9	18	67	80	13
			2019	19	35	54	10	10	20	74	85	11
			2020	21	37	58	11	11	22	80	90	10
5	Produkt E	Produkt E - Standard	2017	18	35	53	10	10	20	73	90	17
			2018	20	37	57	11	11	22	79	95	16
			2019	22	40	62	12	12	24	86	100	14
			2020	24	42	66	13	13	26	92	105	13
6	Produkt F	Produkt F - Standard	2017	20	40	60	12	12	24	84	100	16
			2018	22	42	64	13	13	26	90	105	15
			2019	24	45	69	14	14	28	97	110	13
			2020	26	47	73	15	15	30	103	115	12
7	Produkt G	Produkt G - Standard	2017	25	50	75	15	15	30	105	120	15
			2018	27	52	79	16	16	32	111	125	14
			2019	29	55	84	17	17	34	118	130	12
			2020	31	57	88	18	18	36	124	135	11
8	Produkt H	Produkt H - Standard	2017	30	60	90	18	18	36	126	150	24
			2018	32	62	94	19	19	38	133	155	22
			2019	34	65	99	20	20	40	140	160	20
			2020	36	67	103	21	21	42	146	165	19
9	Produkt I	Produkt I - Standard	2017	35	70	105	20	20	40	145	170	25
			2018	37	72	109	21	21	42	151	175	24
			2019	39	75	114	22	22	44	158	180	22
			2020	41	77	118	23	23	46	164	185	21
10	Produkt J	Produkt J - Standard	2017	40	80	120	22	22	44	164	200	36
			2018	42	82	124	23	23	46	171	205	34
			2019	44	85	129	24	24	48	177	210	33
			2020	46	87	133	25	25	50	183	215	32
11	Produkt K	Produkt K - Standard	2017	45	90	135	24	24	48	183	220	37
			2018	47	92	139	25	25	50	190	225	35
			2019	49	95	144	26	26	52	197	230	33
			2020	51	97	148	27	27	54	203	235	32
12	Produkt L	Produkt L - Standard	2017	50	100	150	25	25	50	195	250	55
			2018	52	102	154	26	26	52	204	255	51
			2019	54	105	159	27	27	54	211	260	49
			2020	56	107	163	28	28	56	217	265	48
13	Produkt M	Produkt M - Standard	2017	55	110	165	26	26	52	213	280	67
			2018	57	112	169	27	27	54	223	285	62
			2019	59	115	174	28	28	56	230	290	60
			2020	61	117	178	29	29	58	236	295	59
14	Produkt N	Produkt N - Standard	2017	60	120	180	28	28	56	236	300	64
			2018	62	122	184	29	29	58	243	305	62
			2019	64	125	189	30	30	60	250	310	60
			2020	66	127	193	31	31	62	256	315	59
15	Produkt O	Produkt O - Standard	2017	65	130	195	30	30	60	255	320	65
			2018	67	132	199	31	31	62	263	325	62
			2019	69	135	204	32	32	64	270	330	60
			2020	71	137	208	33	33	66	276	335	59
16	Produkt P	Produkt P - Standard	2017	70	140	210	32	32	64	276	340	64
			2018	72	142	214	33	33	66	283	345	62
			2019	74	145	219	34	34	68	290	350	60
			2020	76	147	223	35	35	70	296	355	59
17	Produkt Q	Produkt Q - Standard	2017	75	150	225	34	34	68	297	360	63
			2018	77	152	229	35	35	70	304	365	61
			2019	79	155	234	36	36	72	311	370	59
			2020	81	157	238	37	37	74	317	375	58
18	Produkt R	Produkt R - Standard	2017	80	160	240	36	36	72	316	380	64
			2018	82	162	244	37	37	74	323	385	62
			2019	84	165	249	38	38	76	330	390	60
			2020	86	167	253	39	39	78	336	395	59
19	Produkt S	Produkt S - Standard	2017	85	170	255	38	38	76	333	400	67
			2018	87	172	259	39	39	78	341	405	64
			2019	89	175	264	40	40	80	348	410	62
			2020	91	177	268	41	41	82	354	415	61
20	Produkt T	Produkt T - Standard	2017	90	180	270	40	40	80	350	420	70
			2018	92	182	274	41	41	82	357	425	68
			2019	94	185	279	42	42	84	364	430	66
			2020	96	187	283	43	43	86	370	435	65

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Kategorie	Beschreibung der Maßnahme	Maßnahmenziele	Kosten	Zeitraum	Maßnahmenziele												Maßnahmenziele
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Maßnahme 1	Ziel 1	1000	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Maßnahme 2	Ziel 2	2000	24	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Maßnahme 3	Ziel 3	3000	36	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Maßnahme 4	Ziel 4	4000	48	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Maßnahme 5	Ziel 5	5000	60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Maßnahme 6	Ziel 6	6000	72	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Maßnahme 7	Ziel 7	7000	84	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	Maßnahme 8	Ziel 8	8000	96	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	Maßnahme 9	Ziel 9	9000	108	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Maßnahme 10	Ziel 10	10000	120	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	Maßnahme 11	Ziel 11	11000	132	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	Maßnahme 12	Ziel 12	12000	144	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	Maßnahme 13	Ziel 13	13000	156	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	Maßnahme 14	Ziel 14	14000	168	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	Maßnahme 15	Ziel 15	15000	180	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16	Maßnahme 16	Ziel 16	16000	192	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17	Maßnahme 17	Ziel 17	17000	204	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18	Maßnahme 18	Ziel 18	18000	216	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19	Maßnahme 19	Ziel 19	19000	228	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20	Maßnahme 20	Ziel 20	20000	240	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21	Maßnahme 21	Ziel 21	21000	252	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22	Maßnahme 22	Ziel 22	22000	264	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
23	Maßnahme 23	Ziel 23	23000	276	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
24	Maßnahme 24	Ziel 24	24000	288	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25	Maßnahme 25	Ziel 25	25000	300	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
26	Maßnahme 26	Ziel 26	26000	312	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27	Maßnahme 27	Ziel 27	27000	324	1	1	1	1	1</								

[illegible]

Kategorie	Produkt	Produktbeschreibung	Menge	Preis			Kosten			Gewinn	Umsatz	Gewinn
				Netto	Brutto	Netto	Brutto	Netto	Brutto			
1	Produkt A	Produkt A	1000	100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Produkt B	Produkt B	2000	200	200	200	200	200	200	200	200	
3	Produkt C	Produkt C	3000	300	300	300	300	300	300	300	300	
4	Produkt D	Produkt D	4000	400	400	400	400	400	400	400	400	
5	Produkt E	Produkt E	5000	500	500	500	500	500	500	500	500	
6	Produkt F	Produkt F	6000	600	600	600	600	600	600	600	600	
7	Produkt G	Produkt G	7000	700	700	700	700	700	700	700	700	
8	Produkt H	Produkt H	8000	800	800	800	800	800	800	800	800	
9	Produkt I	Produkt I	9000	900	900	900	900	900	900	900	900	
10	Produkt J	Produkt J	10000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	
11	Produkt K	Produkt K	11000	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	
12	Produkt L	Produkt L	12000	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	
13	Produkt M	Produkt M	13000	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	
14	Produkt N	Produkt N	14000	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	
15	Produkt O	Produkt O	15000	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
16	Produkt P	Produkt P	16000	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	
17	Produkt Q	Produkt Q	17000	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	
18	Produkt R	Produkt R	18000	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	
19	Produkt S	Produkt S	19000	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	
20	Produkt T	Produkt T	20000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	
21	Produkt U	Produkt U	21000	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	
22	Produkt V	Produkt V	22000	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	
23	Produkt W	Produkt W	23000	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	
24	Produkt X	Produkt X	24000	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	
25	Produkt Y	Produkt Y	25000	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	
26	Produkt Z	Produkt Z	26000	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	
27	Produkt AA	Produkt AA	27000	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	
28	Produkt AB	Produkt AB	28000	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	
29	Produkt AC	Produkt AC	29000	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	
30	Produkt AD	Produkt AD	30000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	
31	Produkt AE	Produkt AE	31000	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	
32	Produkt AF	Produkt AF	32000	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	
33	Produkt AG	Produkt AG	33000									

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2.2 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah terdiri dari rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi perangkat daerah.

2.2.1. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan yang diuraikan pada sub bahasan ini merupakan permasalahan yang memiliki nilai prioritas dan berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan di tahun rencana serta prioritas dari kebijakan Pemerintah Provinsi Riau dan Nasional

1. Tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.

Penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir perlu ditingkatkan mengingat besarnya afirmasi dan atensi baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Disamping itu, keberhasilan program Bupati dan pembangunan daerah pada level teknis sangat bergantung pada kinerja aparatur dan kualitas penyelenggaraan pemerintah tersebut. Oleh karena itu, perwujudan tata pemerintahan yang baik sangat perlu untuk ditingkatkan.

2. Pemerataan pembangunan.

Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Indragiri Hilir belum sepenuhnya terpenuhi secara optimal baik kuantitas maupun kualitasnya. Panjang jalan dan jembatan serta infrastruktur perhubungan masih perlu ditingkatkan kualitasnya. Selain itu sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi, serta perumahan perlu penanganannya yang lebih baik lagi. Hal ini dalam rangka mengakomodir penyediaan pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan, serta infrastruktur dasar lainnya di Kabupaten Indragiri Hilir.

3. Pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah.

Pertumbuhan ekonomi sampai saat ini masih menjadi parameter pembangunan suatu wilayah. Sarana dan prasarana penunjang produktivitas pertanian masih belum efektif, hal ini berbanding lurus dengan pemasaran produksi pertanian yang juga masih belum optimal, luas perkebunan kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir adalah yang terluas di Indonesia, namun belum mampu mengangkat perekonomian masyarakat dengan berbagai permasalahan yang dihadapi salah satunya adalah harga kelapa yang cenderung rendah. Kondisi - kondisi tersebut memaksa pemerintah untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkelanjutan, serta berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal.

Tahun 2020, dimana pandemi COVID-19 menambah berat pertumbuhan ekonomi karena untuk memutus mata rantai penyebaran, kita dipaksa untuk membatasi kegiatan, sehingga roda perekonomian berjalan sangat lambat, walaupun dapat tumbuh secara positif dengan nilai yang sangat kecil yaitu 0,34%. Diperlukan adanya sebuah terobosan untuk pemulihan pertumbuhan ekonomi.

4. Kemiskinan dan Pengangguran.

Akses pelayanan sosial dasar bagi PPKS di Kabupaten Indragiri Hilir masih terbilang lambat. Kondisi - kondisi tersebut mengisyaratkan bahwa, pelayanan kebutuhan dasar lain seperti PPKS serta penguatan kearifan lokal melalui modal sosial dan akses lapangan pekerjaan perlu ditingkatkan.

5. Kualitas SDM yang beriman dan berdaya saing.

Akses masyarakat terhadap pelayanan dasar dapat didefinisikan melalui perspektif jarak maupun keterjangkauan layanan. Kabupaten Indragiri Hilir sampai pada tahun 2020 teridentifikasi bahwa beberapa layanan pendidikan dan kesehatan belum sepenuhnya terpenuhi dengan optimal seperti layanan PAUD dan akses pendidikan 12 tahun yang

belum mampu tercapai secara optimal. Kondisi ini dapat merupakan bagian dari efek domino berbagai aspek seperti misalnya aspek fisik seperti infrastruktur, sarana dan prasarana maupun non - fisik seperti sosial, budaya maupun kapasitas finansial.

6. Kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

Pelayanan kesehatan dasar yang masih belum mampu terjangkau oleh keseluruhan masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir khususnya daerah pedesaan dan infrastruktur kesehatan seperti rumah sakit masih belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir.

7. Pengelolaan potensi sumber daya alam dan berwawasan lingkungan.

Kabupaten Indragiri Hilir memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar khususnya perkebunan dan pangan serta perikanan untuk mendorong pengembangan potensi ekonomi dan menciptakan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir. Produksi Perikanan, hasil perkebunan kelapa sawit, kelapa dan tanaman kelapa ini perlu didukung dengan industri hilir sehingga nilai tambah dapat diperoleh oleh Kabupaten Kabupaten Hilir.

Indragiri Hilir mempunyai beberapa tempat wisata yang cukup menarik untuk dikunjungi seperti (i) agrowisata yang berupa hamparan ladang padi dan kelapa, (ii) Bukit bunga indragiri Hilir, (iii) Pantai Solop, (iv) Air Terjun Tembulan Rusa dan (v) Makam Syekh Abdurrahman Siddiq Al Banjari. Namun secara umum, pariwisata di Indragiri Hilir relatif belum berkembang, dimana objek - objek wisata yang ada belum dikelola dengan baik dan dilengkapi sarana-prasarana yang memadai.

8. Kerukunan, ketentraman dan ketertiban.

Upaya meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat masih dihadapkan pada berbagai persoalan seperti banyaknya berbagai masalah sosial (kemiskinan dan pengangguran), disiplin dan kesadaran masyarakat serta penegakan aturan. Tantangan yang akan dihadapi ke

depan yaitu meningkatkan profesionalisme aparat, optimalisasi fungsi institusi - institusi di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta merumbuhkan kesadaran masyarakat.

9. Pembangunan ekonomi perdesaan

Pada periode sebelumnya Pemerintah kabupaten Indragiri Hilir meluncurkan Program yang bernama Desa Maju Indragiri Hilir Jaya. Pada perkembangannya, dengan melihat progres positif yang telah dicapai oleh Desa terutama pada program pembangunan fisik dan kegiatan sosial dan keagamaan lainnya, maka dinilai perlu untuk menambah serta mengevaluasi apa saja yang bisa menjadi nilai tambah dari program ini maka diluncurkanlah yang disebut dengan Program DMU Plus Terintegrasi.

Program ini sebagai wadah bagi seluruh *Stakeholder* untuk memberikan perhatiannya ke Desa dan Kelurahan. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir fokus pada peningkatan ekonomi masyarakat Desa dengan menjadikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai porosnya. Setelah rampung pada pembangunan infrastruktur, membuka akses Desa untuk jalannya perekonomian Desa maka Desa diminta untuk mampu mengelola serta mengontrol potensi lokal Desa sehingga memiliki nilai ekonomis. Desa diharapkan menjadi pilar kuat Daerah dimana Desa memiliki sumber PADes sendiri dan pengelolaannya secara efektif dan efisien dengan SDM yang berkualitas.

2.2.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan pada sub bahasan ini merupakan permasalahan pembangunan berdasarkan urusan yang menyangkut layanan urusan dasar dan tugas / fungsi tiap perangkat daerah.

2.2.2.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

a. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

- Pertumbuhan ekonomi Indragiri Hilir trennya menurun 4,68% pada tahun 2016 dan 3,59% pada tahun 2018 kemudian mengalami peningkatan menjadi 4,19% pada tahun 2019. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi kembali mengalami penurunan yang sangat signifikan menjadi 0,34%. Terus menurunnya pertumbuhan ekonomi Indragiri Hilir selain disebabkan oleh kelembaban ekonomi dunia akibat pandemi COVID-19 dan juga belum berkembangnya sektor - sektor lainnya diluar sektor pertanian, industri pengolahan dan perdagangan besar serta konstruksi.
- PDRB per kapita Indragiri Hilir meski memiliki tren meningkat yaitu dari Rp 55,76 juta/kapita/tahun pada tahun 2016 menjadi Rp 66,60 juta/kapita/tahun pada tahun 2020, namun relatif rendah dibanding PDRB tetangga dengan kinerja untuk peningkatan PDRB per kapita yang cenderung terus meningkat.
- Jumlah penduduk miskin di Indragiri Hilir (44,29 ribu) lebih tinggi dibanding kabupaten tetangga (Indragiri Mulu sebesar 26,66 ribu) pada tahun 2020, namun masih lebih rendah dibanding Kabupaten Pelalawan (45,58 ribu) dengan kinerja penurunan jumlah penduduk miskin yang mengalami peningkatan yaitu dari 85,73% tahun 2016 menjadi 120,48% pada tahun 2020.

b. Fokus Kesejahteraan Sosial

- Pada tahun 2020, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indragiri Hilir sebesar 66,54 adalah yang terendah dibanding IPM kabupaten Indragiri Mulu (69,83) dan Pelalawan (71,36) serta Provinsi Riau (72,71). masih jauh dari capaian IPM minimal dunia (80). Selama periode 2016 - 2020, meski perkembangan IPM Kabupaten Indragiri Hilir cenderung mengalami peningkatan namun kinerja indikator IPM trennya menurun dan dibawah target RPJMD.
- Pada tahun 2020, Harapan lama sekolah (HLS) sebesar 11,91 tahun adalah terendah dibanding kabupaten tetangga seperti Indragiri

Mulu (12,36 tahun) dan Pelalawan (12,14 tahun). Selama periode 2016 - 2020, kinerja indikator harapan lama sekolah trennya mengalami peningkatan tetapi masih dibawah target RPJMD.

- Pada tahun 2020, rata - rata lama sekolah Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 7,23 tahun adalah yang terendah dibanding kabupaten tetangga seperti Indragiri Mulu (8,36 tahun) dan Pelalawan (8,50 tahun). Selama periode 2016 - 2020, kinerja indikator rata - rata lama sekolah trendnya mengalami peningkatan namun masih dibawah target RPJMD.
- APK SD/MI Indragiri Hilir sebesar 104,31%, terendah dibandingkan APK SD/MI kabupaten tetangga seperti Indragiri Hulu (115,35%) dan Pelalawan (110,74%) pada tahun 2018. Selama periode 2016 - 2020, kinerja indikator APK SD/MI trennya berfluktuatif meningkat.
- APK SMP/MTs Indragiri Hilir sebesar 98,33%, tertinggi dibanding kabupaten tetangga seperti Indragiri Mulu (85,26%) dan Pelalawan (87,87%) pada tahun 2018, namun capaian APK ini masih dibawah target RPJMD. Namun, pada tahun 2020 APK SMP/MTs telah melebihi target yang telah ditetapkan dengan kinerja sebesar 100,72%.
- Pada tahun 2020, Angka Harapan Hidup Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 67,55 tahun adalah yang terendah dibanding angka harapan hidup kabupaten tetangga seperti Indragiri Mulu (70,25 tahun) dan Pelalawan (71,16 tahun). Selama periode 2016 - 2020, realisasi kinerja indikator ini trennya berfluktuatif mengalami peningkatan.
- Prevalensi balita gizi sebesar 4,30% (Tahun 2017), lebih tinggi dibanding prevalensi Provinsi Riau yang sebesar 1,64%. Namun, untuk tahun 2020 capaian indikator ini sebesar 0,03 dengan kinerja 196,67%.

- Pada tahun 2020, Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 4,55%. Capaian tingkat pengangguran terbuka tahun 2020 ini lebih baik dibanding capaian Kabupaten tetangga Indragiri Hulu (4,91%), Pelalawan (5,99%) dan Provinsi Riau (6,32%). Selama periode 2016 - 2020, realisasi kinerja indikator pengangguran terbuka trennya berfluktuatif menurun, dalam artian jumlah pengangguran terbuka semakin mengalami peningkatan.

c. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

- Relatif stagnannya cakupan fasilitas seni yang sekaligus menggambarkan masih lemahnya pembinaan dan pengelolaan grup kesenian.
- Semakin berkurangnya perhatian generasi muda untuk berpartisipasi aktif dalam grup-grup kesenian.
- Masih lemahnya pembinaan olahraga sehingga belum berkembang klub - klub olahraga di masyarakat yang berorientasi pada prestasi.

2.2.2.2. Aspek Pelayanan Umum

a. Layanan Urusan Wajib Dasar

1. Pendidikan

- Selama periode 2016 - 2020, APM SD/MI Indragiri Hilir berkisar antara 94,62% - 96,20% yang berarti ada sekitar 3,80% - 5,38% penduduk umur pendidikan SD/MI yang belum sekolah. Capaian ADM SD/MI Indragiri Hilir tahun 2019 lebih rendah dibanding capaian APM Indragiri Hulu (96,44%) dan Provinsi Riau (97,32%).
- Selama periode 2016 - 2020, APM SMP/MTs Indragiri Hilir berkisar antara 79,96% - 82,39%, yang berarti ada sekitar 17,61% - 20,04% penduduk usia 13 - 15 yang belum sekolah.

- Selama periode 2016 - 2020, APS 7 - 12 tahun Indragiri Hilir trendnya meningkat yaitu dari 98,45% pada tahun 2016 menjadi 99,75% pada tahun 2020, yang berarti sebesar 0,25% - 1,57% penduduk umur 7 - 12 tahun Indragiri Hilir yang tidak berpartisipasi pada pendidikan di SD/MI.
- APS 13 - 15 tahun Indragiri Hilir selama periode 2016 - 2020 berkisar antara 90,77% - 92,13%, yang menggambarkan bahwa penduduk umur 13 - 15 tahun Indragiri Hilir yang tidak berpartisipasi pada pendidikan SMP/MTs sebesar 7,87% - 9,25%.
- Persentase bangunan SD/MI dengan kondisi baik hanya sebesar 24,61%. Persentase bangunan SD/MI dalam kondisi baik hanya sebesar 23,53%, lebih rendah dibanding Indragiri Hulu (28,40%), Pelalawan (34,00%) dan Provinsi Riau 29%.
- Persentase bangunan SMP/MTs di Indragiri Hilir dengan kondisi baik hanya sebesar 19,70%. Bangunan SMP/MTs dengan kondisi baik di Indragiri Hilir hanya 20,15%, lebih rendah dibanding Indragiri Hulu (25,15%), Pelalawan (39,76%) dan Provinsi Riau (28,54%).
- Masih terdapat sekitar 25,18% guru yang belum berkualifikasi S1/D.IV sehingga yang bersangkutan belum tersertifikasi sebagai guru.

2. Kesehatan

- Rasio ideal daya tampung rumah sakit adalah setiap 1.000 penduduk : 1 tempat tidur. Pada tahun 2020, Indragiri Hilir kekurangan sekitar 395 tempat tidur lagi.
- Rasio dokter spesialis per 1.000 penduduk masih jauh dibawah norma yaitu sebesar 0,032 (norma 0,15) pada tahun 2020, lebih rendah dibandingkan capaian rasio dokter Indragiri Hulu tahun

2020 yang sebesar 0,041. Pada tahun 2020, Indragiri Hilir masih membutuhkan sebanyak 52 dokter spesialis sehingga rasionya ideal.

- Rasio dokter umum per 1.000 penduduk masih jauh dibawah norma yaitu sebesar 0,064 (norma 0,40). Pada tahun 2020, Indragiri Hilir masih membutuhkan tambahan dokter umum sebanyak 105 orang dokter umum.
- Rasio dokter gigi per 1.000 penduduk masih jauh dibawah norma yaitu 0,031 (norma 0,11). Pada tahun 2020, Indragiri Hilir masih membutuhkan 45 orang dokter gigi.
- Rasio perawat per 1.000 penduduk masih dibawah norma yaitu 0,97 (norma 1,1). Pada tahun 2020, Indragiri Hilir masih membutuhkan perawat sekitar 200 orang lagi.
- Rasio Bidan per 1.000 penduduk masih dibawah norma yaitu 0,59 (norma 1,0). Pada tahun 2020, Indragiri Hilir masih membutuhkan sebanyak 693 orang Bidan.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Proporsi jalan Kabupaten dengan kondisi Baik (4,52%) dan Mantap (57,84%), masih dibawah target dan standar Nasional (60%).
- Proporsi jembatan dengan kondisi Baik (36,32%) dan Mantap (43,36%), masih dibawah standar Nasional.
- Proporsi irigasi dalam kondisi baik sebesar 30%, masih dibawah target yang ditetapkan (32%)
- Rendahnya kualitas infrastruktur yang dibangun dan kondisi lahan gambut dan rawa pasang surut mengakibatkan tingginya frekuensi pemeliharaan terhadap infrastruktur tersebut.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

- Rendahnya rumah tangga pengguna air bersih sampai tahun 2019 hanya sebesar 21,49% dari total rumah tangga di Kabupaten Indragiri Hilir.

- Masih terbatasnya pembangunan rumah layak huni di Indragiri Hilir yaitu berkisar antara 20 unit - 162 unit per tahun selama periode 2009 - 2017. Disisi lain, jumlah rumah yang tidak layak huni di Kabupaten Indragiri Hilir mencapai 16.968 unit rumah.
- Masih adanya permukiman kumuh di perkotaan yaitu sebesar 22%.
- Masih Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur dasar di wilayah permukiman.
- Kurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di seluruh Kabupaten Indragiri Hilir sesuai dengan Permendagri 20 % dari Luas Perkotaan.

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- Rasio rumah ber DMF baru 2,30% dari total rumah yang ada di Indragiri Hilir.
- Rasio personel Satpol PP per 10.000 penduduk masih rendah yaitu 0,04 sehingga penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah kurang optimal.
- Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketertiban masyarakat masih rendah dengan kinerja 10% sebagai konsekuensi kurangnya tenaga Satpol PP.
- Belum tersedianya data Daerah Rawan Bencana dimasing-masing Kecamatan secara menyeluruh di Kabupaten indragiri Hilir sebagai acuan identifikasi bencana.
- Dukungan anggaran pada APBD Kabupaten Indragiri Hilir terhadap pelaksanaan penanggulangan bencana masih rendah.
- Pengalokasian dana siap pakai tidak berada di APBD Kabupaten Indragiri Hilir sehingga sulit diakses ketika terjadi bencana dalam rangka penanggulangan bencana.
- Rehabilitasi dan Rekonstruksi daerah terdampak bencana belum terlaksana dengan baik karena terbentuk anggaran.

- Kurangnya keterlibatan multi pihak dalam penanggulangan bencana dan membangun ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.

6. Sosial

- Belum optimalnya pendataan, verifikasi dan validasi data kemiskinan keluarga penerima manfaat (KPM) melalui sistem layanan dan rujukan terpadu dan SINK-NG menuju penyediaan Basis Data Terpadu (BDT).
- Belum optimalnya penanganan bencana alam dan bencana sosial karena kekurangan penyediaan logistik bencana dan biaya operasional.
- Belum optimal penanganan anak bermasalah sosial.

b. Layanan Urusan Wajib Non Dasar

1. Tenaga Kerja

- Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Indragiri Hilir adalah yang terendah dibanding Kabupaten sekitar dan Provinsi Riau dengan capaian kinerja yang terus menurun.
- Persentase pencari kerja yang ditempatkan di Indragiri Hilir sebesar 3,89%.
- Kegiatan pemberian pelatihan kewirausahaan kepada tenaga kerja pada tahun 2020 tidak dapat dilaksanakan karena ketiadaan anggaran akibat di *reconfiguring* untuk penanganan COVID-19.
- Tidak berjalannya peranan dan fungsi Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang telah dibentuk di perusahaan.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Indeks pembangunan gender (IPG) Indragiri Hilir sebesar 82,34% adalah yang terendah dibandingkan IPG kabupaten tetangga dan Provinsi Riau.
- Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indragiri Hilir yaitu sebesar 61,05% juga termasuk yang terendah dibanding kabupaten tetangga dan Provinsi Riau.
- Masih lemahnya kelembagaan/institusi yang mendukung pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak, kurangnya pemahaman tentang kota layak anak serta terbatasnya sarana dan prasarana dalam menuju kota layak anak.

3. Pangan

- Selama periode 2016 - 2020, belum tersedia regulasi ketahanan pangan di Kabupaten Indragiri Hilir.

4. Pertanian

- Persentase luas tanah yang bersertifikat baru sebesar 41,39%.
- Belum memadainya SDM dalam bidang Sistem Pendaftaran Tanah.
- Masih terdapatnya aset kekayaan daerah yang belum memiliki bukti autentik, sehingga rawan terjadi penyerobotan.

5. Lingkungan Hidup

- Belum memiliki laboratorium lingkungan dan perlengkapannya guna memberikan hasil sampel yang cepat untuk disampaikan dalam waktu dan tempat tertentu
- Belum adanya pejabat Fungsional PFLHD DAN PPNIS Lingkungan dalam upaya melakukan pemantauan dan pengawasan serta pembinaan pengelolaan lingkungan.
- Kurangnya sarana dan prasarana untuk pengendalian pencemaran lingkungan dan pengendalian kerusakan hutan dan lahan
- Masih tingginya pencemaran lingkungan hidup.

- Masih tingginya kerusakan lingkungan hidup, kerusakan DAS, degradasi kawasan pesisir, abrasi pantai, kebakaran hutan dan lahan.
- Persentase penanganan sampah masih belum optimal, baru sekitar 31,49%.
- Tingginya alih fungsi hutan dan lahan.
- Kabupaten Indragiri Hilir belum memiliki tempat pemrosesan akhir (TPA) sesuai standar (*Sanitary landfill/controlled landfill*).

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Cakupan penerbitan kartu keluarga mencapai 126%
- Kepemilikan KTP (e-KTP) hanya 99% dari total penduduk Indragiri Hilir yang harus ber-KTP.
- Kepemilikan akte kelahiran hanya sebanyak 556 per 1.000 penduduk Indragiri Hilir. Masih ada 456 penduduk dari 1.000 penduduk yang belum ada akte kelahiran.
- Keterbatasan peralatan untuk mendukung kegiatan administrasi kependudukan.
- Tidak sinkronnya data penduduk baik jumlah penduduk ataupun LAMPID (Lahir, Mati, Pindah, Datang) karena tidak dilaporkan secara berkala dari Kecamatan.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- Program DMIJ telah berhasil meningkatkan ketersediaan infrastruktur desa namun belum mendorong secara signifikan ekonomi masyarakat desa.
- Capaian desa maju masih sangat rendah yaitu hanya 79 desa, nihil desa dengan status desa Mandiri dan masih ada sebanyak 17 desa dengan status Sangat Tertinggal.

- Masih sangat lemahnya kapasitas Pemerintahan dan Kelembagaan Desa memananag kegiatan - kegiatan desa.
- Masih rendahnya pengelolaan admisnistrasi keuangan desa.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- Cakupan peserta KB aktif masih 64,10%.
- Cakupan PUS peserta KB masih 77,81%.
- Masih rendahnya partisipasi keluarga dalam pengaruhan dan pembinaan tumbuh anak, remaja dan bina lansia.
- Belum optimalnya peran masyarakat dalam program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKB/PK) serta pemanfaatan kelompok-kelompok kegiatan untuk peningkatan, pembinaan dan kemandirian peserta KB.
- Belum optimalnya pemanfaatan kelompok-kelompok kegiatan untuk peningkatan, pembinaan dan kemandirian peserta KB.
- Masih kurangnya penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP).
- Masih kurangnya tenaga (petugas lapangan), sarana dan prasarana.

9. Perhubungan

- Kurangnya SDM Teknis Perhubungan baik Kualitas Maupun Kuantitas dalam Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir.
- Kurangnya Ketersediaan Produk Mukum baik peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati.
- Kurangnya sarana Prasarana perhubungan di kabupaten Indragiri Hilir.
- Belum beroperasi secara maksimal UPT pengujian kendaraan bermotor , terminal dan perpakiran pada Dinas Perhubungan di kabupaten Indragiri Hilir.

- Kurangnya Pemeliharaan dan atau peningkatan Prasarana perhubungan di kabupaten Indragiri Hilir.
- Masih rendahnya pemenuhan standar layanan angkutan di kabupaten Indragiri Hilir.

10. Komunikasi dan Informatika

- Masih lemahnya cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan.
- Sebagian besar penduduk Indragiri Hilir belum dapat mengakses internet untuk mendapatkan informasi.

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- Koperasi aktif di Indragiri Hilir sebesar 67,00%.
- Usaha mikro dan kecil persentasenya sebesar 72,00%.
- Rendahnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi yang mengakibatkan tertinggalnya kinerja koperasi, dan kurang baiknya citra koperasi.
- Kapasitas dan kualitas para pengelola Koperasi, sebagian besar masih sangat rendah.
- Sumber daya manusia Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah relatif rendah kualitas.
- Kebanyakan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menggunakan teknologi sederhana, kurang memanfaatkan teknologi yang lebih memberikan nilai tambah produk.
- Terbatasnya jaringan pasar dan pemasaran koperasi dan UKM, Kebanyakan hanya memiliki akses pasar di tingkat lokal dan sedikit yang melakukan ekspor melalui usaha menengah dan besar yang berlaku sebagai perantara.

12. Penanaman Modal

- Realisasi PMDN masih rendah yaitu Rp 449 milyar, dibawah target Rp 11.112 milyar tahun 2020.

- Realisasi PMA jauh masih rendah yaitu USD 274,36 juta, dibawah target USD 106 juta.
- Belum maksimalnya pengendalian pelaksanaan penanaman modal (pemantauan pembinaan dan pengawasan).
- Terbatasnya kompetensi SDM dan sarana dan prasarana penunjang kegiatan BP2MD.
- Lemahnya koordinasi antar dinas/instansi kecamatan dan kelurahan dalam pengurusan perijinan penanaman modal.
- Masih kurangnya upaya promosi daerah melalui kegiatan berskala regional, nasional maupun internasional.

13. Kepemudaan dan Olahraga

- Masih rendah persentase wirasusaha muda.
- Masih rendah cakupan pembinaan olahraga.
- Masih rendah cakupan pelatih yang bersertifikat.
- Masih rendah cakupan pembinaan atlet muda.
- Pembinaan olahraga belum berorientasi prestasi.

14. Statistik

- Data-data untuk pengukuran indikator kinerja pada RPJMD banyak yang tidak tersedia di Indragiri Hilir Dalam Angka, kecamatan dalam Angka, PDRB, Statistik Daerah dan Indikator kesejahteraan serta terbitan lainnya.
- Koordinasi dan sinergi antara Pemerintahan Kabupaten khususnya SKPD dengan BPS Kabupaten Indragiri Hilir masih lemah.

15. Persandiaan

- Urusan persandian ini belum mendapat perhatian cukup oleh pemerintah daerah.

16. Kebudayaan

- Penyelenggaraan festival seni dan budaya masih terbatas.

- Sarana penyelenggaraan seni dan budaya masih terbatas kuantitas dan kualitasnya.
- Mulai ditinggalkannya nilai - nilai budaya dan kesenian tradisional dikalangan masyarakat.
- Belum optimalnya pemeliharaan cagar budaya dan bangunan bersejarah.

17. Perpustakaan

- Jumlah perpustakaan yang masih terbatas yaitu sebanyak 4.972 orang.
- Koleksi buku perpustakaan yang masih terbatas dengan pelayanan yang belum baik.

18. Kearsipan

- Masih relatif rendahnya pengelolaan arsip secara baku yaitu sebesar 30,36%.
- Terbatasnya jumlah SDM yang berkualitas untuk pengelola kearsipan yaitu sebanyak 3 orang.

c. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Pariwisata

- Pandemi COVID-19 memaksa semua orang untuk mengurangi interaksi guna mencegah penyebaran sehingga jumlah kunjungan wisatawan ke Indragiri Hilir mengalami penurunan menjadi 22.047 wisatawan pada tahun 2020.
- Belum memadai sarana dan prasarana pendukung objek wisata yang ada.

2. Pertanian

- Produksi beras Indragiri Hilir belum mencukupi konsumsi penduduk Indragiri Hilir.
- Produktivitas kelapa masih rendah yaitu 1.217 ton kopra/hektar .

- Produktivitas kelapa sawit rakyat masih rendah yaitu 2,515 ton CPO/hektar, dibawah produktivitas perkebunan besar Indragiri Hilir (4,24 ton CPO/hektar).
- Pembangunan infrastruktur kebun terutama pembangunan tanggul mekanik dan normalisasi saluran yang masih jauh dibawah kebutuhan.
- Kegiatan rehabilitasi/peremajaan kebun kelapa belum dapat menyentuh seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir.
- Harga kelapa petani PIR maupun petani non PIR berfluktuatif dan cenderung rendah.

3. Perdagangan

- Nilai ekspor bersih perdagangan Indragiri Hilir yang cenderung terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2020 mencapai USD 409,15 juta.
- Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB telah melebihi dari target yang telah ditetapkan.

4. Perindustrian

- Nilai produksi usaha menengah kecil masih rendah dibawah target yang telah ditetapkan.
- Kontribusi sektor industri terhadap PDRB relatif masih rendah yaitu 14,05%.
- Belum optimalnya pengembangan industri kecil menengah dan kewirausahaan masyarakat.
- Masih rendahnya jumlah industri pengolahan, bahkan industri pengolahan kelapa terus menurun jumlahnya.
- Rendahnya daya saing industri kecil menengah di Kabupaten Indragiri Hilir.

5. Transmigrasi

- Kegiatan-kegiatan ketransmigrasian secara terbatas pada transmigrasi lokal.

6. Kelautan dan Perikanan

- Produksi perikanan Indragiri Hilir masih mengandalkan perikanan tangkap dan sangat terbatas pada perikanan budidaya.
- Konsumsi ikan penduduk Indragiri Hilir yang rata-ratanya sebesar 39,69 ton/kapita perlu didorong meningkat menjadi 50,50 ton/kapita/tahun.
- Masih terdapatnya penangkapan ikan dengan menggunakan bahan beracun dan alat terlarang.
- Terjadinya konflik antara sesama nelayan dalam hal menentukan lokasi penangkapan.
- Rendahnya kemampuan petani pembudidaya tambak dalam hal merevitalisasi tambaknya.

d. Penunjang Urusan

1. Perencanaan Pembangunan

- Terbatasnya Sumber daya kuantitas (fungsional) dan kualitas perencana pembangunan.
- Hasil Evaluasi (RPJMD, RKPD dan lainnya) belum sepenuhnya menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan berikutnya.
- Terbatasnya sumber data yang lengkap dan akurat yang dapat dipedomani dalam penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.

2. Keuangan

- Realisasi Pendapatan daerah yang kurang tercapai.
- Masih rendahnya pendapatan asli daerah.
- Masih kurangnya petugas yang memiliki kompetensi dibidang pemeriksaan pajak daerah.

- Pemerintah Indragiri Hilir belum sepenuhnya menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual.

3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Latihan

- Penempatan pegawai belum sepenuhnya didasarkan pada standar kompetensi jabatan.
- Belum optimalnya pemenuhan akan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai, baik diklat struktural, fungsional maupun teknis.
- Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan pegawai oleh sebagian pejabat struktural kepada PNS bawahannya yang indiscipliner, sementara peraturan disiplin PNS telah memberikan kewenangan sesuai dengan jenjang jabatannya.

4. Kesatuan Bangsa dan Politik

- Pendidikan politik masyarakat masih rendah dapat dilihat dari menurunnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu maupun pemilukada di Kabupaten Indragiri Hilir.
- Krisis kepercayaan terhadap pemerintah, permasalahan krisis kepercayaan terhadap pemerintah mengakibatkan berkurang kewajiban pemerintah daerah dan rendahnya respon masyarakat dalam menangkal berbagai friksi sosial politik yang bernuasa kepentingan kelompok atau golongan, krisis kepercayaan terhadap pemerintahan dapat dilihat dari tingkat penegakan hukum dan terjadinya demonstrasi yang memprotes pemerintah.
- Terdapat potensi gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat dikarenakan Heterogenitas dan Multikultural yang terjadi perkembangan dinamika kehidupan masyarakat juga arus globalisasi khususnya dibidang teknologi, informasi, budaya dan ekonomi

memunculkan akses - akses negatif dengan munculnya modus-modus kejahatan baru dengan memanfaatkan teknologi canggih dan maraknya kasus-kasus kerusakan dan berbagai kejahatan yang bersifat konvensional.

- Meningkatnya Penyakit Masyarakat seiring dengan perkembangan wilayah perkotaan, berupa kasus pecandu narkoba yang semakin meresahkan ketika pelajar dan remaja mulai terlibat di dalamnya.

3. Penelitian dan Pengembangan

- Masih sedikit pemanfaatan hasil penelitian untuk pembangunan di Indragiri Hilir.
- Penelitian yang dilakukan spasial dan tidak komprehensif sehingga sukar diterapkan.

6. Pengawasan

- Masih banyak temuan APIP yang belum ditindak lanjuti. Persentase APIP yang ditindaklanjuti sebesar 70,96%.
- Masih terbatas jumlah personel APIP yang hanya 12 orang dan idealnya sebanyak 45 orang.
- Lemahnya penegakan hasil temuan APIP sehingga kejadian serupa berulang kembali.

7. Sekretariat Dewan

- Rasio pembahasan prolegda yang semakin meningkat dimana pada tahun 2016 sebesar 98,31% menjadi 100% tahun 2020.

2.2.2.3. Aspek Daya Saing

- Pengeluaran Per Kapita penduduk Kabupaten Indragiri Hilir sebesar Rp 10.362 ribu, lebih rendah dibanding pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Indragiri Hulu (Rp 10.738 ribu), Pelalawan (Rp 12.149) dan Provinsi Riau (Rp 11.255) tahun 2019.

- Nilai Tukar Petani (NTP) di Kabupaten Indragiri Hilir telah berada pada angka 130,34 yang berarti petani di Indragiri Hilir tidak lagi mengalami defisit artinya kenaikan harga produksi relatif lebih besar dibanding dengan kenaikan harga barang konsumsinya, pendapatan petani naik, lebih besar dari pengeluarannya.
- Rumah tangga yang menggunakan listrik masih 51,50% dari total rumah tangga di Kabupaten Indragiri Hilir. Realisasi kinerja indikator persentase rumah tangga yang menggunakan listrik menurun dari 98,59% pada tahun 2015 menjadi 93,64% pada tahun 2019.

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Bab Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah terdiri dari dua bagian utama yaitu perubahan arah kebijakan ekonomi daerah dan perubahan arah kebijakan keuangan daerah. Perubahan arah kebijakan ekonomi daerah diperlukan sebagai langkah penyesuaian atas asumsi atau proyeksi ekonomi makro yang telah ditetapkan sebelumnya karena jika tidak dilakukan perubahan atau penyesuaian maka tujuan pembangunan daerah dan target indikator makro ekonomi daerah tidak akan dapat dicapai. Pasca Pandemi COVID-19 dilakukan penyesuaian terkait indikator pencapaian perekonomian dan stabilitas sistem keuangan. Dihadapkan pada situasi ini pemerintah harus segera melakukan perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan kondisi terkini.

Perubahan arah kebijakan keuangan daerah berisikan uraian tentang perubahan kebijakan khususnya terkait hasil audit BPK RI terhadap SILPA Tahun 2021 yang ternyata jauh dari asumsi/perkiraan yang telah ditetapkan dan implikasinya terhadap kebijakan keuangan tahun anggaran 2022. Hasil audit dimaksud mengharuskan pemerintah

daerah untuk melakukan penyesuaian terhadap proyeksi pendapatan dan belanja serta pembiayaan daerah.

Perekonomian domestik sepanjang semester I tahun 2022 mampu menunjukkan tren positif di tengah perkembangan pandemi Covid-19 dan dinamika perekonomian global. Pemulihan ekonomi berlanjut seiring keberhasilan Pemerintah dalam menekan kasus harian Covid-19 dan kontinuitas pelaksanaan program vaksinasi Covid-19. Pada triwulan I tahun 2022, perekonomian Indonesia mampu tumbuh sebesar 3,01 persen (yoy), yang ditopang oleh membaiknya konsumsi rumah tangga seiring meningkatnya aktivitas masyarakat. Kondisi fundamental ekonomi lainnya di Indonesia juga relatif sehat yang terpantau dari relatif stabilnya pergerakan nilai tukar dan kinerja bursa (IHSG) yang terjaga. Namun demikian, Pemerintah tetap mencermati berbagai risiko yang muncul antara lain dampak kenaikan harga komoditas seperti minyak mentah, batubara, dan CPO terhadap pelaksanaan APBN, baik dari sisi pendapatan negara maupun belanja negara. Kebijakan APBN diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, daya beli, dan kesehatan masyarakat dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal. Untuk itu, pelaksanaan APBN pada semester II tahun 2022 diarahkan untuk tetap fleksibel dalam meredam risiko perkembangan pandemi maupun perekonomian global.

Perekonomian Indonesia terus melanjutkan tren pemulihan hingga triwulan I tahun 2022. Meskipun varian Omicron sempat melonjak tajam

di bulan Februari 2022, perekonomian Indonesia pada triwulan I tahun 2022 mampu tumbuh sebesar 3,01 persen (yoy). Respons kebijakan Pemerintah yang lebih baik dan lebih siap serta daya adaptasi masyarakat dan dunia bisnis dalam menghadapi gelombang pandemi berhasil meminimalisir dampak negatif dari gelombang varian Omicron tersebut. Selain itu, program vaksinasi serta keberlanjutan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) turut memegang peranan krusial dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional. Berbagai program yang digulirkan oleh Pemerintah berhasil mengakselerasi performa ekonomi di triwulan I tahun 2022, baik dari sisi pengeluaran maupun sisi produksi.

Sasaran Ekonomi Makro Nasional tahun 2023 mempunyai tema “Peningkatan Produktifitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan” diiringi oleh peningkatan kualitas pertumbuhan. Sasaran ekonomi makro yang hendak dicapai pada tingkat kemiskinan 7,5-8,5, dengan Tingkat pengangguran terbuka 5,3-6,0. Untuk rasio gini 0,375-0,378, IPM 73,91-73,49, secara lebih rinci digambarkan pada table 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1

Sasaran Ekonomi Makro Indonesia Tahun 2023

Uraian	2021	2022 Outlook	2023	
			RPJMN	Sasaran
Perkiraan Besaran-Besaran Pokok				
Pertumbuhan PDB (yoy)	2,48	5,4 - 6,0	4,9	5,3 - 5,9

Uraian	2021	2022 Outlook	2023	
			RFP/MN	Sasaran
Laju inflasi IHK (yoy): Akhir Periode	1,87	2,0 - 4,0	2,7	2,0 - 4,0
Target Pembangunan				
Tingkat Kemiskinan ()	9,71	8,5 - 9,0	5,25	7,5 - 8,5
Tingkat Pengangguran Terbuka ()	6,48	5,5 - 6,2	5,20	5,3 - 6,0
Rasio Gini (nilai)	0,381	0,376 - 0,378	0,360 - 0,374	0,375 - 0,378
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (nilai)	72,29	73,44 - 73,48	75,54	73,31 - 73,49

Sumber : Kementerian PPN/Bappenas, 2022

3.1. Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perubahan arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 mengacu kepada kondisi perekonomian daerah terkini dan perubahan arah kebijakan ekonomi Provinsi Riau yang bersumber dari dokumen Perubahan RKPD Provinsi Riau Tahun 2022.

Tahun 2022 ini masih dihadapi dalam upaya pemulihan ekonomi akibat ketidakpastian ekonomi global dan dampak wabah COVID-19. Upaya pemulihan ekonomi dan target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir, Kejadian COVID-19 mempengaruhi perekonomian daerah, kegiatan-kegiatan ekonomi dihadapkan kepada ketidakpastian, berkurangnya lapangan usaha, terjadi pengurangan tenaga kerja, serta ancaman gangguan aktivitas ekonomi masyarakat akibat krisis kesehatan yang terjadi. Melihat kondisi perekonomian diatas pemerintah daerah

perlu menyiapkan langkah-langkah konkrit sebagai antisipasi perubahan ekonomi.

Sasaran dan Target pada Perubahan RKPD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2022, tidak terlepas dari capaian-capaian tahun-tahun sebelumnya. Perkembangan indikator makro yang menjadi sasaran dan target yang harus dicapai pada RKPD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2022, secara ringkas ditunjukkan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2.

Perkembangan Indikator Makro Kabupaten Indragiri Hilir

No	Indikator Makro	Satuan	Realisasi		Target RKPD 2022	Target Perubahan RKPD 2022
			2020	2021		
1.	Pertumbuhan Ekonomi		0,34	4,44	3,61-4,9	4,9
2.	Tingkat Kemiskinan		5,93	6,18	5,54-4,97	5,56
3.	IPM	Indeks	66,54	66,43	70,29-70,69	70,29
4.	Gini Ratio	Indeks	0,310	0,397	0,52	0,52
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka		4,35	2,66	3,54	3,54

Sumber : BPS, Bappeda, 2022 .

3.2. Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan yang menyangkut kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan yang terintegrasi dalam satu dokumen APBD. Kebijakan pengelolaan keuangan yang terintegrasi dalam APBD merupakan kebijakan yang strategis dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran

pembangunan daerah sebagaimana dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah.

3.2.1. Perubahan Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Dasar Hukum Pendapatan Daerah adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan penerimaan daerah harus dilakukan dengan cermat dan tepat.

Jumlah pendapatan yang ditargetkan pada perubahan RKPD Tahun 2022 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada perubahan RKPD tahun 2022, Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp. 1.917.16.228.586 naik sebesar Rp. 340.782.120.799 atau sebesar 21,62 dari target Pendapatan pada RKPD Murni sebesar Rp. 1.576.380.107.786, mengalami kenaikan pada Pendapatan Transfer dan Pendapatan Asli Daerah dengan rincian Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar Rp. 193.789.108.026 naik sebesar Rp. 11.266.406.262 atau sebesar 6,17% dari target sebesar Rp. 182.522.701.764. Pendapatan Transfer ditargetkan sebesar Rp. 1.723.373.120.569 naik sebesar Rp. 401.234.114.537 atau sebesar 30,33 dari target sebesar Rp. 1.322.139.006.022, sedangkan Lain-Lain Pendapatan

Daerah Yang Sah tidak ditargetkan pada tahun 2022, untuk lebih rincinya dapat dilihat pada Tabel 3.3. dibawah ini.

Tabel 3.3.
 Target Pendapatan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2022

Kode	Uraian	RKPD 1 Januari 2022	APBD 1 Januari 2022	Perubahan RKPD 2022	Selisihnya (Berimbang)	
4	PENDAPATAN DAERAH					
04.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	191.532.701.766	189.121.679.369	191.758.105.036	11.386.406.362	6,37%
04.01.01	Dipai Daerah	68.373.739.633	68.379.487.367	68.485.487.367	1.277.737.428	1,88%
04.01.02	Retribusi Daerah	4.345.933.800	4.395.973.800	4.431.933.800	200.800.000	4,54%
04.01.03	Uang Pengalihan-Kepentingan Daerah yang Digunakan	11.928.460.840	11.928.460.840	14.107.147.794	1.181.697.284	10,30%
04.01.04	Lain-lain PAD yang sah	121.984.679.593	128.823.679.593	128.295.960.432	7.411.480.432	6,08%
04.02	PENDAPATAN TRAHONER	1.822.128.006.012	1.866.796.403.171	1.728.374.120.509	605.234.216.237	30,37%
04.02.01	Pendapatan Transfer Pemecatan Pensi	1.221.331.366.000	1.441.859.663.151	1.569.731.015.289	348.511.337.366	28,55%
04.02.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	120.936.610.012	101.896.610.012	128.628.703.290	32.715.387.366	27,01%
04.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	71.732.400.000	-	0	-	0,00%
04.03.01	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	71.732.400.000	-	0	-	0,00%
	Jumlah Pendapatan	1.876.380.107.766	1.761.828.142.541	1.907.141.225.545	240.782.130.799	12,87%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 (diolah) dan Hasil Pengolah

Proyeksi kenaikan Pendapatan Asli Daerah ini terjadi dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu :

1. Adanya trend positif terhadap tingkat pertumbuhan pembayaran pajak daerah pada beberapa bulan terakhir, sehingga potensi penerimaan diperkirakan naik hingga akhir tahun, khususnya pada pajak penerangan jalan, pajak reklame dan bphtb;
2. Tingkat kesadaran pembayaran pajak, baik pembayaran tahun berjalan maupun pembayaran tunggakan juga mengalami trend kenaikan hingga akhir tahun;
3. Nilai positif terhadap adanya peralihan dan peningkatan hak atas tanah hingga akhir tahun juga berbanding lurus dengan pembayaran BPHTB;
4. Masih terdapat objek-objek pajak daerah lainnya yang terus dioptimalkan sebagai potensi penerimaan daerah hingga akhir tahun.
5. Terhadap beberapa jenis retribusi yang mengalami kenaikan positif hingga triwulan kedua tahun berjalan sehingga perlu dioptimalkan hingga akhir tahun.
6. Bentuk penyertaan modal pada bank daerah perlu dioptimalkan semaksimal mungkin sebagai bentuk komitmen dalam optimalisasi penerimaan daerah.
7. Terdapat penambahan atas penerimaan BLUD Rumah Sakit yang diperkirakan hingga akhir tahun akan terus meningkat.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka upaya untuk meningkatkan pertumbuhan dan pencapaian realisasi PAD yang bersumber dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah perlu terus dilakukan dan untuk sumber-sumber lainnya perlu ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan agar mewujudkan kemandirian Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam rangka menyelenggarakan pembangunan daerah.

Mengacu kepada kondisi ekonomi daerah dan tantangan dan prospek perekonomian daerah, selanjutnya dilakukan analisis dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah.

3.2.2. Perubahan Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan belanja yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk menjalankan aktivitas pemerintahan baik itu memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun melaksanakan pembangunan. Kebijakan belanja daerah senantiasa memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada perubahan RKPD Tahun 2022.

Pada Perubahan RKPD Tahun 2022, belanja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir ditargetkan sebesar Rp. 2.132.118.564.351 naik sebesar Rp. 231.731.031.034 atau sebesar 12% dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp. 1.629.176.645.101 naik sebesar Rp.196.859.869.228 atau naik sebesar

14% dari target Rp.1.432.316.775.573, Belanja Modal ditargetkan sebesar Rp. 206.060.174.360 naik sebesar Rp. 65.920.436.573 atau sebesar 47% dari target sebesar Rp.140.139.735.807, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 17.727.375.195 turun sebesar Rp. 25.272.624.505 atau sebesar (59%) dari target sebesar Rp.43.000.000.000, sedangkan Belanja Transfer ditargetkan sebesar Rp.279.154.369.675 turun sebesar Rp. 5.776.651.962 atau sebesar (2%) dari target sebesar Rp.284.931.021.637.

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 2/1/2022 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022, terdapat Alokasi Bantuan Keuangan Khusus untuk Kabupaten Indragiri Hilir sebesar Rp.17.028.000.000,-

Proyeksi belanja untuk perubahan RKPD Tahun 2022, memperhatikan dengan seksama proyeksi pendapatan untuk tahun berkenaan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.4.

3.2.3. Perubahan Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Kebijakan penerimaan pembiayaan terkait dengan kebijakan pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman. Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, antisipasi dilakukan dengan kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah. Sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, antisipasi dilakukan dengan kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal. Dari Tabel 3.5. pada perubahan RKPD Tahun 2022, diproyeksi Penerimaan Pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya sebesar Rp. 214.936.333.766, turun sebesar Rp. 109.051.089.763 atau sebesar 34 dari proyeksi sebesar Rp.324.007.423.531 sedangkan Pengeluaran Pembiayaan tidak dialokasikan karena Perda Penyertaan Modal sudah berakhir.

Tabel 3.5
Target Pembiayaan Daerah pada Perubahan APBD Tahun 2022

Kode	Uraian	APBD Nomm 2022	APBD Nomm 2022	Perubahan APBD 2022	Sementara/ (Berkurang)	%
6	PEMBAYARAN					
06.01	PEMBAYARAN PEMBIAYAAN	226.007.428.591	222.000.000.000	224.084.228.764	(2.023.198.765)	(24)
06.01.01	Salah Lebih Rekening Anggaran Tahun Berikutnya	226.007.428.591	222.000.000.000	224.084.228.764	(2.023.198.765)	(90)
	Jumlah Pembiayaan Pembiayaan	226.007.428.591	222.000.000.000	224.084.228.764	(2.023.198.765)	(90)
06.02	PEMBELANJARAN PEMBIAYAAN	-	-	-	-	-
06.02.01	Penyertaan Modal Daerah	-	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-
	Pembiayaan Neto	226.007.428.591	222.000.000.000	224.084.228.764	(2.023.198.765)	(90)
	Salah Lebih Rekening Anggaran Daerah Tahun Berikutnya	-	-	-	-	-

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 (direvisi) dan Hasil Penyajian

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Indragiri Mulk berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Indragiri Mulk tahun lalu, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioritas kegiatannya, juga memperhatikan apa yang diusulkan oleh Perangkat Daerah berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya.

Metodologi yang digunakan dalam penyusunan prioritas memperhatikan beberapa kriteria, antara lain: (1) Korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti terhadap SDGs, Standar Pelayanan Minimal (SPM), pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja; (2) Korelasinya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD; (3) Korelasinya terhadap pengembangan sektor/ bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah; dan (4) Korelasinya terhadap isu strategis daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019, Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018 - 2023 adalah:

"KEJAYAAN INHIL YANG SEMAKIN MAJU, BERMARWAH DAN BERMARTABAT"

Berdasarkan visi tersebut, untuk memperjelas misi, tujuan dan sasaran yang akan diwujudkan, maka diberikan penjelasan sebagai berikut:

- KEJAYAAN INHIL artinya menciptakan kondisi atau keadaan yang mantap, mapan, lebih menguntungkan, lebih berkemaslahatan, lebih membahagiakan dan semakin bermakna positif bagi seluruh warga Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau seraya senantiasa mengharapakan ridho dan lindungan Tuhan Yang Maha Esa.
- Semakin Maju berarti Melanjutkan pembangunan yang NYATA HASILNYA DAN BENAR-BENAR DIRASAKAN MANFAATNYA baik dalam pembangunan infrastruktur dasar, sarana prasarana, pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi daerah dan perbaikan kesejahteraan rakyat yang semakin lebih baik, lebih merata dan berkeadilan, di daerah perdesaan maupun di daerah perkotaan, di desa ataupun kelurahan dan meliputi seluruh wilayah kabupaten, sehingga tercapai pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir yang lebih berdaya saing positif dan makin diperhitungkan sebagai salah satu barometer pembangunan daerah kabupaten di Indonesia.
- Bermarwah pengertiannya Pemimpin dan rakyat Indragiri Hilir terus BERGERAK BERSAMA, pemerintahannya menjunjung amanah membangun

negari, rakyatnya berpartisipasi membela dan berkarya untuk negeri, bersama-sama dengan SPIRIT yang terus bergelora, BERKARYA NYATA UNTUK BERJAYA dan saling jaga menjaga kebanggaan positif pada daerahnya Kabupaten Indragiri Hilir tercinta.

- Bermartabat artinya Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang manusiawi dan berkeadilan sosial yang ditujukan untuk sebesar-besarnya kepentingan dan kemaslahatan rakyat Indragiri Hilir, pelayanan publik yang responsif, berdemokrasi secara sehat tidak ada diskriminasi, rakyatnya hidup rukun, tentram dan berbahagia dalam ridho dan lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.

Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Dengan kata lain, Misi adalah rumusan mengenai apa-apa yang diyakini dapat dilakukan.

Alur pemikiran dalam penyusunan misi tersebut berdasarkan isu strategis mengenai permasalahan yang berkaitan dengan fenomena paling aktual atau yang belum dapat diselesaikan pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya serta memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, dengan memperhitungkan segala peluang yang dimiliki. Rumusan misi dalam rancangan dokumen RPJMD ini merupakan hasil telaahan dan analisis terhadap visi pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun Misi Kabupaten Indragiri Hilir dirumuskan sebagai berikut:

- Misi 1 : Memantapkan tata kelola pemerintahan yang makin responsif, partisipatif, inovatif, efektif dan berketataan hukum.
- Misi 2 : Memantapkan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah.
- Misi 3 : Melanjutkan optimalisasi pengelolaan SDA dan lingkungan secara berkelanjutan sesuai potensi dan kondisi setempat.
- Misi 4 : Memantapkan Pembangunan SDM Yang Semakin Berkualitas Dan Berdaya Saing, Serta Meningkatkan Iman Dan Taqwa.
- Misi 5 : Meningkatkan partisipasi sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.
- Misi 6 : Memantapkan kerukunan, keamanan, ketertiban dan ketentraman kehidupan sosial.
- Misi 7 : Melanjutkan penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran.
- Misi 8 : Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah.

4.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan pada misi yang akan dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir untuk tahun 2022.

Mengacu pada pemikiran tersebut maka dalam penyusunan tema pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2022 di samping mengacu pada visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023, juga mengacu pada tema SKPD Provinsi Riau Tahun 2022 dan RKP Nasional Tahun 2022. Visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan (RPJMD) merupakan perjabaran visi dan misi Bupati dan wakil Bupati Indragiri Hilir terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan daerah. Pernyataan visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan Kabupaten Indragiri Hilir sesuai dengan visi dan misi Bupati dan wakil Bupati Indragiri Hilir yang telah disampaikan dalam masa kampanye. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir.

Adapun tujuan dan sasaran tahun keempat (2022) dapat kami sajikan pada Tabel 4.1. berikut ini :

T-2-149

Tanjung, Samsun, Strategi dan Aspek Kebijakan RPAID 2013-2015

NO	TUJUAN	KASUS/KI	UMUMNYA Keuangan Publik	KETERANGAN	SPESIFIKASI	KELOMPOK/KELOMPOK
Modul 3: Manajemen keuangan publik pemerintah yang lebih responsif, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan berkeadilan						
1.1	Menjelaskan pentingnya reformasi keuangan pemerintah daerah	Manajemen Keuangan Akuntansi Keuangan Pengelolaan Pemerintahan Daerah	Indeks Belanja Rasio LTRD Rasio LTRD Rasio LTRD Rasio LTRD	Indeks Fiskal Fiskal Fiskal Fiskal	Pengelolaan Keuangan Pengelolaan Pemerintahan Daerah	- Menjelaskan Indeks Belanja - Menjelaskan Indeks Belanja - Menjelaskan Indeks Belanja - Menjelaskan Indeks Belanja - Menjelaskan Indeks Belanja
1.2	Menjelaskan Indeks Belanja	Manajemen Keuangan Akuntansi Keuangan Pengelolaan Pemerintahan Daerah	Indeks Belanja Rasio LTRD Rasio LTRD Rasio LTRD Rasio LTRD	Indeks Fiskal Fiskal Fiskal Fiskal	Pengelolaan Keuangan Pengelolaan Pemerintahan Daerah	- Menjelaskan Indeks Belanja - Menjelaskan Indeks Belanja - Menjelaskan Indeks Belanja - Menjelaskan Indeks Belanja - Menjelaskan Indeks Belanja
Modul 4: Manajemen keuangan publik pemerintah yang lebih responsif, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan berkeadilan						
1.1	Menjelaskan Indeks Belanja	Manajemen Keuangan Akuntansi Keuangan Pengelolaan Pemerintahan Daerah	Indeks Belanja Rasio LTRD Rasio LTRD Rasio LTRD Rasio LTRD	Indeks Fiskal Fiskal Fiskal Fiskal	Pengelolaan Keuangan Pengelolaan Pemerintahan Daerah	- Menjelaskan Indeks Belanja - Menjelaskan Indeks Belanja - Menjelaskan Indeks Belanja - Menjelaskan Indeks Belanja - Menjelaskan Indeks Belanja

NO	TUGAS	KARAKTER	INDIKATOR Penguasaan/keahlian	KETERANGAN	SPESIFIKASI	URAIAN KEMERDEKAAN
		Mengungkapkan kesulitan pelayanan informasi/data perusahaan	Penerapan rumus tengah yang memiliki data termasuk layanan sumber air bersih (N)	Penerapan	Penerapan rumus tengah yang memiliki data termasuk layanan sumber air bersih	- Mengungkapkan kesulitan pelayanan dan perusahaan
			Penerapan rumus tengah yang memiliki data termasuk layanan sumber daya (N)	Penerapan	Penerapan rumus tengah yang memiliki data termasuk layanan sumber daya	- Mengungkapkan pelayanan informasi/data dan kebutuhan masyarakat
		Mengungkapkan informasi pelayanan umum	Penerapan/penggunaan informasi (N)	Penerapan	Penerapan informasi/penggunaan umum	- Mengungkapkan kesulitan informasi/data masyarakat
		Mengungkapkan pelayanan lingkungan	Penerapan/penggunaan umum/layanan melalui masalah/damage/berbagai per tahun (N)	Penerapan	Penerapan pelayanan umum/layanan	- Mengetahui informasi pelayanan umum/layanan melalui masalah/damage
10.11 Mengungkapkan optimalisasi penggalan dana dan lingkungan sesuai kebutuhan/kegiatan umum pribadi dan kondisi setempat						
1.1	Mengungkapkan penggalan sumber daya alam		Penerapan rumus penggalan sumber daya alam (N)	Penerapan		
	Mengungkapkan penggalan data atau informasi		Kontribusi Sektor Pertanian, Perikanan, dan Perikanan melalui PDB (N)	Penerapan	Penerapan kontribusi/penggalan data atau sumber hasil pertanian dan perikanan	- Mengungkapkan informasi/penggunaan data penggalan dan sumber daya sumber perikanan dan pertanian
1.2	Mengungkapkan penggalan sumber daya alam yang bervariasi lingkungan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Penerapan		

NO	TUGAS	BAHAN	INSTRUMEN Penilaian/Indikator	KELAS	WAKTU	URAIAN/REVISI
		Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	a. Indeks Kualitas Udara b. Indeks Kualitas Air c. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	Mengapa indikator lingkungan pembangunan dengan tetap menjaga indeks kualitas lingkungan hidup	- Meningkatkan kualitas dan penyediaan air serta kualitas udara - Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
Modul 5. Meningkatkan pertumbuhan BRT yang memiliki keberagaman dan keadilan yang adil meningkatkan secara signifikan						
1.1	Meningkatkan kualitas SGM layanan yang memiliki standar tinggi	Meningkatkan kualitas Pendidikan	Indeks Peningkatan Literasi (PIL)	Indeks		- Peningkatan kualitas dan indeks, manajemen pendidikan - Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan - Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan
	Meningkatkan akses layanan masyarakat	Angka Harapan Hidup		Tahun	Meningkatkan kualitas dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	- Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan akses - Peningkatan dan pemerataan penyediaan layanan - Standar mutu pelayanan kesehatan - Pengendalian dan pengawasan produksi dan layanan dan produksi layanan yang layak
	Meningkatkan daya beli masyarakat	Pengeluaran per kapita		(Ribu Rupiah)	Meningkatkan pendapatan masyarakat terutama masyarakat miskin	- Meningkatkan Tolong menolong - Meningkatkan layanan rumah tangga dengan mendorong usaha kecil, usaha menengah, usaha

NO	TUJUAN	KARAKTER	INDIKATOR (kegiatan/kebiasaan)	KETERANGAN	SPESIFIKASI	URAIAN/REVISI/REVISI
						menyebutkan dan menjelaskan - Perencanaan dan pelaksanaan
Materi 5: Mengetahui pengertian awal dan perkembangan masyarakat dalam pembangunan						
1.1	Mengetahui Pengertian awal masyarakat dalam pembangunan dan masyarakat	Mengetahui pengertian masyarakat masyarakat dalam pembangunan	Indeks Masyarakat awal Sifat-sifat Masyarakat Masyarakat (M)	Indeks	Mengetahui pengertian masyarakat masyarakat	- Pengertian masyarakat dalam pembangunan dan masyarakat
1.2	Mengetahui Perkembangan masyarakat dalam pembangunan	Mengetahui perkembangan masyarakat dalam pembangunan masyarakat	Mengetahui Perkembangan Masyarakat Sifat-sifat Masyarakat Masyarakat	Indeks	Mengetahui perkembangan masyarakat dalam pembangunan dan masyarakat	- Masyarakat dalam pembangunan dan masyarakat
		Mengetahui perkembangan dan pengertian masyarakat dalam pembangunan	Indeks Perkembangan Masyarakat (M)	Indeks	Mengetahui perkembangan masyarakat dalam pembangunan	- Masyarakat dalam pembangunan dan masyarakat
Materi 6: Mengetahui definisi, konsep, sifat-sifat dan karakteristik masyarakat						
1.1	Mengetahui definisi, konsep dan sifat-sifat masyarakat	Mengetahui definisi, konsep dan sifat-sifat masyarakat	Indeks Masyarakat, Sifat-sifat Masyarakat (M)	Indeks	Mengetahui definisi, konsep dan sifat-sifat masyarakat	- Masyarakat dalam pembangunan dan masyarakat
		Mengetahui definisi, konsep dan sifat-sifat masyarakat	Indeks Masyarakat, Sifat-sifat Masyarakat (M)	Indeks	Mengetahui definisi, konsep dan sifat-sifat masyarakat	- Masyarakat dalam pembangunan dan masyarakat

NO	TUJUAN	INDIKATOR	KELOMPOK	SPESIFIKASI	URAIAN KEMAMPUAN
					berorganisasi, penyelesaian, dan analisis konflik serta sistem dasar pengorganisasian bersama
	Memahami perkembangan sejarah organisasi dan masyarakat	Penemuan Pergerakan baru Indonesia terhadap perempuan dan anak (R)	Desain	- Memahami Peran keluarga dan Gerakan Gender - Peran dan hak anak dan perempuan dalam berkolaborasi	- Memahami sejarah keluarga serta peran dan Pergerakan Perempuan dan anak - Pergerakan sejarah gerakan keluarga bagi berkolaborasi terhadap perempuan dan anak
Modul 3: Mengetahui perempuan sebagai katalisator dan penggerak					
1.1	Mengetahui kemampuan masyarakat	Memahami tingkat literasi	Perempuan Pendidikan Madia	R	Memahami Pergerakan perempuan
	Memahami tingkat pengorganisasian	Desain Pengorganisasian keluarga (PP)	R	Memahami Pergerakan Perempuan dan Keluarga Usaha	- Memahami Pendidikan dasar bagi Masyarakat Madia dan/atau Pendidikan PPP/PP/PP - Pergerakan Perempuan Perempuan dan/atau Pendidikan PPP/PP/PP - Memahami Kapasitas dan Pergerakan Perempuan Perempuan - Memahami keluarga/layanan keluarga sebagai sumber daya
Modul 4: Mengetahui perkembangan dan daya yang akan datang					
1.1	Mengetahui perkembangan ekonomi dan daya	Agenda Pergerakan Perempuan	Desain		

[illegible]

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022

4.2.1. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2022

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2022, ditetapkan arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2022 adalah “Pemulihan Ekonomi Dan Reformasi Struktural” melalui pemulihan daya beli dan usaha, diversifikasi ekonomi yang didukung dengan reformasi iklim investasi, reformasi kelembagaan, serta reformasi peningkatan kualitas SDM dan perlindungan sosial.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2022 selanjutnya dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas Dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;

- Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
- Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
- Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Sasaran pembangunan tahun 2022 adalah: (1) percepatan pemulihan ekonomi dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca; (2) peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia dan (b) tingkat kemiskinan. Selain itu, indikator pembangunan tahun 2022 juga menitikberatkan pada indikator nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan. Target sasaran dan indikator pembangunan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,4 – 6,0;
- Tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5 – 9,8 persen;
- Tingkat pengangguran terbuka pada kisaran 5,5 – 6,2 persen;
- Rasio Gini pada angka 0,376 – 0,378 (Nilai);
- Indeks Pembangunan Manusia menjadi 73,44 – 73,48;
- Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 26,8 0 27,1 persen;
- Nilai Tukar Petani/NTP sebesar 102 – 104 ; dan
- Nilai Tukar Nelayan/NTN sebesar 102 -105.

4.2.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2022

Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam penetapan arah pembangunan daerah hendaknya selaras dengan arah pembangunan nasional. Hal ini perlu dilakukan agar berbagai kebijakan pembangunan daerah memiliki *link and match* dengan pembangunan nasional. Mengacu pada pemikiran tersebut maka dalam penyusunan Tema pembangunan Provinsi Riau tahun 2022 di samping mengacu pada Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau 2005-2025 dan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau 2019-2024, juga mengacu pada tema RKP Nasional Tahun 2022, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau tahun 2022 sesuai dengan tema yaitu “Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Berbasis Industri, Pertanian Dan Pariwisata Dengan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima”.

4.2.3. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022

Sejalan dengan Tema RKP Tahun 2022 dan RKPD Provinsi Riau Tahun 2022, maka Tema RKPD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2022 adalah “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Menuju Pemanjatan Kemajuan Martabat dan Marwah Indragiri Hilir”. Sasaran dan target yang akan dicapai pada tahun 2022 antara lain : pertumbuhan ekonomi diproyeksikan sebesar 4,9%, tingkat kemiskinan diproyeksikan sebesar 4,97%, IPM diproyeksikan sebesar 67,92, Gini ratio diproyeksikan sebesar 0,32 dan tingkat pengangguran terbuka diproyeksikan sebesar 5,84%.

Isu strategis di Kabupaten Indragiri Hilir dengan permasalahan pembangunan yang paling prioritas untuk diselesaikan maupun isu dari dunia internasional, nasional maupun regional, sebagai berikut:

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.

Penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir terus ditingkatkan mengingat besarnya afikasi dan atensi baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Disamping itu, keberhasilan program Bupati dan pembangunan daerah pada level teknis sangat bergantung pada kinerja aparatur dan kualitas penyelenggaraan pemerintah tersebut. Oleh karena itu, perwujudan tata pemerintahan yang baik akan terus ditingkatkan.

2. Pemantapan pemerataan pembangunan.

Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Indragiri Hilir belum sepenuhnya terpenuhi secara optimal baik kuantitas maupun kualitasnya. Panjang jalan dan jembatan serta infrastruktur perhubungan masih perlu ditingkatkan kualitasnya. Selain itu sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi, serta perumahan perlu penanganan yang lebih baik lagi. hal ini dalam rangka mengakomodir penyediaan pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan, serta infrastruktur dasar lainnya di Kabupaten Indragiri Hilir.

3. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah.

Pertumbuhan ekonomi sampai saat ini masih menjadi parameter pembangunan suatu wilayah. Sarana dan prasarana penunjang produktivitas pertanian masih belum efektif, hal ini berbanding lurus dengan pemasaran produksi pertanian yang juga masih belum optimal. luas perkebunan kelapa

di Kabupaten Indragiri Hilir adalah yang terluas di Indonesia, namun belum mampu mengangkat perekonomian masyarakat dengan berbagai permasalahan yang dihadapi salah satunya adalah harga kelapa yang cenderung rendah. Kondisi-kondisi tersebut memaksa pemerintah untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkelanjutan, serta berbasis potensi sumberdaya alam dan kearifan lokal.

4. Menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran.

Akses pelayanan sosial dasar bagi PMKS di Kabupaten Indragiri Hilir masih terbilang lambat. Kondisi-kondisi tersebut mengisyaratkan bahwa, pelayanan kebutuhan dasar lain seperti PMKS serta penguatan kearifan lokal melalui modal sosial dan akses lapangan pekerjaan perlu ditingkatkan.

5. Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan berdaya saing.

Akses masyarakat terhadap pelayanan dasar dapat didefinisikan melalui perspektif jarak maupun keterjangkauan layanan. Kabupaten Indragiri Hilir sampai pada tahun 2017 teridentifikasi bahwa beberapa layanan pendidikan dan kesehatan belum sepenuhnya terpenuhi dengan optimal Seperti layanan PAUD dan akses pendidikan 12 tahun yang belum mampu tercapai secara optimal. Kondisi ini dapat merupakan bagian dari efek domino berbagai aspek seperti misalnya aspek fisik seperti infrastruktur, sarana dan prasarana maupun non-fisik seperti sosial, budaya maupun kapasitas finansial.

6. Pemantapan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

Pelayanan kesehatan dasar yang masih belum mampu terjangkau oleh keseluruhan masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir khususnya daerah

perdesaan dan infrastruktur kesehatan seperti rumah sakit masih belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir.

7. Pengelolaan potensi sumberdaya alam lebih produktif dan berwawasan lingkungan.

Kabupaten Indragiri Hilir memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar khususnya perkebunan dan pangan serta perikanan untuk mendorong pengembangan potensi ekonomi dan menciptakan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir. Produksi Perikanan, hasil perkebunan kelapa sawit, kelapa dan tanaman kelapa ini perlu didukung dengan industri hilir sehingga nilai tambah dapat diperoleh oleh Kabupaten Kabupaten Hilir.

Indragiri Hilir mempunyai beberapa tempat wisata yang cukup menarik untuk dikunjungi seperti (i) agrowisata yang berupa hamparan ladang padi dan kelapa, (ii) Bukit bunga indragiri Hilir, (iii) Pantai Selop, (iv) Air Terjun Tembulan Rusa dan (v) Makam Syek Abdurrahman Siddiq Al Banjari. namun secara umum, pariwisata di Indragiri Hilir relatif belum berkembang, dimana objek-objek wisata yang ada belum dikelola dengan baik dan dilengkapi sarana-prasarana yang memadai.

8. Mewujudkan kerukunan, ketentraman dan ketertiban.

Upaya meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat masih dihadapkan pada berbagai persoalan seperti banyaknya berbagai masalah sosial (kemiskinan dan pengangguran), disiplin dan kesadaran masyarakat serta penegakan aturan. Tantangan yang akan dihadapi ke depan yaitu

meningkatkan profesionalisme aparat, optimalisasi fungsi institusi-institusi di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta menumbuhkan kesadaran masyarakat.

9. Peningkatan pembangunan sosial ekonomi pedesaan melalui Program DMII Plus Terintegrasi

Pada periode sebelumnya Pemerintah kabupaten Indragiri Hilir meluncurkan Program yang bernama Desa Maju Indragiri Hilir Jaya. Pada perkembangannya, dengan melihat progres positif yang telah dicapai oleh Desa terutama pada program pembangunan fisik dan kegiatan sosial dan keagamaan lainnya, maka dinilai perlu untuk menambah serta mengevaluasi apa saja yang bisa menjadi nilai tambah dari program ini maka diluncurkanlah yang disebut dengan Program DMII Plus Terintegrasi.

Program ini sebagai wadah bagi seluruh Stakeholder untuk memberikan perhatiannya ke Desa dan Kelurahan. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir fokus pada peningkatan ekonomi masyarakat Desa dengan menjadikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai porosnya. Setelah rampung pada pembangunan infrastruktur, membuka akses Desa untuk jalannya perekonomian Desa maka Desa diminta untuk mampu mengelola serta mengontrol potensi lokal Desa sehingga memiliki nilai ekonomis.

Desa diharapkan menjadi pilar kuat Daerah dimana Desa memiliki sumber PADes sendiri dan pengelolaannya secara efektif dan efisien dengan SDM yang berkualitas.

Dalam rangka kebijakan terkait penanganan dan pemulihan sosial ekonomi akibat pandemi COVID-19 untuk tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dan dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan Tahun 2022 dan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, maka Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 diarahkan pada:

1. Peningkatan pelayanan dasar sarana prasarana kesehatan dan pendidikan;
2. Peningkatan kesiapsiagaan bencana dengan memperhatikan segala aspek mitigasi bencana baik bencana alam maupun non alam;
3. Peningkatan ketahanan pangan, baik peningkatan produksi dalam rangka swasembada dan memperlancar akses pasar terhadap pangan;
4. Pemulihan Produktivitas Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (SIKIM);
5. Pemulihan usaha ekonomi kreatif terutama di sektor UMKM dan IKM yang terdampak;
6. Pembangunan infrastruktur yang mendukung pemulihan ekonomi sektor industri dan penguatan kesehatan masyarakat;
7. Pemulihan perekonomian masyarakat terdampak diantaranya pada sektor ketenagakerjaan dan daya beli masyarakat;
8. Fokus pada upaya penanganan masalah sosial dan kemiskinan yang diantaranya sebagai dampak dari pandemi Covid-19;

9. Fokus pada upaya kesehatan masyarakat dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
10. Memenuhi alokasi persentase belanja sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yaitu 20% untuk fungsi pendidikan dan 10% untuk fungsi kesehatan.

Adapun Arah Penanganan Covid-19 Di Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut:

1. Pemulihan Ekonomi
 - a. Pembangunan infrastruktur, aksesibilitas & konektivitas kawasan sentra pertumbuhan ekonomi;
 - b. Pembangunan & perbaikan fasilitas layanan sektor tertentu dengan karakteristik penciptaan lapangan kerja;
 - c. Perbaikan sistem pelayanan investasi daerah.
2. Peningkatan Belanja Infrastruktur Daerah
 - a. Pemanfaatan creative financing, seperti pinjaman daerah, penerbitan Obligasi Daerah dan/ atau Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU).
 - b. Pembangunan infrastruktur melalui mekanisme kerja sama antar Daerah.
 - c. Dukungan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (KDD) untuk pelaksanaan creative financing melalui skema pendanaan terintegrasi (integrated funding).
3. Peningkatan kemampuan pelayanan RS dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

Adapun Program dan Kegiatan yang mendukung Program Prioritas tahun 2022, dapat dilihat pada tabel 4.2. berikut :

Tabel 4.2.

Program dan Kegiatan yang mendukung Program Prioritas Tahun 2022

Prioritas Pembangunan Kabupaten	Program
Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Program Pemurjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	Program Pendaftaran Penduduk
	Program Pencatatan Sipil
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
	Program Informasi Dan Komunikasi Publik
	Program Aplikasi Informatika
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
	Program Promosi Penanaman Modal
	Program Pelayanan Penanaman Modal
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
	Program Pembinaan Perpustakaan
	Program Pengelolaan Arsip
	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
	Program Perekonomian Dan Pembangunan
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd
	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
	Program Kepegawaian Daerah

	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Program Penyelenggaraan Pengawasan
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Kebersihan Umum
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
Peningkatan kualitas SDM yang berkinerja dan berdaya saing	Program Pengelolaan Pendidikan
	Program Pengembangan Kuliahum
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
	Program Pemasaran Pariwisata
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
	Program Pengembangan Kebudayaan
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional
	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
	Program Perlindungan Perempuan
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
	Program Perlindungan Khusus Anak
	Program Pengendalian Penduduk
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
Pemantapan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

	Mamusta Kesehatan
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
Pemantapan pemerataan pem- bangunan.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
	Program Penataan Bangunan Gedung
	Program Penyelenggaraan Jalan
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
	Program Pengembangan Perumahan
	Program Kawasan Permukiman
	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
	Program Pengelolaan Pelayaran
Mewujudkan kerukunan, ketenteraman dan ketertiban	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
	Program Penanggulangan Bencana
	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kehangsaan
	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
Menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran	Program Pemberdayaan Sosial
	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
	Program Rehabilitasi Sosial
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
	Program Penanganan Bencana
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
	Program Penempatan Tenaga Kerja
	Program Hubungan Industrial
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Pengelolaan potensi sumber-daya alam lebih produktif dan berwawasan lingkungan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
	Program Penanganan Kerawanan Pangan
	Program Pengawasan Keamanan Pangan
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
	Program Pengelolaan Sampah
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
	Program Perisahan Usaha Pertanian
	Program Penyuluhan Pertanian
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
Peningkatan pembangunan sosial ekonomi pedesaan melalui Program DMJ Plus Terintegrasi	Program Penataan Desa
	Program Peningkatan Kerjasama Desa
	Program Administrasi Pemerintahan Desa

	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Mukim Adat
Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Program Pelayanan Isin Usaha Simpan Pinjam
	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
	Program Pemilaian Kesehatan KSP / USP Koperasi
	Program Pendidikan Dan Latihan Penkoperasian
	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
	Program Pengembangan UMKM
	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
	Program Pengembangan Ekspor
	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
	Program Pengendalian Isin Usaha Industri Kabupaten/Kota
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Dalam rangka mengatasi permasalahan di Kabupaten Indragiri Hilir, melalui pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Indragiri Hilir yang diperoleh dari hasil reses para anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, dapat dibagi pada beberapa Urusan, sebagaimana tabel 4.3. berikut :

Tabel : 4.3.

Urusan Pemerintahan dengan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Kabupaten Indragiri Hilir

URUSAN	PERMASALAHAN
1. PENDIDIKAN	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelayanan Pendidikan yang Belum Sesuai dengan Kebutuhan

URUSAN	PERMASALAHAN
	• Kurangnya Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan • Terbatasnya bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat kurang mampu untuk pendidikan SL • Kurangnya Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan
2. KESEHATAN	• Jumlah Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan yang Belum Sesuai dengan Kebutuhan • Kurangnya Penyediaan Layanan Ambulance untuk Evakuasi Warga yang Sakit • Minimnya Pengetahuan Kader Posyandu • Perlunya Peningkatan Pengetahuan dan kesadaran Pola Hidup Sehat bagi Masyarakat • Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan Immunisasi dasar dan lanjutan bagi masyarakat
3. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	• Kondisi Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang Masih Kurang dan Rusak • Rendahnya Ketersediaan Air Bersih • Jumlah Sarana dan Prasarana Pemertintah yang Belum Sesuai dengan Kebutuhan • Kurangnya Infrastruktur Drainase yang Memadat • Perlunya Penanggulangan Longsor Tanah di Sekitar Jalan, Tebing dan Sungai • Terjadinya Pendangkalan dan Penyempitan Badan Sungai • Perlunya Peningkatan Akses Jalan di Daerah Rawa/Sungai • Perlunya Penyediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum Bagi Masyarakat
4. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKMAN	• Rendahnya Tingkat Kepemilikan Rumah Layak Huni • Kondisi Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Lingkungan Permukiman yang Kurang Memadat dan Rusak
5. LINGKUNGAN HIDUP	• Terbatasnya Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan • Masih Terdapatnya Kerusakan Lingkungan Hidup

URUSAN	PERMASALAHAN
6. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dukungan SDM untuk Transhum.
7. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Terbatasnya Sarana dan Prasarana Insansi Vertikal
8. SOSIAL	- Masih Tingginya Tingkat Kemiskinan - Kurangnya Kemampuan Yayasan Untuk Memenuhi Kebutuhan Operasional - Meningkatnya Permasalahan Sosial di Lingkungan Masyarakat - Kurangnya Sarana dan Prasarana Panti
9. KETENAGAKERJAAN	- Masih Tingginya Tingkat Pengangguran - Kurangnya Sarana Prasarana Pendidikan dan Keterampilan Bagi Tenaga Kerja
10. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Terbatasnya sarana dan prasarana kependudukan.
11. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Kurangnya Pemahaman Masyarakat Desa terhadap Pengelolaan BUMDes dan Pengelolaan Keuangan Desa
12. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	- Tingginya Tingkat Ketimpangan Gender - Perluanya Peningkatan Kapasitas Ibu-Ibu Rumah Tangga
13. PERHUBUNGAN	Masih Terbatasnya Infrastruktur Perhubungan
14. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Rendahnya Nilai Keterbukaan Informasi Publik
15. KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	- Perluanya Bantuan Permodalan Usaha Bagi Masyarakat - Mintanya Pengembangan UMKM
16. PERPUSTAKAAN	Kurangnya Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Budaya Membaca
17. KEARSIPAN	Kurangnya Pemahaman Masyarakat tentang Pentingnya Arsip
18. KELAUTAN DAN PERIKANAN	- Masih Rendahnya Produksi Perikanan - Kurangnya Penguatan dan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil - Kurangnya Sarana dan Prasarana Perikanan - Kurangnya Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan - Kurangnya Sarana dan Prasarana Penerapan Mutu Hasil Perikanan - Kurangnya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan

URUSAN	PERMASALAHAN
19. PARAWISATA	- Kurangnya Pengetahuan Masyarakat tentang Kepariwisata - Kurangnya Event Kepariwisata - Kurangnya Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagai Penggerak Industri Pariwisata
20. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	- Masih Terbatasnya Sarana dan Prasarana Olahraga - Perluaya Pelaksanaan Event Olahraga - Kurangnya Pengembangan Pemuda dalam kewirausahaan - Perluaya penupukan semangat kepemudaan
21. KEBUDAYAAN	- Belum Optimalnya Pelestarian Nilai-nilai Budaya - Masih Kurangnya Sarana dan Prasarana Kebudayaan
22. PERTANIAN	- Masih Rendahnya Produk Pertanian, Peternakan dan Perkebunan - Kurangnya Pendampingan Untuk Meningkatkan Pengetahuan Penumbuhkembangkan Usaha Tani - Kurangnya Teknologi Alat Pengolah Hasil Pertanian Pasca Panen - Kurangnya Penyediaan Bibit dan Sarana Prasarana Peningkatan Produk Pertanian, Peternakan dan Perkebunan - Kurangnya Penyediaan Bibit Pertanian, Peternakan dan Perkebunan untuk Peningkatan Produk Pertanian, Peternakan dan Perkebunan - Belum tersedia pengaturan air di lahan pertanian dan perkebunan - Kurangnya Sarana Prasarana Pertanian, Peternakan dan Perkebunan - Mintunya Sarana Prasarana Perburuan Pertanian - Kurangnya Penyediaan Neraca Bahan Makanan dan Informasi Harga Pangan
23. PERDAGANGAN	Mintunya Sarana dan Prasarana Perdagangan
24. PERINDUSTRIAN	Kurangnya Usaha Industri Kecil dan Menengah / Home Industries
25. KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Terbatasnya SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural maupun fungsional
26. PENANGGULANGAN BENCANA	Mintunya Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana
27. KEPALA DAERAH	Perluaya Penyediaan dan Peningkatan

URUSAN	PERMASALAHAN
	Sarana dan Prasarana Rumah Sederah yang Memadai Kurangnya Sarana Prasarana Pendidikan Keagamaan
28. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Peningkatan Kapasitas Desran
29. KECAMATAN	Mintanya SDM Kecamatan

Tabel : 4.4

Prioritas Pembangunan dengan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Kabupaten Indragiri Hilir

PRIORITAS PEMBANGUNAN	PERMASALAHAN POKOK-POKOK PIKIRAN
Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Baik	Peningkatan Kapasitas Desran
Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Baik	Perlunya Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sederah yang Memadai
Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Baik	Kurangnya Sarana Prasarana Pendidikan Keagamaan
Menwujudkan Kerukunan Keintiman Dan Keartiban	Dukungan SDM untuk Transibum
Peningkatan Pembangunan Sosial Ekonomi Pedesaan Melalui Program Desy Plus Terintegrasi	Mintanya SDM Kecamatan
Menurunkan Tingkat Kemiskinan Dan Pengangguran	Masih Tingginya Tingkat Kemiskinan
Menurunkan Tingkat Kemiskinan Dan Pengangguran	Kurangnya Kemampuan Yayasan Untuk Memenuhi Kebutuhan Operasional
Menurunkan Tingkat Kemiskinan Dan Pengangguran	Meningkatnya Permasalahan Sosial di Lingkungan Masyarakat
Menurunkan Tingkat Kemiskinan Dan Pengangguran	Kurangnya Sarana dan Prasarana Parti
Menurunkan Tingkat Kemiskinan Dan Pengangguran	Masih Tingginya Tingkat Pengangguran
Pemerataan Pemerataan Pembangunan	Rendahnya Tingkat Kepemilikan Rumah Layak Huni
Pemerataan Pemerataan Pembangunan	Kondisi Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Lingkungan Permukiman yang Kurang

	Mamada dan Rusak
Peningkatan Kualitas Sdm Yang Bertiman Dan Berdaya Saing	- Kurangnya Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Budaya Membaca
Peningkatan Kualitas Sdm Yang Bertiman Dan Berdaya Saing	- Kurangnya Pemahaman Masyarakat tentang Pentingnya Asip
Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Lebih Produktif Dan Berwawasan Lingkungan	- Masih Rendahnya Produksi Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Lebih Produktif Dan Berwawasan Lingkungan	- Kurangnya Pendampingan Untuk Meningkatkan Penguasaan Penumbuhkembangkan Usaha Tani
Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Lebih Produktif Dan Berwawasan Lingkungan	- Kurangnya Teknologi Alat Pengolah Hasil Pertanian Pasca Panen
Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Lebih Produktif Dan Berwawasan Lingkungan	- Kurangnya Penyediaan Bibit dan Sarana Prasarana Peningkatan Produksi Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Lebih Produktif Dan Berwawasan Lingkungan	- Kurangnya Penyediaan Bibit Pertanian, Peternakan dan Perkebunan untuk Peningkatan Produksi Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Lebih Produktif Dan Berwawasan Lingkungan	- Masih Rendahnya Produksi Perikanan
Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Lebih Produktif Dan Berwawasan Lingkungan	- Kurangnya Penguatan dan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Petani dan Pulau-Pulau Kecil
Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Lebih Produktif Dan Berwawasan Lingkungan	- Kurangnya Sarana dan Prasarana Perikanan
Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Lebih Produktif Dan Berwawasan Lingkungan	- Kurangnya Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan
Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Lebih Produktif Dan Berwawasan Lingkungan	- Kurangnya Sarana dan Prasarana Penerapan Mutu Hasil Perikanan
Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Lebih Produktif Dan Berwawasan Lingkungan	- Kurangnya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan
Peningkatan Fungsi Terminal Bandar Laksamana Indragiri Menjadi Terminal Penumpang Dan Barang	- Masih Terbatasnya Infrastruktur Perhubungan

Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Daya Saing Daerah	- Kurangnya Usaha Industri Kecil dan Menengah / Home Industri
Pemertanian Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	- Tingginya Tingkat Ketimpangan Gender
Pemertanian Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	- Perlunya Peningkatan Kapasitas Ibu-Ibu Rumah Tangga
Peningkatan Kualitas Sdm Yang Beriman Dan Berdaya Saing	- Jumlah Sarana dan Prasarana Pelayanan Pendidikan yang Belum Sesuai dengan Kebutuhan
Peningkatan Kualitas Sdm Yang Beriman Dan Berdaya Saing	- Kurangnya Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan
Peningkatan Kualitas Sdm Yang Beriman Dan Berdaya Saing	- Terbatasnya bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat kurang mampu untuk pendidikan SL
Peningkatan Kualitas Sdm Yang Beriman Dan Berdaya Saing	- Kurangnya Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Sman Pendidikan
Pemertanian Pemerataan Pembangunan	- Kondisi Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang Masih Kurang dan Rusak
Pemertanian Pemerataan Pembangunan	- Rendahnya Ketersediaan Air Bersih
Pemertanian Pemerataan Pembangunan	- Jumlah Sarana dan Prasarana Pemerintah yang Belum Sesuai dengan Kebutuhan
Pemertanian Pemerataan Pembangunan	- Kurangnya Infrastruktur Drainase yang Memadai
Pemertanian Pemerataan Pembangunan	- Perlunya Penanggulangan Longsor Tanah di Sekitar Jalan, Tebing dan Sungai
Pemertanian Pemerataan Pembangunan	- Terjadinya Pendangkalan dan Penyempitan Badan Sungai
Pemertanian Pemerataan Pembangunan	- Perlunya Peningkatan Akses Jalan di Daerah Rawan/Sungai
Pemertanian Pemerataan Pembangunan	- Perlunya Penyediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum Bagi Masyarakat
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Daya Saing Daerah	- Kurangnya Pengetahuan Masyarakat tentang Kapasitas
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Daya Saing Daerah	- Kurangnya Event Kapasitas Penunjang Promosi Wisata Daerah
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Daya Saing Daerah	- Kurangnya Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagai Penggerak Industri Pariwisata
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Daya Saing Daerah	- Masih Terbatasnya Sarana dan Prasarana Olahraga
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Daya Saing Daerah	- Perlunya Pelaksanaan Event Olahraga

Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Daya Saing Daerah	- Kurangnya Pengembangan Pemuda dalam kewirausahaan
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Daya Saing Daerah	- Perlunya pemupukan semangat kepemudaan
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Daya Saing Daerah	- Belum Optimalnya Pelaksanaan Nilai-nilai Budaya
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Daya Saing Daerah	- Masih Kurangnya Sarana dan Prasarana Kebudayaan
Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Lebih Produktif Dan Berwawasan Lingkungan	- Terbatasnya Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan
Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Lebih Produktif Dan Berwawasan Lingkungan	- Masih Terdapatnya Kerusakan Lingkungan Hidup
Menurunkan Tingkat Kemiskinan Dan Pengangguran	- Masih Tingginya Tingkat Pengangguran
Menurunkan Tingkat Kemiskinan Dan Pengangguran	- Kurangnya Sarana Prasarana Pendidikan dan Keterampilan bagi Tenaga Kerja
Pemertapan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	- Jumlah Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan yang Belum Sesuai dengan Kebutuhan
Pemertapan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	- Kurangnya Penyediaan Layanan Ambulance untuk Evakuasi Warga yang Sakit
Pemertapan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	- Minimnya Pengetahuan Kader Posyandu
Pemertapan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	- Perlunya Peningkatan Pengetahuan dan kesadaran Pola Hidup Sehat bagi Masyarakat
Pemertapan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	- Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan inisiasi dasar dan lanjutan bagi masyarakat
Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Baik	- Terbatasnya sarana dan prasarana kependudukan
Mewujudkan Kerukunan Kesenetratan Dan Keadilan	- Terbatasnya Sarana dan Prasarana Instansi Vertikal

Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022 Kabupaten Indragiri Hilir, dapat dilihat pada tabel 4.5, berikut :

Tabel 4.5.

Bandingan Antara Sasaran/Indikator Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022

KODE	RESTRUKTURISASI/STRUKTUR/TEMA/PELAYANAN DAERAH			SASARAN STRATEGIS (SASARAN/INDIKATOR/TOPIK/TEMA)	SATUAN	RPJMD 2022		KAMPAK/PELUANG/REVISI 2022
						TARGET	RUANG KEMUNGKINAN (RUMAH KEMUNGKINAN)	
	Tema 1:							
	Kemandirian dan ketahanan masyarakat yang adil, sejahtera, partisipatif, inovatif, toleran dan berkeadilan hukum							
	1.1.	Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat dasar		Indeks Kesehatan Masyarakat (IKM)		3,28		
		1.1.1.	Meningkatkan Akreditasi Rumah Penyelenggaraan Kesehatan Dasar	Nila AKK (Fasilitas)		22		
				Nila UPTD (Nila)		Smart Village		
				Agar 100% dari UPTD (qualitas)		100%		
				Salah satu indikator kinerja		0		
1	1	1	PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN EVALUASI PROGRAM/KELOMPOK DAERAH	Penerapan Rencana Program KEMENDIKBUD	Penera	100	1.280.000	1.440.000
1	1	1	PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN EVALUASI PROGRAM/KELOMPOK DAERAH	Salah satu indikator kinerja	Penera	100	1.170.000	1.280.000

1	2	2			PROGRAM PENGALAMAN DAN PENGEMBANGAN MANAJEMEN	Pemerintah pemerintahan lokal Jalangkagan	Danar	32	1.000.000	180.000
1	3	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KEMAMPUAN DAERAH	Pemerintah Provinsi APWS Tagay-Talito	Danar	108	330.000.000	-
1	3	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KEMAMPUAN DAERAH MANAJEMEN	Pemerintah RPW yang memanggapi laporan dari Tagay-Talito	Danar	100	1.000.000	1.200.000.000
1	4	4			PROGRAM PENGEMBANGAN TINGKATAN DAERAH	Pemerintah TAD melalui pengalangan	Danar	82	1.000.000	1.000.000.000
1	5	5			PROGRAM PENGEMBANGAN PENGALAMAN DAN PENGALAMAN	Pemerintah provinsi APW yang diwakili bagian pengalangan	Danar	100	1.000.000	1.000.000.000
1	6	6			PROGRAM PENGEMBANGAN KEMAMPUAN PENGALAMAN MANAJEMEN	Peta Provinsi dan Tagay-Talito melalui bagian Manajem Tagay-Talito	Pada	14	100.000	100.000.000
1	7	7			PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KEMAMPUAN MANAJEMEN	Pemerintah provinsi melalui bagian Jalangkagan yang Tagay-Talito	Danar	10.00	1.000.000	1.000.000.000
1	8	8			PROGRAM PENGEMBANGAN KEMAMPUAN MANAJEMEN	Pemerintah provinsi melalui bagian Jalangkagan yang Tagay-Talito	Danar	10.00	1.000.000	1.000.000.000
1	9	9			PROGRAM PENGEMBANGAN KEMAMPUAN MANAJEMEN	Pemerintah provinsi melalui bagian Jalangkagan yang Tagay-Talito	Danar	10.00	1.000.000	1.000.000.000
1	10	10			PROGRAM PENGEMBANGAN KEMAMPUAN MANAJEMEN	Pemerintah provinsi melalui bagian Jalangkagan yang Tagay-Talito	Danar	10.00	1.000.000	1.000.000.000
1	11	11			PROGRAM PENGEMBANGAN KEMAMPUAN MANAJEMEN	Pemerintah provinsi melalui bagian Jalangkagan yang Tagay-Talito	Danar	10.00	1.000.000	1.000.000.000
1	12	12			PROGRAM PENGEMBANGAN KEMAMPUAN MANAJEMEN	Pemerintah provinsi melalui bagian Jalangkagan yang Tagay-Talito	Danar	10.00	1.000.000	1.000.000.000
1	13	13			PROGRAM PENGEMBANGAN KEMAMPUAN MANAJEMEN	Pemerintah provinsi melalui bagian Jalangkagan yang Tagay-Talito	Danar	10.00	1.000.000	1.000.000.000
1	14	14			PROGRAM PENGEMBANGAN KEMAMPUAN MANAJEMEN	Pemerintah provinsi melalui bagian Jalangkagan yang Tagay-Talito	Danar	10.00	1.000.000	1.000.000.000
1	15	15			PROGRAM PENGEMBANGAN KEMAMPUAN MANAJEMEN	Pemerintah provinsi melalui bagian Jalangkagan yang Tagay-Talito	Danar	10.00	1.000.000	1.000.000.000
1	16	16			PROGRAM PENGEMBANGAN KEMAMPUAN MANAJEMEN	Pemerintah provinsi melalui bagian Jalangkagan yang Tagay-Talito	Danar	10.00	1.000.000	1.000.000.000
1	17	17			PROGRAM PENGEMBANGAN KEMAMPUAN MANAJEMEN	Pemerintah provinsi melalui bagian Jalangkagan yang Tagay-Talito	Danar	10.00	1.000.000	1.000.000.000
1	18	18			PROGRAM PENGEMBANGAN KEMAMPUAN MANAJEMEN	Pemerintah provinsi melalui bagian Jalangkagan yang Tagay-Talito	Danar	10.00	1.000.000	1.000.000.000
1	19	19			PROGRAM PENGEMBANGAN KEMAMPUAN MANAJEMEN	Pemerintah provinsi melalui bagian Jalangkagan yang Tagay-Talito	Danar	10.00	1.000.000	1.000.000.000
1	20	20			PROGRAM PENGEMBANGAN KEMAMPUAN MANAJEMEN	Pemerintah provinsi melalui bagian Jalangkagan yang Tagay-Talito	Danar	10.00	1.000.000	1.000.000.000
1	21	21			PROGRAM PENGEMBANGAN KEMAMPUAN MANAJEMEN	Pemerintah provinsi melalui bagian Jalangkagan yang Tagay-Talito	Danar	10.00	1.000.000	1.000.000.000
1	22	22			PROGRAM PENGEMBANGAN KEMAMPUAN MANAJEMEN	Pemerintah provinsi melalui bagian Jalangkagan yang Tagay-Talito	Danar	10.00	1.000.000	1.000.000.000
1	23	23			PROGRAM PENGEMBANGAN KEMAMPUAN MANAJEMEN	Pemerintah provinsi melalui bagian Jalangkagan yang Tagay-Talito	Danar	10.00	1.000.000	1.000.000.000
1	24	24			PROGRAM PENGEMBANGAN KEMAMPUAN MANAJEMEN	Pemerintah provinsi melalui bagian Jalangkagan yang Tagay-Talito	Danar	10.00	1.000.000	1.000.000.000
1	25	25			PROGRAM PENGEMBANGAN KEMAMPUAN MANAJEMEN	Pemerintah provinsi melalui bagian Jalangkagan yang Tagay-Talito	Danar	10.00	1.000.000	1.000.000.000
1	26	26			PROGRAM PENGEMBANGAN KEMAMPUAN MANAJEMEN	Pemerintah provinsi melalui bagian Jalangkagan yang Tagay-Talito	Danar	10.00	1.000.000	1.000.000.000
1	27	27			PROGRAM PENGEMBANGAN KEMAMPUAN MANAJEMEN	Pemerintah provinsi melalui bagian Jalangkagan yang Tagay-Talito	Danar	10.00	1.000.000	1.000.000.000
1	28	28			PROGRAM PENGEMBANGAN KEMAMPUAN MANAJEMEN	Pemerintah provinsi melalui bagian Jalangkagan yang Tagay-Talito	Danar	10.00	1.000.000	1.000.000.000
1	29	29			PROGRAM PENGEMBANGAN KEMAMPUAN MANAJEMEN	Pemerintah provinsi melalui bagian Jalangkagan yang Tagay-Talito	Danar	10.00	1.000.000	1.000.000.000
1	30	30			PROGRAM PENGEMBANGAN KEMAMPUAN MANAJEMEN	Pemerintah provinsi melalui bagian Jalangkagan yang Tagay-Talito	Danar	10.00	1.000.000	1.000.000.000
1	31	31			PROGRAM PENGEMBANGAN KEMAMPUAN MANAJEMEN	Pemerintah provinsi melalui bagian Jalangkagan yang Tagay-Talito	Danar	10.00	1.000.000	1.000.000.000
1	32	32			PROGRAM PENGEMBANGAN KEMAMPUAN MANAJEMEN	Pemerintah provinsi melalui bagian Jalangkagan yang Tagay-Talito	Danar	10.00	1.000.000	1.000.000.000

				Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Penguatan Sistem Aparatur Sipil Negara (ASN)		Indeks Kapasitas Masyarakat (Indeks)		2024			
1	1	1			PROSEKSI PENGANTARAN PENGUSAHA	Subsistem Pemukiman Masyarakatan Pemukiman Perkotaan	Pemerintah	10.00	100.00	100.0000	
1	1	2			PROSEKSI PENGANTARAN PENGUSAHA	Subsistem Pemukiman Masyarakatan Pemukiman Desa	Pemerintah	10.00	100.00		
1	1	3			PROSEKSI PENGANTARAN PENGUSAHA	Pemerintah BPR/Perbankan	Pemerintah	10.00	100.00	100.0000	
1	1	4			PROSEKSI PENGANTARAN PENGUSAHA	Indeks Kapasitas Masyarakat (IKM) wilayah hukum Pemerintahan Lokal	Angka	10.00	100.00	100.0000	
1	1	5			PROSEKSI PENGANTARAN PENGUSAHA	Angka Indeks Kapasitas Masyarakat (IKM) wilayah hukum Pemerintahan Lokal	Angka	10.00	100.00	100.0000	
1	1	6			PROSEKSI PENGANTARAN PENGUSAHA	Indeks Kapasitas Masyarakat (IKM) wilayah hukum Pemerintahan Lokal	Angka	10.00	100.00	100.0000	
1	1	7			PROSEKSI PENGANTARAN PENGUSAHA	Indeks Kapasitas Masyarakat (IKM) wilayah hukum Pemerintahan Lokal	Angka	10.00	100.00	100.0000	
1	1	8			PROSEKSI PENGANTARAN PENGUSAHA	Indeks Kapasitas Masyarakat (IKM) wilayah hukum Pemerintahan Lokal	Angka	10.00	100.00	100.0000	
1	1	9			PROSEKSI PENGANTARAN PENGUSAHA	Indeks Kapasitas Masyarakat (IKM) wilayah hukum Pemerintahan Lokal	Angka	10.00	100.00	100.0000	
1	1	10			PROSEKSI PENGANTARAN PENGUSAHA	Indeks Kapasitas Masyarakat (IKM) wilayah hukum Pemerintahan Lokal	Angka	10.00	100.00	100.0000	
1	1	11			PROSEKSI PENGANTARAN PENGUSAHA	Indeks Kapasitas Masyarakat (IKM) wilayah hukum Pemerintahan Lokal	Angka	10.00	100.00	100.0000	
1	1	12			PROSEKSI PENGANTARAN PENGUSAHA	Indeks Kapasitas Masyarakat (IKM) wilayah hukum Pemerintahan Lokal	Angka	10.00	100.00	100.0000	
1	1	13			PROSEKSI PENGANTARAN PENGUSAHA	Indeks Kapasitas Masyarakat (IKM) wilayah hukum Pemerintahan Lokal	Angka	10.00	100.00	100.0000	
1	1	14			PROSEKSI PENGANTARAN PENGUSAHA	Indeks Kapasitas Masyarakat (IKM) wilayah hukum Pemerintahan Lokal	Angka	10.00	100.00	100.0000	
1	1	15			PROSEKSI PENGANTARAN PENGUSAHA	Indeks Kapasitas Masyarakat (IKM) wilayah hukum Pemerintahan Lokal	Angka	10.00	100.00	100.0000	
1	1	16			PROSEKSI PENGANTARAN PENGUSAHA	Indeks Kapasitas Masyarakat (IKM) wilayah hukum Pemerintahan Lokal	Angka	10.00	100.00	100.0000	
1	1	17			PROSEKSI PENGANTARAN PENGUSAHA	Indeks Kapasitas Masyarakat (IKM) wilayah hukum Pemerintahan Lokal	Angka	10.00	100.00	100.0000	
1	1	18			PROSEKSI PENGANTARAN PENGUSAHA	Indeks Kapasitas Masyarakat (IKM) wilayah hukum Pemerintahan Lokal	Angka	10.00	100.00	100.0000	
1	1	19			PROSEKSI PENGANTARAN PENGUSAHA	Indeks Kapasitas Masyarakat (IKM) wilayah hukum Pemerintahan Lokal	Angka	10.00	100.00	100.0000	
1	1	20			PROSEKSI PENGANTARAN PENGUSAHA	Indeks Kapasitas Masyarakat (IKM) wilayah hukum Pemerintahan Lokal	Angka	10.00	100.00	100.0000	

					KEPERAWATAN MASYARAKAT	Penyediaan		0.000,00	0.000,0000	
1	0	0			PROGRAM PENGEMBANGAN KEMAHIRAN MATA PELAJARAN TEKNIK	Penyediaan DIT yang meliputi pembelian dan pelatihan	Dasar	20	2.702,22	2.702,2872
1	0	0			PROGRAM PENYELANGKARAN PEMERTAMAN DAN PELATIHAN PUSAKA TEKNIK	Penyediaan Pelayanan Publik yang disediakan	Prasar	99	10,00	1.000,0000
1	0	0			PROGRAM PENYELANGKARAN PEMERTAMAN DAN PELATIHAN PUSAKA TEKNIK	Penyediaan Pelayanan Publik yang disediakan	Prasar	100	21,00	100,0000
1	0	0			PROGRAM PENYELANGKARAN PEMERTAMAN DAN PELATIHAN PUSAKA TEKNIK	Penyediaan Pelayanan Publik yang disediakan	Prasar	100	75,00	100,0000
1	0	0			PROGRAM PENYELANGKARAN PEMERTAMAN DAN PELATIHAN PUSAKA TEKNIK	Penyediaan Pelayanan Publik yang disediakan	Prasar	100	10,00	100,0000
1	0	0			PROGRAM PENYELANGKARAN PEMERTAMAN DAN PELATIHAN PUSAKA TEKNIK	Penyediaan Pelayanan Publik yang disediakan	Prasar	0	-	100,0000
1	0	0			PROGRAM PENYELANGKARAN PEMERTAMAN DAN PELATIHAN PUSAKA TEKNIK	Penyediaan Pelayanan Publik yang disediakan	Dasar	100	44,00	100,0000
1	0	0			PROGRAM PENYELANGKARAN PEMERTAMAN DAN PELATIHAN PUSAKA TEKNIK	Penyediaan Pelayanan Publik yang disediakan	Dasar	100	44,00	100,0000
1	0	0			PROGRAM PENYELANGKARAN PEMERTAMAN DAN PELATIHAN PUSAKA TEKNIK	Penyediaan Pelayanan Publik yang disediakan	Dasar	100	44,00	100,0000
1	0	0			PROGRAM PENYELANGKARAN	Penyediaan Pelayanan Publik yang disediakan	Prasar	0	-	100,0000

					PEMBENTARAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
1	1	2			PEMBENTARAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pemeriksaan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	Pemer	0	-	000,0000
1	1	2			PEMBENTARAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pemeriksaan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	Pemer	100	40,00	400,0000
1	1	2			PEMBENTARAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pemeriksaan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	Pemer	100	140,00	140,0000
1	1	2			PEMBENTARAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pemeriksaan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	Pemer	100	4,00	400,0000
1	1	2			PEMBENTARAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pemeriksaan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	Pemer	100	10,00	100,0000
1	1	2			PEMBENTARAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pemeriksaan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	Pemer	100	10,00	100,0000
1	1	3			PEMBENTARAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pemeriksaan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	Pemer	100	23,00	91,2000
1	1	3			PEMBENTARAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pemeriksaan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	Pemer	100	0,72	16,0000
1	1	3			PEMBENTARAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pemeriksaan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	Pemer	100	31,00	190,0000
1	1	3			PEMBENTARAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pemeriksaan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	Pemer	100	18,25	187,0000

F	4	4			PROSES PENYELIDIKAN PENYERAPAN DAN FILTRASI TUMBUH	Penelitian Tindakan Tumbuhan yang dikembangkan	Ekspor	400	18,00	180,0000
F	4	4			PROSES PENYELIDIKAN PENYERAPAN DAN FILTRASI TUMBUH	Penelitian Tindakan Tumbuhan yang dikembangkan	Ekspor	400	18,00	180,0000
F	4	2			PROSES PENGIRIAN MAYARAKAT DEKA DAN SPRAYAN	Unggas Pemasakan Mayarakat dalam Pemasakan dikembangkan	Ekspor	400	5.180,75	10,75000
F	4	2			PROSES PENGIRIAN MAYARAKAT DEKA DAN SPRAYAN	Unggas Pemasakan Mayarakat dalam Pemasakan dikembangkan	Ekspor	300	625,30	20,25000
F	4	2			PROSES PENGIRIAN MAYARAKAT DEKA DAN SPRAYAN	Unggas Pemasakan Mayarakat dalam Pemasakan dikembangkan	Ekspor	300	681,20	1,20000
F	4	2			PROSES PENGIRIAN MAYARAKAT DEKA DAN SPRAYAN	Unggas Pemasakan Mayarakat dalam Pemasakan dikembangkan	Ekspor	300	207,80	10,25000
F	4	2			PROSES PENGIRIAN MAYARAKAT DEKA DAN SPRAYAN	Unggas Pemasakan Mayarakat dalam Pemasakan dikembangkan	Ekspor	300	200,00	1,20000
F	4	2			PROSES PENGIRIAN MAYARAKAT DEKA DAN SPRAYAN	Unggas Pemasakan Mayarakat dalam Pemasakan dikembangkan	Ekspor	300	188,20	10,20000
F	4	2			PROSES PENGIRIAN MAYARAKAT DEKA DAN SPRAYAN	Unggas Pemasakan Mayarakat dalam Pemasakan dikembangkan	Ekspor	400	180,00	8,75000
F	4	2			PROSES PENGIRIAN	Unggas Pemasakan Mayarakat dalam Pemasakan	Ekspor	300	724,70	1,20000

F	4	4			PROGRAM PENYELIDIKAN UMUM PENGERTAHAN UMUM	Penelitian Penyelidikan Umum Penelitian Umum yang di selidiki	Daerah	400	40,00	155.000
F	4	4			PROGRAM PENYELIDIKAN UMUM PENGERTAHAN UMUM	Penelitian Penyelidikan Umum Penelitian Umum yang di selidiki	Daerah	400	40,00	155.000
F	4	4			PROGRAM PENYELIDIKAN UMUM PENGERTAHAN UMUM	Penelitian Penyelidikan Umum Penelitian Umum yang di selidiki	Daerah	400	40,00	155.000
F	3	3			PROGRAM PENYELIDIKAN UMUM PENGERTAHAN UMUM	Penelitian Penyelidikan Umum Penelitian Umum yang di selidiki	Daerah	300	30,00	60.000
F	3	3			PROGRAM PENYELIDIKAN UMUM PENGERTAHAN UMUM	Penelitian Penyelidikan Umum Penelitian Umum yang di selidiki	Daerah	300	30,00	100.000
F	3	3			PROGRAM PENYELIDIKAN UMUM PENGERTAHAN UMUM	Penelitian Penyelidikan Umum Penelitian Umum yang di selidiki	Daerah	300	30,00	-
F	3	3			PROGRAM PENYELIDIKAN UMUM PENGERTAHAN UMUM	Penelitian Penyelidikan Umum Penelitian Umum yang di selidiki	Daerah	300	30,00	60.000
F	3	3			PROGRAM PENYELIDIKAN UMUM PENGERTAHAN UMUM	Penelitian Penyelidikan Umum Penelitian Umum yang di selidiki	Daerah	300	30,00	-
F	3	3			PROGRAM PENYELIDIKAN UMUM PENGERTAHAN UMUM	Penelitian Penyelidikan Umum Penelitian Umum yang di selidiki	Daerah	300	30,00	75.000
F	3	3			PROGRAM PENYELIDIKAN	Penelitian Penyelidikan Umum Penelitian Umum	Daerah	300	30,00	-

					URAIAN PEMBENTAHAN LULUS	yang di selidiki				
7	1	0			PERUSAHAAN PENYELIDIKAN DAN URAIAN PEMBENTAHAN LULUS	Perusahaan yang bergerak dalam Pembentahan Lulus yang di selidiki	Daerah	100	84,32	10.000
7	1	0			PERUSAHAAN PENYELIDIKAN DAN URAIAN PEMBENTAHAN LULUS	Perusahaan yang bergerak dalam Pembentahan Lulus yang di selidiki	Daerah	100	84,32	
7	1	0			PERUSAHAAN PENYELIDIKAN DAN URAIAN PEMBENTAHAN LULUS	Perusahaan yang bergerak dalam Pembentahan Lulus yang di selidiki	Daerah	100	13,100	
Total 7:										
Memeriksa pemerintah perusahaan industri dan di selidiki selidiki										
	2.1.	Perumahan industri industri dan				Perumahan Industri Industri Industri (H)		10,74		
		2.1.1.	Memeriksa industri pelayanan industri pemerintah				Perumahan rumah tangga yang memiliki atau tidak ada layanan rumah tangga (H)		10	
						Perumahan rumah tangga yang memiliki atau tidak ada layanan rumah tangga (H)		10,74		
1	1	0			PERUSAHAAN PENYELIDIKAN DAN URAIAN PEMBENTAHAN LULUS	Cabang industri dan Perumahan Perumahan	Daerah	1,00	1.000,00	1.000,00
1	1	0			PERUSAHAAN PENYELIDIKAN DAN URAIAN PEMBENTAHAN LULUS	Perumahan Area Perumahan Rumah	Daerah	1,00	1.000,00	1.000,00
1	1	0			PERUSAHAAN PENYELIDIKAN DAN URAIAN PEMBENTAHAN LULUS	Perumahan Area Perumahan Perumahan Tidak Rumah	Daerah	1,00	100,00	9.000,00
1	1	0			PERUSAHAAN PENYELIDIKAN DAN URAIAN PEMBENTAHAN LULUS	Perumahan perumahan Industri TID di lingkungan Perumahan	Daerah	1,00	10.000,00	10.000,00

			1.1.1	Menyediakan informasi dan pelayanan umum	Penyediaan Fasilitas Informasi (M)		753	
1	2	2		PROGRAM PENYELANGKARAN PUNDAK BAWA AIR (PBA)	Rasio Penyelidikan 20% Dalam Rangka 100%	Penan	2	17.489,00
1	2	3		PROGRAM PENYELANGKARAN MAN: PENYELANGKARAN KOTAK PENYELANGKARAN AIR MENDI	Program jualan rumah tangga dengan skim insentif/insentif terhadap air rumah layak gelabah dan gelabah	Penan	12	10.087,97
1	3	3		PROGRAM PENYELANGKARAN BANGUNAN BERKUALITI	Rasio bangunan yang memiliki 100% PDR dan rumah bangunan	Penan	99	10.897,00
1	3	4		PROGRAM PENYELANGKARAN JALAN	Program Penyelidikan Jalan Dalam Rangka 100%	Penan	30	10.817,26
1	4	1		PROGRAM PENYELANGKARAN JALAN	Penyediaan 200% dan Kemudahan yang tidak	Penan	90	100,00
1	5	2		PROGRAM PENYELANGKARAN PELAYANAN	Penyediaan Kemudahan Terhadap Penyediaan Taka Rasio (KTR) 100%	Penan	75	1.000,00
			1.1.2	Menyediakan pelayanan pelanggan	Penyediaan Fasilitas pelayanan pelanggan yang sesuai untuk menerima dan menerima/berikan pelayanan (M)		999	
2	2	2		PROGRAM PENYELANGKARAN KAWAT KAWAT/ANALISA JALAN (KAW)	Penyediaan Kawan dan Penyediaan Fasilitas 100% yang sesuai dan	Penan	99,9	1.000,00
2	2	3		PROGRAM PENYELANGKARAN PELAYANAN	Saluran Kemudahan Kawan dan Penyediaan Fasilitas	Penan	99,9	1.000,00
Sub 2:								
Menyediakan layanan pelayanan pelanggan 20% dan layanan umum insentif/insentif rumah tangga dan rumah tangga								
Menyediakan pelayanan pelanggan rumah tangga dan								
Menyediakan pelayanan pelanggan rumah tangga dan umum								

			K&L	Menyempatkan produktivitas sektor pertanian	Meningkatkan Sektor Pertanian, Perikanan, dan Perikanan Kelautan (P3K) (M)		2024		
1	8	4		PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA UNTUK KEMAMPUAN MASYARAKAT RUMAH TANGGA DAN KEMAMPUAN MASYARAKAT	Melakukan peningkatan dan pemeliharaan pangan yang tersedia	Pasar	22,74	221,42	1.328,88
1	8	0		PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN MASYARAKAT RUMAH TANGGA DAN KEMAMPUAN MASYARAKAT	Pemetaan Rumah Tangga yang dilaksanakan oleh sebagai Sumber Pangan Kelangka	Pasar	79,09	195,19	1.807,09
1	8	4		PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN MASYARAKAT RUMAH TANGGA	Pemetaan Ketersediaan pangan Monev	Pasar	44,44	195,00	195,00
1	8	0		PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN MASYARAKAT RUMAH TANGGA	Melakukan Peningkatan Ketersediaan Pangan	Pasar	30	32,00	195,00
1	2	4		PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN MASYARAKAT RUMAH TANGGA	Pemetaan Ketersediaan Pangan	tan	44,44	4.444,44	4.444,44
1	8	4		PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN MASYARAKAT RUMAH TANGGA	Pemetaan Ketersediaan Pangan	Tan	3999	1.111,11	1.111,11
1	2	4		PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN MASYARAKAT RUMAH TANGGA	Kemampuan dan Ketersediaan Pangan	Rg /Grg /G /Tg	44,4	444,44	444,44
1	8	0		PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN MASYARAKAT RUMAH TANGGA	Pemetaan Ketersediaan dan Peningkatan Ketersediaan Pangan	Pasar	41,1	4.444,44	4.444,44
1	2	4		PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN MASYARAKAT RUMAH TANGGA	Pemetaan Ketersediaan dan Peningkatan Ketersediaan Pangan	Pasar			1.111,11
1	8	0		PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN MASYARAKAT RUMAH TANGGA	Pemetaan Ketersediaan dan Peningkatan Ketersediaan Pangan	Pasar	10,77	4.444,44	4.444,44

1	1	3			PROGRAM PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM PEMASARAN	Penelitian Eksperimental Terapan dan Pemasaran Pemasaran	Dosen			9.400,00
4	2	4			PROGRAM PENYUSUNAN KEMAHASISWAAN DAN KEMAHASISWAAN KEMAHASISWAAN KEMAHASISWAAN	Manajemen pemasaran dengan fokus pada pemasaran yang ada di pasar, pemasaran dan pemasaran	Dosen	50,00	100,00	175,00
5	3	5			PROGRAM PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN KEMAHASISWAAN KEMAHASISWAAN KEMAHASISWAAN	Manajemen Pemasaran dengan fokus pada pemasaran	Dosen	50	1.000,00	1.000,00
6	4	6			PROGRAM PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN KEMAHASISWAAN KEMAHASISWAAN KEMAHASISWAAN	Manajemen Pemasaran dengan fokus pada pemasaran	Dosen			1.000,00
7	5	7			PROGRAM PENYUSUNAN KEMAHASISWAAN KEMAHASISWAAN KEMAHASISWAAN	Manajemen Pemasaran dengan fokus pada pemasaran	Dosen	50	100,00	100,00
8	6	8			PROGRAM PENYUSUNAN KEMAHASISWAAN KEMAHASISWAAN KEMAHASISWAAN	Manajemen Pemasaran dengan fokus pada pemasaran	Dosen	50,00	1.000,00	1.000,00
9	7	9			PROGRAM PENYUSUNAN KEMAHASISWAAN KEMAHASISWAAN KEMAHASISWAAN	Manajemen Pemasaran dengan fokus pada pemasaran	Dosen			
3.3.3. Mengembangkan Kualitas Lingkungan Hidup						Indikator Kualitas Lingkungan Hidup		50,00		
						Indikator Kualitas Hidup		50,00		
						Indikator Kualitas Hidup		50,00		
						Indikator Kualitas Hidup		50,00		
10	8	10			PROGRAM PENYUSUNAN KEMAHASISWAAN KEMAHASISWAAN KEMAHASISWAAN	Indikator Kualitas Hidup	Dosen	50	100,00	100,00
11	9	11			PROGRAM PENYUSUNAN KEMAHASISWAAN KEMAHASISWAAN KEMAHASISWAAN	Indikator Kualitas Hidup	Dosen	50,00	100,00	100,00

1	2	3				PROGRAM PENGKUALIFIKASIAN KEPERAWATAN MATA (KEMATI)	Pemenuhan kebutuhan ERM yang memadai sesuai	Penera	22	480,71	7
2	1	3				PROGRAM PENGKUALIFIKASI BAHAN BERAPAKA BAHU SEKALIN (SI) DAN KUALITAS BAHAN BERAPAKA BAHU BERAPAKA (KUALITAS) PROGRAM PENGKUALIFIKASI DAN PENGKUALIFIKASI PENGKUALIFIKASI KUALITAS BAHAN PENGKUALIFIKASI DAN PENGKUALIFIKASI KUALITAS BAHAN (KUALITAS)	Pemenuhan kebutuhan ERM yang memadai sesuai	Penera	33	74,80	20,80
3	2	4				PROGRAM PENGKUALIFIKASI BAHAN PENGKUALIFIKASI DAN PENGKUALIFIKASI KUALITAS BAHAN (KUALITAS)	Pemenuhan kebutuhan ERM yang memadai sesuai	Penera	100	333,07	148,70
4	3	4				PROGRAM PENGKUALIFIKASI PENGKUALIFIKASI PENGKUALIFIKASI PENGKUALIFIKASI KUALITAS BAHAN KUALITAS BAHAN (KUALITAS)			4	-	48,80
5	1	4				PROGRAM PENGKUALIFIKASI KUALITAS BAHAN KUALITAS BAHAN (KUALITAS)	Indikator Pemenuhan Kebutuhan Kualitas BAHAN	Penera	100	33,41	97,50
6	1	4				PROGRAM PENGKUALIFIKASI KUALITAS BAHAN KUALITAS BAHAN (KUALITAS)	Pemenuhan Kebutuhan Kualitas BAHAN yang memadai	Penera	100	33,41	
7	1	1				PROGRAM PENGKUALIFIKASI KUALITAS BAHAN (KUALITAS)	Pemenuhan Kebutuhan Kebutuhan yang memadai	Penera	88	8.154,79	7.898,01

Lampiran 1								
Klasifikasi perbandingan 2014 yang menilai kontribusi dan biaya yang akan menghasilkan laba dan rugi								
4.4.		Menunjukkan bahwa 2014 biaya yang berkontribusi laba dan rugi			Indeks Perbandingan Momen (2014/2013)		100	
4.4.1.		Menunjukkan bahwa kontribusi			Indeks Kontribusi		7,30	
1	1	0		PEROLEHAN PERUSAHAAN TERBESARAN	APR 2014	Posisi	100	100.000,00
					APR 2015	Posisi		
					APR 2016	Posisi		
					APR 2017	Posisi		
					APR 2018	Posisi		
1	1	0		PEROLEHAN PERUSAHAAN KURATOR	Perolehan Dituan Kontribusi atau penghasilan tambahan untuk Dituan	Posisi	99	100,00
					Perolehan Dituan Kontribusi atau Dituan Dituan Kontribusi atau Dituan Kontribusi atau Dituan	Posisi		
1	1	0		PEROLEHAN PERUSAHAAN KAPASITAS MANAJEMEN	Perolehan Dituan yang Berdaya Uang	Posisi	10	1.000,00
1	1	0		PEROLEHAN PERUSAHAAN KAPASITAS DATA SANGAT	Saluran Air Tersebut yang Berdaya	Posisi	92	1.000,00
1	1	0		PEROLEHAN PERUSAHAAN KAPASITAS PERUSAHAAN	Saluran perolehan Perolehan	Posisi	100	100,00
1	1	0		PEROLEHAN PERUSAHAAN KAPASITAS PERUSAHAAN	Perolehan Jumlah Pengaruh Pengaruh	Posisi	92	100,00

1	4	4			PROGRAM PENGKUALIFIKASIAN KARYAWAN BARU KORPORASI	Gedung Pendidikan umum ganda 100kg, 200kg dan 300kg	Peserta	64		
2	5	2			PROGRAM PENGKUALIFIKASIAN PENGURUS	Gedung pertemuan sekolah Pendidikan Tawarikh saling Pagarin 10000	Peserta	17,2	120,00	120,00
4	1	4			PROGRAM PENGKUALIFIKASIAN KARYAWAN BARU (K)	Gedung Pendidikan Keluarga Banyuwangi	Peserta	64,74	100,00	1.000,00
4	1	4			PROGRAM PENGKUALIFIKASIAN DAN PENGKUALIFIKASIAN KARYAWAN BARU (K)	Pembinaan Keluarga Jember Pemberi 10000	Peserta	64	100,00	1.000,00
				1.1.1	Manajemen daya beli manajemen			11.000,00		
1	1	4			PROGRAM PENGKUALIFIKASIAN KARYAWAN BARU KORPORASI	Gedung pendidikan umum 100kg 100kg 100kg 100kg yang diketahui	Peserta	64	100,00	100,00
2	1	2			PROGRAM PENGKUALIFIKASIAN DAN PENGKUALIFIKASIAN KARYAWAN BARU (K)	Pembinaan keluarga yang dikenal dan dipahami	Peserta	16,75	110,00	110,00
2	1	2			PROGRAM PENGKUALIFIKASIAN KARYAWAN BARU KORPORASI (K)	Jumlah KSP/KSP 100kg yang diketahui	Unit	20	100,00	100,00
4	1	4			PROGRAM PENGKUALIFIKASIAN KARYAWAN BARU KORPORASI	Gedung keluarga yang memiliki Pembinaan keluarga yang	Peserta	16,00	100,00	100,00
1	1	2			PROGRAM PENGKUALIFIKASIAN KARYAWAN BARU KORPORASI	Jumlah Peserta Pendidikan yang diketahui	Unit	-		
1	1	2			PROGRAM PENGKUALIFIKASIAN KARYAWAN BARU KORPORASI	Gedung Uraian Mula yang diketahui dan diketahui	Peserta	72	1.000,00	1.000,00

			nama (nama)				
1	4	0	PERUSAHAAN PENGALAMAN LAINNYA	jumlah dana yang masuk	1000	1.110.00	300.00
Item 2: Memperkirakan partisipasi awal dan perkembangan masyarakat dalam perkembangan							
44.			Memperkirakan partisipasi awal masyarakat dalam perkembangan awal	jumlah partisipasi awal	00		
44.1			Memperkirakan partisipasi awal masyarakat dalam perkembangan perkembangan	jumlah partisipasi awal perkembangan	00		
1	4	0	PERUSAHAAN PENGALAMAN LAINNYA	jumlah dana yang masuk	1000	1.110.00	300.00
2	4	0	PERUSAHAAN PENGALAMAN LAINNYA	jumlah dana yang masuk	1000	1.110.00	300.00
3	4	0	PERUSAHAAN PENGALAMAN LAINNYA	jumlah dana yang masuk	1000	1.110.00	300.00
4	4	0	PERUSAHAAN PENGALAMAN LAINNYA	jumlah dana yang masuk	1000	1.110.00	300.00
5	4	0	PERUSAHAAN PENGALAMAN LAINNYA	jumlah dana yang masuk	1000	1.110.00	300.00
6	4	0	PERUSAHAAN PENGALAMAN LAINNYA	jumlah dana yang masuk	1000	1.110.00	300.00
7	4	0	PERUSAHAAN PENGALAMAN LAINNYA	jumlah dana yang masuk	1000	1.110.00	300.00
8	4	0	PERUSAHAAN PENGALAMAN LAINNYA	jumlah dana yang masuk	1000	1.110.00	300.00
9	4	0	PERUSAHAAN PENGALAMAN LAINNYA	jumlah dana yang masuk	1000	1.110.00	300.00
10	4	0	PERUSAHAAN PENGALAMAN LAINNYA	jumlah dana yang masuk	1000	1.110.00	300.00
11	4	0	PERUSAHAAN PENGALAMAN LAINNYA	jumlah dana yang masuk	1000	1.110.00	300.00
12	4	0	PERUSAHAAN PENGALAMAN LAINNYA	jumlah dana yang masuk	1000	1.110.00	300.00
13	4	0	PERUSAHAAN PENGALAMAN LAINNYA	jumlah dana yang masuk	1000	1.110.00	300.00
14	4	0	PERUSAHAAN PENGALAMAN LAINNYA	jumlah dana yang masuk	1000	1.110.00	300.00
15	4	0	PERUSAHAAN PENGALAMAN LAINNYA	jumlah dana yang masuk	1000	1.110.00	300.00
16	4	0	PERUSAHAAN PENGALAMAN LAINNYA	jumlah dana yang masuk	1000	1.110.00	300.00
17	4	0	PERUSAHAAN PENGALAMAN LAINNYA	jumlah dana yang masuk	1000	1.110.00	300.00
18	4	0	PERUSAHAAN PENGALAMAN LAINNYA	jumlah dana yang masuk	1000	1.110.00	300.00
19	4	0	PERUSAHAAN PENGALAMAN LAINNYA	jumlah dana yang masuk	1000	1.110.00	300.00
20	4	0	PERUSAHAAN PENGALAMAN LAINNYA	jumlah dana yang masuk	1000	1.110.00	300.00

1	1	0				PEMBERAN PEMBERIAN DAN TENDANGAN PEMBERANTARAN BISA	Pemberan Bina/Minimalkan yang Berakut Admistrasi	Dasar	100	49,40	
1	4	0				PEMBERAN PEMBERIAN DAN TENDANGAN PEMBERANTARAN BISA	Pemberan Bina/Minimalkan yang Berakut Admistrasi	Dasar	100	100,70	
1	1	0				PEMBERAN PEMBERIAN DAN TENDANGAN PEMBERANTARAN BISA	Pemberan Bina/Minimalkan yang Berakut Admistrasi	Dasar	100	52,91	
Meningkatkan Keterampilan masyarakat dalam pembelajaran							Status Indeks Keterampilan	Status	100	4	
Meningkatkan Keterampilan masyarakat dalam program pembelajaran masyarakat							Tingkat Keterampilan Masyarakat	Dasar	80		
1	1	0				PEMBERAN PEMBERIAN	Pemberan Bina yang Berakut dengan Bina	Dasar	100	100,00	75,00
1	4	0				PEMBERAN PEMBERIAN MASYARAKAT BISA DAN KELUHAN	Tingkat Keterampilan Masyarakat dalam Pembelajaran Admistrasi	Dasar	100	100,70	
1	4	0				PEMBERAN PEMBERIAN MASYARAKAT BISA DAN KELUHAN	Tingkat Keterampilan Masyarakat dalam Pembelajaran Admistrasi	Dasar	100	100,70	
1	4	0				PEMBERAN PEMBERIAN MASYARAKAT BISA DAN KELUHAN	Tingkat Keterampilan Masyarakat dalam Pembelajaran Admistrasi	Dasar	100	100,70	
1	1	0				PEMBERAN PEMBERIAN MASYARAKAT BISA DAN KELUHAN	Tingkat Keterampilan Masyarakat dalam Pembelajaran Admistrasi	Dasar	100	100,70	
1	1	0				PEMBERAN PEMBERIAN MASYARAKAT BISA DAN KELUHAN	Tingkat Keterampilan Masyarakat dalam Pembelajaran Admistrasi	Dasar	100	100,70	

1	1	4			PERANGA PENGREKSIAN MAYORANUS 2004 DAN KOLLEMAN	Tugas Praktek Masyarakat dalam Perekayasa ekonomi	Pasien	100	100,00	
1	1	4			PERANGA PENGREKSIAN MAYORANUS 2004 DAN KOLLEMAN	Tugas Praktek Masyarakat dalam Perekayasa ekonomi	Pasien	100	100,00	
1	1	4			PERANGA PENGREKSIAN MAYORANUS 2004 DAN KOLLEMAN	Tugas Praktek Masyarakat dalam Perekayasa ekonomi	Pasien	100	100,00	
1	1	4			PERANGA PENGREKSIAN MAYORANUS 2004 DAN KOLLEMAN	Tugas Praktek Masyarakat dalam Perekayasa ekonomi	Pasien	100	100,00	
1	1	4			PERANGA PENGREKSIAN MAYORANUS 2004 DAN KOLLEMAN	Tugas Praktek Masyarakat dalam Perekayasa ekonomi	Pasien	100	100,00	
			2.2.2		Meningkatnya kesadaran dan prinsip-prinsip dalam kebagian perencanaan	Indeks Pembangunan Dasar (IPD) (Indeks)	Indeks	30		
1	1	4			PERANGA PENGREKSIAN MAYORANUS 2004 DAN KOLLEMAN	Saluran perantara perencanaan perencanaan	Pasien	100	100,00	100,00
1	1	4			PERANGA PENGREKSIAN MAYORANUS 2004 DAN KOLLEMAN	Saluran perantara perencanaan perencanaan	Pasien	100	100,00	100,00
100,00										
Meningkatnya kesadaran, kesadaran, kesadaran dan kesadaran kesadaran										
			2.2.2		Meningkatnya kesadaran, kesadaran, kesadaran dan kesadaran kesadaran	Indeks kesadaran, kesadaran dan kesadaran kesadaran (Indeks)		10,00		
			2.2.2		Meningkatnya kesadaran, kesadaran, kesadaran dan kesadaran kesadaran	Indeks kesadaran, kesadaran dan kesadaran kesadaran (Indeks)		10,00		

1	4	4				PROGRAM FENOLATKATAN KETERANGAN DAN KETERANGAN UNGG	Edisi program FENOLAT dan FENOLAT / Edisi 2000	Passer	100	0.000.00	0.000.00
1	4	4				PROGRAM FENOLATKATAN KETERANGAN	Program FENOLAT yang menghasilkan laporan Fenolatan dan FENOLAT Keterangan	Passer	100.00	0.000.00	0.000.00
1	1	2				PROGRAM FENOLATKATAN KETERANGAN	Edisi FENOLAT / FENOLAT Keterangan	Passer	100.00	0.000.00	0.000.00
1	4	4				PROGRAM FENOLATKATAN FENOLATKATAN KETERANGAN DAN FENOLATKATAN DAN KETERANGAN	Program FENOLAT yang menghasilkan laporan Fenolatan dan FENOLAT	Passer	100.00	0.000.00	0.000.00
1	1	4				PROGRAM KETERANGAN KETERANGAN DAN KETERANGAN UNGG	Program FENOLAT Keterangan dan Keterangan	Passer	0	-	-
1	1	4				PROGRAM KETERANGAN KETERANGAN DAN KETERANGAN UNGG	Program FENOLAT Keterangan dan Keterangan	Passer	0	-	-
1	1	4				PROGRAM KETERANGAN KETERANGAN DAN KETERANGAN UNGG	Program FENOLAT Keterangan dan Keterangan	Passer	0	-	-
1	1	4				PROGRAM KETERANGAN KETERANGAN DAN KETERANGAN UNGG	Program FENOLAT Keterangan dan Keterangan	Passer	0	-	-
1	1	4				PROGRAM KETERANGAN KETERANGAN DAN KETERANGAN UNGG	Program FENOLAT Keterangan dan Keterangan	Passer	0	-	-
1	1	4				PROGRAM KETERANGAN KETERANGAN DAN KETERANGAN UNGG	Program FENOLAT Keterangan dan Keterangan	Passer	0	-	-
1	1	4				PROGRAM KETERANGAN KETERANGAN DAN KETERANGAN UNGG	Program FENOLAT Keterangan dan Keterangan	Passer	0	-	-

					KEPERAWATAN UMUM	keperawatan umum					
7	1	6			PRASALAH KEMERDIEAN KETERANGAN DAN KETERANGAN UMUM	Prasalah keperawatan kesehatan interpersonal dan keperawatan umum	Prasalah	0	-		
7	2	6			PRASALAH KEMERDIEAN KETERANGAN DAN KETERANGAN UMUM	Prasalah keperawatan kesehatan interpersonal dan keperawatan umum	Prasalah	4	-		
7	3	6			PRASALAH KEMERDIEAN KETERANGAN DAN KETERANGAN UMUM	Prasalah keperawatan kesehatan interpersonal dan keperawatan umum	Prasalah	0	-		
7	4	6			PRASALAH KEMERDIEAN KETERANGAN DAN KETERANGAN UMUM	Prasalah keperawatan kesehatan interpersonal dan keperawatan umum	Prasalah	0	-		
7	5	6			PRASALAH KEMERDIEAN KETERANGAN DAN KETERANGAN UMUM	Prasalah keperawatan kesehatan interpersonal dan keperawatan umum	Prasalah	0	-		
7	6	6			PRASALAH KEMERDIEAN KETERANGAN DAN KETERANGAN UMUM	Prasalah keperawatan kesehatan interpersonal dan keperawatan umum	Prasalah	4	-		
7	7	6			PRASALAH KEMERDIEAN KETERANGAN DAN KETERANGAN UMUM	Prasalah keperawatan kesehatan interpersonal dan keperawatan umum	Prasalah	0	-		
7	8	6			PRASALAH KEMERDIEAN KETERANGAN DAN KETERANGAN UMUM	Prasalah keperawatan kesehatan interpersonal dan keperawatan umum	Prasalah	0	-		
7	9	6			PRASALAH KEMERDIEAN KETERANGAN DAN KETERANGAN UMUM	Prasalah keperawatan kesehatan interpersonal dan keperawatan umum	Prasalah	0	-		
7	10	6			PRASALAH KEMERDIEAN KETERANGAN DAN KETERANGAN UMUM	Prasalah keperawatan kesehatan interpersonal dan keperawatan umum	Prasalah	0	-		
7	11	6			PRASALAH KEMERDIEAN KETERANGAN DAN KETERANGAN UMUM	Prasalah keperawatan kesehatan interpersonal dan keperawatan umum	Prasalah	0	-		
7	12	6			PRASALAH KEMERDIEAN KETERANGAN DAN KETERANGAN UMUM	Prasalah keperawatan kesehatan interpersonal dan keperawatan umum	Prasalah	0	-		
7	13	6			PRASALAH KEMERDIEAN KETERANGAN DAN KETERANGAN UMUM	Prasalah keperawatan kesehatan interpersonal dan keperawatan umum	Prasalah	0	-		
7	14	6			PRASALAH KEMERDIEAN KETERANGAN DAN KETERANGAN UMUM	Prasalah keperawatan kesehatan interpersonal dan keperawatan umum	Prasalah	0	-		
7	15	6			PRASALAH KEMERDIEAN KETERANGAN DAN KETERANGAN UMUM	Prasalah keperawatan kesehatan interpersonal dan keperawatan umum	Prasalah	0	-		
7	16	6			PRASALAH KEMERDIEAN KETERANGAN DAN KETERANGAN UMUM	Prasalah keperawatan kesehatan interpersonal dan keperawatan umum	Prasalah	0	-		
7	17	6			PRASALAH KEMERDIEAN KETERANGAN DAN KETERANGAN UMUM	Prasalah keperawatan kesehatan interpersonal dan keperawatan umum	Prasalah	0	-		
7	18	6			PRASALAH KEMERDIEAN KETERANGAN DAN KETERANGAN UMUM	Prasalah keperawatan kesehatan interpersonal dan keperawatan umum	Prasalah	0	-		
7	19	6			PRASALAH KEMERDIEAN KETERANGAN DAN KETERANGAN UMUM	Prasalah keperawatan kesehatan interpersonal dan keperawatan umum	Prasalah	0	-		
7	20	6			PRASALAH KEMERDIEAN KETERANGAN DAN KETERANGAN UMUM	Prasalah keperawatan kesehatan interpersonal dan keperawatan umum	Prasalah	0	-		

7	1	6			PROGRAM PENGEMBANGAN KETENTARAAN DAN KETERTAHAN MASYARAKAT	Penerapan kebijakan keamanan, pertahanan dan ketertahan umum	Peneran	0	-	
8	1	7			PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN MANUSIA DAN KEMACEK KEMAMPUAN	Edugan Peningkatan Ideologi, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika	Peneran	100	800,00	100,00
9	1	8			PROGRAM PENGEMBANGAN PERAN PARTAI POLTIK DAN MASYARAKAT PENGEMBANGAN MELAKUKAN PENGEMBANGAN PERAN SAMA PENGEMBANGAN ETIKA BERTILAKU BERSAMA SAMA	Edugan Pendidikan Politik Masyarakat	Peneran	100	1.000,00	1.000,00
10	1	9			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWA PENGEMBANGAN ORGANISASI MASYARAKAT	Edugan Pendidikan dan pengembangan organisasi masyarakat	Peneran	100	840,00	100,00
11	1	10			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWA PENGEMBANGAN KETAPAKAN KEMANEK, MASYARAKAT, KAWA MASYARAKAT	Edugan Masyarakat sosial dan budaya	Peneran	100	270,00	100,00
12	1	11			PROGRAM PENGEMBANGAN KEMAMPUAN MANUSIA DAN PENGEMBANGAN KEMAMPUAN MANUSIA DAN PENGEMBANGAN KEMAMPUAN MANUSIA	Edugan Pengembangan Nasional dan Pengembangan sosial umum	Peneran	100	200,00	200,00
			11.1	Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang program dan aksi		Peneran	100			
13	1	12			PROGRAM PENGEMBANGAN KEMAMPUAN MANUSIA	Edugan Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan masyarakat umum	Peneran	100	400,00	100,00

					PERENCANAAN	Subsistem				
1	3	3			PROGRAM PENGOLAHAN AIR DARI SUMPAH DAN AMUK	Subsistem Saluran Air Dan Perawatan Saluran Air	Desain	30	81,32	
4	4	4			PROGRAM PERENCANAAN SALURAN (PRA)	Subsistem Saluran Air Dan Perawatan	Desain	14	100,00	100,00
5	5	7			PROGRAM PENYERAPAN AIR DASAR	Subsistem Saluran Air Dan Perawatan	Desain	30	100,00	100,00
3.3.3.1										
Jumlah seluruh program biaya konstruksi dan pengoperasian										
					3.1	Memperhatikan keseluruhan anggaran			81,32	
					P.A.	Memerlukan biaya konstruksi			4	
1	4	4			PROGRAM PERENCANAAN AIR DARI SUMPAH DAN AMUK	Program PRA yang mencakup pengukuran dan analisis	Desain	30	1.000,00	1.000,00
1	5	5			PROGRAM PERENCANAAN AIR DARI SUMPAH DAN AMUK	Program PRA yang mencakup pengukuran dan analisis	Desain	30	100,00	100,00
1	5	6			PROGRAM PERENCANAAN AIR DARI SUMPAH DAN AMUK	Program PRA yang mencakup pengukuran dan analisis	Desain	30	1.000,00	1.000,00
1	5	7			PROGRAM PERENCANAAN AIR DARI SUMPAH DAN AMUK	Program PRA yang mencakup pengukuran dan analisis	Desain	30	200,00	200,00
1	6	6			PROGRAM PERENCANAAN AIR DARI SUMPAH DAN AMUK	Program PRA yang mencakup pengukuran dan analisis	Desain	30	100,00	100,00
1	5	7			PROGRAM PERENCANAAN AIR DARI SUMPAH DAN AMUK	Program PRA yang mencakup pengukuran dan analisis	Desain	30	12,00	12,00
					P.A.	Memerlukan biaya			9,00	

				penggunaan	(Rp)				
1	7	3		PERMANEN PELAYANAN KEMAHAYAN PERMANEN TENAGA KERJA	Penawar biaya jasa yang mendapatkan pelayanan	Dosen	12.00	144,00	144,00
1	7	4		PERMANEN PERUBAHAN TENAGA KERJA	Penawar jasa jasa yang dianggarkan	Praker	7	895,00	101,87
1	7	3		PERMANEN PERUBAHAN INDUKSI	Penawar biaya yang dianggarkan dengan Persepsi Konsensi (PK)	Dosen	38	135,00	-
1	4	8		PERMANEN PENGAPLIKSIAN KUTUPAN PENGAPLIKSIAN	Biaya jasa yang dianggarkan	Praker	100	100,00	-
1	2	4		TINGKATAN DAN KUTUPAN PENGAPLIKSIAN	Biaya jasa yang dianggarkan dan dianggarkan dengan Persepsi Konsensi (PK)	Dosen	100	88,00	88,00
Jumlah									
Kategori perantara dan daya yang diterima dari									
B.1. Ketersediaan perantara dan daya yang diterima dari					Jumlah perantara dan daya yang diterima dari		1,00		
B.1.1. Ketersediaan perantara dan daya yang diterima dari					Jumlah perantara dan daya yang diterima dari		1,00		
1	4	8		PERMANEN PENGAPLIKSIAN KUTUPAN PENGAPLIKSIAN	Jumlah biaya yang dianggarkan	Dosen	4	1.100,00	1.100,00
1	2	3		TINGKATAN DAN KUTUPAN PERUBAHAN PENGAPLIKSIAN	Biaya jasa yang dianggarkan yang dianggarkan	Dosen	30	14,00	14,00
1	4	8		PERMANEN PENGAPLIKSIAN KUTUPAN PENGAPLIKSIAN	Biaya jasa yang dianggarkan yang dianggarkan	Dosen	4	95,00	
1	2	3		TINGKATAN DAN KUTUPAN PERUBAHAN PENGAPLIKSIAN	Biaya jasa yang dianggarkan yang dianggarkan	Dosen	10	1.100,00	1.100,00

1	4	3			PASARISATA PENGUSAHA PENGUSAHAAN PASARISATA	Pemeriksaan Pengawasan Jumlah Kunjungan Wisata	Pemer	07	1.000,00	111,00
1	4	4			PENGUSAHA PENGUSAHAAN PENGUSAHAAN PASARISATA DAN PASARISATA	Saluran Tolak Pemantauan dan Monev Monev yang Berkesinambungan	Pemer	08	100,00	10,00
			3.3.3	Saluran Tolak Pemantauan dan Monev Monev		Pemer	09	100,00	10,00	
1	4	4			PENGUSAHA PENGUSAHAAN PENGUSAHAAN PASARISATA DAN PASARISATA	Tingkat Pengawasan Pemeriksaan Tolak	Pemer	10	100,00	10,00
1	4	4			PENGUSAHA PENGUSAHAAN PENGUSAHAAN PASARISATA DAN PASARISATA	Jumlah Tolak Tolak yang Berkesinambungan dan Berkesinambungan	Pemer	11	100,00	10,00
			3.3.4	Saluran Tolak Pemantauan dan Monev Monev		Pemer	12	100,00	10,00	
1	4	4			PENGUSAHA PENGUSAHAAN PENGUSAHAAN PASARISATA DAN PASARISATA	Pemeriksaan Pemantauan dan Monev Monev yang Berkesinambungan	Pemer	13	100,00	10,00
1	4	4			PENGUSAHA PENGUSAHAAN PENGUSAHAAN PASARISATA DAN PASARISATA	Pemeriksaan Pemantauan dan Monev Monev yang Berkesinambungan	Pemer	14	100,00	10,00
1	4	4			PENGUSAHA PENGUSAHAAN PENGUSAHAAN PASARISATA DAN PASARISATA	Pemeriksaan Pemantauan dan Monev Monev yang Berkesinambungan	Pemer	15	100,00	10,00
1	4	4			PENGUSAHA PENGUSAHAAN PENGUSAHAAN PASARISATA DAN PASARISATA	Pemeriksaan Pemantauan dan Monev Monev yang Berkesinambungan	Pemer	16	100,00	10,00
1	4	4			PENGUSAHA PENGUSAHAAN PENGUSAHAAN PASARISATA DAN PASARISATA	Pemeriksaan Pemantauan dan Monev Monev yang Berkesinambungan	Pemer	17	100,00	10,00
1	4	4			PENGUSAHA PENGUSAHAAN PENGUSAHAAN PASARISATA DAN PASARISATA	Pemeriksaan Pemantauan dan Monev Monev yang Berkesinambungan	Pemer	18	100,00	10,00
1	4	4			PENGUSAHA PENGUSAHAAN PENGUSAHAAN PASARISATA DAN PASARISATA	Pemeriksaan Pemantauan dan Monev Monev yang Berkesinambungan	Pemer	19	100,00	10,00
1	4	4			PENGUSAHA PENGUSAHAAN PENGUSAHAAN PASARISATA DAN PASARISATA	Pemeriksaan Pemantauan dan Monev Monev yang Berkesinambungan	Pemer	20	100,00	10,00
1	4	4			PENGUSAHA PENGUSAHAAN PENGUSAHAAN PASARISATA DAN PASARISATA	Pemeriksaan Pemantauan dan Monev Monev yang Berkesinambungan	Pemer	21	100,00	10,00
1	4	4			PENGUSAHA PENGUSAHAAN PENGUSAHAAN PASARISATA DAN PASARISATA	Pemeriksaan Pemantauan dan Monev Monev yang Berkesinambungan	Pemer	22	100,00	10,00
1	4	4			PENGUSAHA PENGUSAHAAN PENGUSAHAAN PASARISATA DAN PASARISATA	Pemeriksaan Pemantauan dan Monev Monev yang Berkesinambungan	Pemer	23	100,00	10,00
1	4	4			PENGUSAHA PENGUSAHAAN PENGUSAHAAN PASARISATA DAN PASARISATA	Pemeriksaan Pemantauan dan Monev Monev yang Berkesinambungan	Pemer	24	100,00	10,00
1	4	4			PENGUSAHA PENGUSAHAAN PENGUSAHAAN PASARISATA DAN PASARISATA	Pemeriksaan Pemantauan dan Monev Monev yang Berkesinambungan	Pemer	25	100,00	10,00
1	4	4			PENGUSAHA PENGUSAHAAN PENGUSAHAAN PASARISATA DAN PASARISATA	Pemeriksaan Pemantauan dan Monev Monev yang Berkesinambungan	Pemer	26	100,00	10,00
1	4	4			PENGUSAHA PENGUSAHAAN PENGUSAHAAN PASARISATA DAN PASARISATA	Pemeriksaan Pemantauan dan Monev Monev yang Berkesinambungan	Pemer	27	100,00	10,00
1	4	4			PENGUSAHA PENGUSAHAAN PENGUSAHAAN PASARISATA DAN PASARISATA	Pemeriksaan Pemantauan dan Monev Monev yang Berkesinambungan	Pemer	28	100,00	10,00
1	4	4			PENGUSAHA PENGUSAHAAN PENGUSAHAAN PASARISATA DAN PASARISATA	Pemeriksaan Pemantauan dan Monev Monev yang Berkesinambungan	Pemer	29	100,00	10,00
1	4	4			PENGUSAHA PENGUSAHAAN PENGUSAHAAN PASARISATA DAN PASARISATA	Pemeriksaan Pemantauan dan Monev Monev yang Berkesinambungan	Pemer	30	100,00	10,00

						WALAH TERBES						
1	2	3				PERUSAHA PENGONALAN DAN PENGAWATAN SOLAR	Subsidi Induksi Energi dan Energi yang efisien	Daerah	72	1.000,00	1.000,00	
2	4	5				PERUSAHA PENGONALAN DAN PENGAWATAN SOLAR	Subsidi Energi Efisien dan Energi Efisien	Daerah				
3	6	7				PERUSAHA PENGONALAN DAN PENGAWATAN SOLAR	Subsidi Energi Efisien dan Energi Efisien	Daerah	100	10,00	10,00	

Tabel 4.7.

Kendaraan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD 2021 dengan FY 2022

Prioritas Nasional	Program	Indikator Kinerja Program	Sasaran	Respon di Daerah
Sumber Daya Manusia Berkeadilan dan Berdaya Saing	Program Pendidikan Pendidikan	APK PAUD	100 Persen	Dimas Pendidikan
	Program Pendidikan Pendidikan	APK SD	100,1 Persen	Dimas Pendidikan
	Program Pendidikan Pendidikan	APK SMP	100,1 Persen	Dimas Pendidikan
	Program Pendidikan Pendidikan	APK SMA	100 Persen	Dimas Pendidikan
	Program Pendidikan Pendidikan	APK SLB	100 Persen	Dimas Pendidikan
	Program Pengembangan Pendidikan	Persentase Siswa Pendidikan Dasar Menanggapi Kurikulum Sesuai Standar	85 Persen	Dimas Pendidikan
	Program Pengembangan Pendidikan	Persentase Siswa Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal Menanggapi Kurikulum Sesuai Standar	70 Persen	Dimas Pendidikan
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Layanan Kesehatan Yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal	100 Persen	Dimas Kesehatan
	Program Pendidikan Kesehatan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Sumbahnya Kesehatan (SKH) Yang Kompleks	85 Persen	Dimas Kesehatan
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Bahan-bahan Medikal	Persentase Ketersediaan Obat-Obatan Dan Alat Kesehatan Sesuai Standar	100 Persen	Dimas Kesehatan
Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Pendidikan dan Masyarakat tentang Kesehatan	Program Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif	85 Persen	Dimas Kesehatan
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Ketersediaan Obat-Obatan Dan Pendidikannya	100 Persen	Pusat Jarak Jauh Pusi Monda Pendidikan

	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Pemberdayaan Terjangkau Berbasis Hidup Sehat Dan Sehat	100 Pesean	Pasrah Sakti Urutan Pusi Skanda Tematan
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pemenuhan Layanan Kesehatan Yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal	100 Pesean	Pasrah Sakti Urutan Damar Tinggi Kuning
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pemenuhan Layanan Kesehatan Yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal	100 Pesean	Pasrah Sakti Urutan Damar Jaya Klat
Infrastruktur Untuk Ekstensi Dan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Sumber Daya Air (SDA)	Pada Pengembangan SDA Dalam Komoditas	1 Pesean	Dinas Perumahan Urutan Dan Tata Ruang
	Program Pengembangan Dan Penguatan Sistem Penyediaan Air Minum	Program Jarak Jauh Tiga Dengan Akses Terbatas/putus Terbatas Air Minum Layak, Perumahan Dan Pedesaan	14,29 Pesean	Dinas Perumahan Urutan Dan Tata Ruang
	Program Pemenuhan Ronggaran Cadang	Pada Ronggaran Yang Mendidit Sisi Ping Dan Ronggaran Ronggaran	30 Pesean	Dinas Perumahan Urutan Dan Tata Ruang
	Program Pengembangan Jalan	Program Panjang Jalan Dalam Komoditas	27 Pesean	Dinas Perumahan Urutan Dan Tata Ruang
	Program Pengembangan Jasa Kesehatan	Pemenuhan Sisi Jasa Kesehatan Yang Terbatas	30 Pesean	Dinas Perumahan Urutan Dan Tata Ruang
	Program Pengembangan Perumahan Swast	Pemenuhan Kebutuhan Terbatas Pemukiman Tata Ruang (DTP/U/ DTP)	30 Pesean	Dinas Perumahan Urutan Dan Tata Ruang
	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan Pemenuhan Pengembangan Perumahan	1,79 Pesean	Dinas Perumahan Dan Kawasan Darmasatru
	Program Kawasan Perumahan	Pemenuhan Area Kawasan Rumah	1,02 Pesean	Dinas Perumahan Dan Kawasan Darmasatru

	Program Penanganan Tenaga Kerja	Penertasan Tenaga Kerja Yang Disempatkan	4,27 Persen	Dimas Kewirausahaan Dan Transmigrasi
	Program Minirungan Industrial	Penertasan Kerja Yang Disempatkan Dengan Penempatan Bersama (PE)	20 Persen	Dimas Kewirausahaan Dan Transmigrasi
	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan	1,25 Persen	Dimas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Peningkatan Anak
	Program Perlindungan Perempuan	Cakupan Adopsi Perlindungan Perempuan Terhadap Tindakan Kekerasan	29 Persen	Dimas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Peningkatan Anak
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Cakupan Pembiayaan Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Keluarga	60 Persen	Dimas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Peningkatan Anak
	Program Pengkajian Status Data Gender Dan Anak	Cakupan Bahan Informasi Statistik Gender Dan Anak serta Perlindungan Dan Pemenuhan Anak	70 Persen	Dimas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Peningkatan Anak
	Program Pemenuhan Hak Anak (PRA)	Cakupan Penyetoran Pemenuhan Hak Anak	55 Persen	Dimas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan

				Pemanguan Dan Peningkatan Anak
	Program Peningkatan Kesehatan Anak	Cakupan Pemberian Imunisasi Di Peningkatan Anak	70 Persen	Dinas Pengendalian Pembangunan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Pemanguan Dan Peningkatan Anak
	Program Pengendalian Penyakit	Cakupan Terwujudnya Kebijakan Pengendalian Penyakit Melalui Program KKBH	30,8 Persen	Dinas Pengendalian Pembangunan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Pemanguan Dan Peningkatan Anak
	Program Peningkatan Keluarga Sejahtera (KE)	Cakupan Peningkatan Keluarga Sejahtera	34,91 Persen	Dinas Pengendalian Pembangunan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Pemanguan Dan Peningkatan Anak
	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KE)	Persentase Cakupan Anggota Pokok Dan KE	72 Persen	Dinas Pengendalian Pembangunan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Pemanguan Dan Peningkatan Anak
Lingkungan Hidup, Kesehatan Berencana Dan Pemberdayaan Sosial	Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Untuk Kemandirian Dan Kemandirian Pangan	Cakupan Implementasi Dan Seluruh Kemandirian Pangan Yang Tersedia	75,71 Persen	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hutan Lestari, Dan Perikanan
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Kesehatan Pangan Masyarakat	Persentase Rumah Tangga Yang Menerapkan Pola Pangan Sebagai Sumber Pangan Keluarga	21,27 Persen	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hutan Lestari, Dan

				Pemerataan
	Program Pengurangan Kotoran Rongga	Pemerataan Ketersediaan Pangan Utama	66,67 Persen	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perikanan
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Cakupan Pengawasan Keamanan Pangan	81 Persen	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perikanan
	Program Pemantauan Lingkungan Hidup	Jumlah Titikman Lingkungan Yang Diakses	1 Titikman	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kesehatan
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atas Kesehatan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	81,8 Indeks	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kesehatan
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atas Kesehatan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara	88 Indeks	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kesehatan
	Program Pengelolaan Sampah/limbah Cair (SLLCA/TC)	Persentase Pemenuhan RSH Yang Memenuhi Standar	88 Persen	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kesehatan
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (BBB) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah BB)	Persentase Kegiatan Utama Yang Melaksanakan Pengelolaan Limbah BB	100 Persen	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kesehatan
	Program Perlindungan Dan Pengawasan Terhadap Iain Lingkungan Dan Iain Perairangan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Melaksanakan Terhadap Iain Lingkungan, Iain PPLH Dan PUL/UL Dan Iain Yang Diakses Dan Pemantauan Daerah	100 Persen	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kesehatan
	Program Pengendalian Pencemaran Perairan Dan Perairangan Lingkungan Hidup Untuk Memerangi Program Pengawasan Lingkungan	Cakupan Pemantauan Pengawasan	8	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kesehatan
			100 Persen	Dinas Lingkungan

	Melayanin Melayan Asat	Den Melayanin Talam Melayanin Den		Melayanin Den Den
	Program Penyelenggaraan Lala Limas Dan Angkutan Jalan (Laj)	Penelitian Survei Dan Pasaran Fasilitas Laj Yang Sesuai Standar	70 Pesean	Dimas Perhubungan
	Program Pengaliran Pelayaran	Catupan Kewasudiran Survei Dan Pasaran Perhubungan	70 Pesean	Dimas Perhubungan
Safetias Puduhanan Dan Transmisi Pelayaran Publik	Program Induksi Dan Komunikasi Publik	Penelitian Layanan Publik Berbasis Elektronik Yang Terintegrasi	100 Pesean	Dimas Komunikasi, Informetia, Perseadan Den Statistik
	Program Aplikasi Informatika	Penelitian Jurnal Aplikasi Tersebut Daerah Yang Berintegrasi Aplikasi Digital Dan Komunikasi Kib Infol	100 Pesean	Dimas Komunikasi, Informetia, Perseadan Den Statistik
	Program Aplikasi Informatika	Penelitian Tersebutnya Gaher Pelayaran Informetia Berbasis TIC	100 Pesean	Dimas Komunikasi, Informetia, Perseadan Den Statistik
	Program Penyelenggaraan Statistik Statistik	Penelitian Dokumen Dan Statistik Statistik Daerah Yang Terpadu Valid	100 Pesean	Dimas Komunikasi, Informetia, Perseadan Den Statistik
	Program Penyelenggaraan Perseadan Untuk Pengembangan Informetia	Penelitian TD Yang Menggantikan Data Perseadan	100 Pesean	Dimas Komunikasi, Informetia, Perseadan Den Statistik
Melayanin Ekonomi Untuk Puduhanan Statistik Dan Statistik	Program Pelayaran Jala Uluha Giripin Pjran	Catupan Kewasudiran Tabir Jala Uluha Giripin Pjran Yang Statistik	22 Pesean	Dimas Koperasi Dan Uluha Kari Dan Statistik
	Program Pengembangan Dan Perseadan Koperasi	Penelitian Koperasi Yang Digital Dan Statistik	22,22 Pesean	Dimas Koperasi Dan Uluha Kari Dan Statistik
	Program Statistik Statistik KSP / LSP Koperasi	Jurnal KSP / LSP Koperasi Yang Statistik Statistik	22 Uluha	Dimas Koperasi Dan Uluha Kari Dan

				Menengah
	Program Pendidikan Dan Latihan Pelayanawan	Kejuruan Koperasi Yang Menitik Beratkan Selayang Daring	70,21 Peson	Dimas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
	Program Pemasdayan Dan Peningkatan Koperasi	Jumlah Koperasi Produk Yang Dihasilkan	3 Unit	Dimas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
	Program Pemasdayan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UKDM)	Kejuruan Usaha Mikro Yang Didas Dan Dihasilkan	71 Peson	Dimas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
	Program Pengembangan Umkm	Jumlah Raka USKO-4 Yang Menengah	1407 Unit	Dimas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
Gedihar Polihohiem Dan Transmisi Pelayan Pudu	Program Pengembangan Sistem Peranman Modal	Tingkat Pengembangan Peranman Modal	60 Peson	Dimas Peranman Modal Dan Pelayan Terpadu Gerni Druu
	Program Promosi Peranman Modal	Jumlah Peson Usaha Yang Berminat Melakukan Investasi	45 Peson Usaha	Dimas Peranman Modal Dan Pelayan Terpadu Gerni Druu
	Program Pelayan Peranman Modal	Indeks Koperasi Masyarakat (IKM) Terhadap Layanan Peranman Modal	1,00 Angka	Dimas Peranman Modal Dan Pelayan Terpadu Gerni Druu
	Program Pengembangan Talakawar Peranman Modal	Tingkat Keaktifan Pelayan Koperasi Peranman Modal (Dah Peson Usaha	80 Peson	Dimas Peranman Modal Dan Pelayan Terpadu Gerni Druu
	Program Pengkajian Data Dan Sistem Informasi Peranman Modal	Indeks Koperasi Masyarakat (IKM) Terhadap Layanan Sistem Informasi Peranman Modal	1,00 Nilai	Dimas Peranman Modal Dan Pelayan Terpadu Gerni Druu

Sumber Daya Manusia Berkebutuhan Dan Berdaya Saing	Program Pendidikan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Cakupan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Yang Meringgal	80 Persen	Dimas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan
	Program Pemasaran Pariwisata	Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisata	80 Persen	Dimas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Cakupan Pelaku Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Yang Berkebutuhan	60 Persen	Dimas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Masyarakat	Peningkatan Pemuda Yang Berdaya Saing	20 Persen	Dimas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kelangkaan	Cakupan Alokasi Sarafat Yang Meringgal	100 Persen	Dimas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan
	Program Pengembangan Kapasitas Masyarakat	Cakupan Tamasya Masyarakat	100 Persen	Dimas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan
	Program Pengembangan Kelestarian	Jumlah Lapangan Budaya Yang Berkebutuhan	4 Jema	Dimas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan
	Program Pengembangan Kelestarian Tradisional	Cakupan Kelestarian Tradisional Yang Berkebutuhan	60 Persen	Dimas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan
	Program Peningkatan Dan Penguasaan Cagar Budaya	Cagar Budaya Daerah Yang Diakibatkan	4 Cagar Budaya	Dimas Pariwisata, Pemuda Dan

				Clairvoy, dan Kebudayaan
Inisiatif Penguatan dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Peningkatan Pengetahuan	Persentase Jumlah Pengunjung Pengetahuan	42 Pesisir	Dinas Pengetahuan Dan Aneka Daerah
	Program Pendidikan Aneka	Persentase Rempang Daerah Yang Mengikuti Aneka Sekutu Baru	41 Daerah	Dinas Pengetahuan Dan Aneka Daerah
Lingkungan Hidup, Kesehatan Serasa Dan Perikanan Lahan	Program Pendidikan Perikanan Tanjung	Produk Perikanan Tanjung	2200 Ton	Dinas Perikanan
	Program Pendidikan Perikanan Budidaya	Produk Perikanan Budidaya	800 Ton	Dinas Perikanan
	Program Pendidikan Dan Pemasaran Masa Perikanan	Konsumsi Dan Pemasaran Perikanan	40,2 Kg/Kapita/Th	Dinas Perikanan
	Program Pendidikan Dan Pengembangan Serasa Perikanan	Persentase Ketersediaan Dan Pengembangan Serasa Perikanan	44,74 Pesisir	Dinas Perikanan
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Serasa Perikanan	Persentase Ketersediaan Dan Pengembangan Serasa Perikanan	44,21 Pesisir	Dinas Perikanan
	Program Pengendalian Dan Perangkoan Serasa Perikanan	Persentase Pemantauan Serasa CPT	41,8 Pesisir	Dinas Perikanan
	Program Pendidikan Lahan Perikanan	Cakupan Ketersediaan Lahan Lahan Perikanan Yang Di Terbitkan Dan Kontrol	30 Pesisir	Dinas Perikanan
	Program Pendidikan Perikanan	Cakupan Lahan Ketersediaan Perikanan	42 Pesisir	Dinas Perikanan
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Serasa Perikanan	Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	40,42 Pesisir	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perikanan
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Serasa Perikanan	Persentase Ketersediaan Serasa Dan Serasa Perikanan	71,24 Pesisir	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perikanan
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veterner	Ketersediaan Produk Pangan Asal Hewan Yang Aman (Aman, Sehat, Lahan Dan Halal)	100 Pesisir	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan

				Pemeriksaan
	Program Pengendalian Dan Peningkatan Layanan Perawatan	Pemeriksaan Penurunan Berat Badan/CPT	70 Persen	Diras Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perikanan
	Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan Rinc. Kelompok Petani	73,31 Persen	Diras Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perikanan
Salahsatu Element Untuk Peningkatan Kualitas Dan Ketahanan	Program Pelatihan Dan Pendalaman Pemahaman	Pemeriksaan Pelatihan Dan Pendalaman Pemahaman Yang Direkomendasikan	100 Persen	Diras Perdagangan Dan Perindustrian
	Program Peningkatan Rantai Distribusi Perdagangan	Pemeriksaan Ketersediaan Rantai Dan Pemasaran Distribusi Perdagangan Yang Representatif	100 Persen	Diras Perdagangan Dan Perindustrian
	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Sangat Penting	Cakupan Harga Barang Pokok Dan Sangat Penting Lainnya Di Kecamatan Yang Dipantau	100 Persen	Diras Perdagangan Dan Perindustrian
	Program Pengembangan Ekspor	Ekspor Hasil Perdagangan	222,1 Lb Dolar	Diras Perdagangan Dan Perindustrian
	Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	Pemeriksaan Aspek Standar Yaitu / Yaitu Ulang	95,87 Persen	Diras Perdagangan Dan Perindustrian
	Program Pengawasan Dan Pemantauan Produk Dalam Negeri	Pemeriksaan Peningkatan Pengawasan Produk Dalam Negeri	28 Persen	Diras Perdagangan Dan Perindustrian
	Program Pemenuhan Dan Peningkatan Industri	Cakupan Industri Kecil Dan Menengah Yang Ditina	100 Persen	Diras Perdagangan Dan Perindustrian
	Program Pengendalian Iklan Untuk Industri Kelangkaan / Kira	Cakupan Verifikasi Lapangan Iklan Untuk Industri	100 Persen	Diras Perdagangan Dan Perindustrian
	Program Peningkatan Sistem Informasi Industri Nasional	Cakupan Pemantauan Sistem Informasi Industri Nasional	100 Persen	Diras Perdagangan Dan Perindustrian
Sumber Daya Manusia Berkeadilan Dan Berdaya Saing	Program Peningkatan Kelembagaan Transmigrasi	Cakupan Rinc. Transmigrasi	100 Persen	Diras Perumahan, Dan Transmigrasi

				Informasi
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Presentasi Aun yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan	22 Pemen	Badan Pengembangan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Program Pengembangan Penguasaan	Penelitian Tindakan Apik Yang Diteliti Laporan Pada Tahun Bersejarah	100 Pemen	Kepercayaan Dan
	Program Penemuan Kebiasaan, Peningkatan Dan Aspek	Nilai Bersejarah Alas Program Peningkatan Kompleks Terintegrasi	80 Nilai	Kepercayaan Dan
	Program Penguatan Mediasi Pemadatan Dan Kualitas Kebiasaan	Cahaya Pemahaman Ideologi Pancasila Dan Kualitas Kebiasaan	100 Pemen	Badan Kesehatan Bangsa Dan Politik
	Program Penguatan Peningkatan Perilaku Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Diri Guna Budaya Politik	Cahaya Pendidikan Politik Ideologis	100 Pemen	Badan Kesehatan Bangsa Dan Politik
	Program Penguatan Dan Pengembangan Organisasi Kemasyarakatan	Cahaya Pendidikan Dan Pengembangan Organisasi Kemasyarakatan	100 Pemen	Badan Kesehatan Bangsa Dan Politik
	Program Penguatan Dan Pengembangan Manajemen Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Cahaya Kelangkaan Sosial Dan Budaya	100 Pemen	Badan Kesehatan Bangsa Dan Politik
	Program Penguatan Pengembangan Nasional Dan Penguatan Kualitas Dan Kualitas Pengembangan Konflik Sosial	Cahaya Pengembangan Nasional Dan Pengembangan Konflik Sosial	100 Pemen	Badan Kesehatan Bangsa Dan Politik
	Program Pengembangan Demokratisasi Dan Penguatan Politik	Penelitian Tindakan Politik Yang Dihasilkan	30 Pemen	Kemajuan Pendidikan
	Program Penguatan Masyarakat Desa Dan Masyarakat	Tempat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Masyarakat	100 Pemen	Kemajuan Pendidikan
	Program Koordinasi Kemandirian Dan	Penelitian Tindakan Koordinasi	3 Pemen	Kemajuan

	Kemiskinan Umum	Kemiskinan Dan Kemiskinan Umum		Terdistribusi
	Program Pembiayaan Dan Pengawasan Pemenuhan Desa	Pemerintah Desa/Kelurahan Yang Terdiri Administrasi	100 Persen	Kecamatan Terpadatan
	Program Penyelenggaraan Pemenuhan Dan Pelayanan Publik	Pemerintah Pelayanan Publik Yang Diakses	100 Persen	Kecamatan Terpadatan Hulu
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Timbal Balik Masyarakat Dalam Pembangunan Diakses	100 Persen	Kecamatan Terpadatan Hulu
	Program Koordinat Kemiskinan Dan Kemiskinan Umum	Pemerintah Pelaksanaan Koordinat Kemiskinan Dan Kemiskinan Umum	1 Persen	Kecamatan Terpadatan Hulu
	Program Pembiayaan Dan Pengawasan Pemenuhan Desa	Pemerintah Desa/Kelurahan Yang Terdiri Administrasi	100 Persen	Kecamatan Terpadatan Hulu
	Program Penyelenggaraan Pemenuhan Dan Pelayanan Publik	Pemerintah Pelayanan Publik Yang Diakses	100 Persen	Kecamatan Terpadatan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Timbal Balik Masyarakat Dalam Pembangunan Diakses	100 Persen	Kecamatan Terpadatan
	Program Koordinat Kemiskinan Dan Kemiskinan Umum	Pemerintah Pelaksanaan Koordinat Kemiskinan Dan Kemiskinan Umum	1 Persen	Kecamatan Terpadatan
	Program Pembiayaan Dan Pengawasan Pemenuhan Desa	Pemerintah Desa/Kelurahan Yang Terdiri Administrasi	100 Persen	Kecamatan Terpadatan
	Program Penyelenggaraan Pemenuhan Dan Pelayanan Publik	Pemerintah Pelayanan Publik Yang Diakses	100 Persen	Kecamatan Setengah Tada
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Timbal Balik Masyarakat Dalam Pembangunan Diakses	100 Persen	Kecamatan Setengah Tada
	Program Koordinat Kemiskinan Dan Kemiskinan Umum	Pemerintah Pelaksanaan Koordinat Kemiskinan Dan Kemiskinan Umum	1 Persen	Kecamatan Setengah Tada
	Program Pembiayaan Dan Pengawasan Pemenuhan Desa	Pemerintah Desa/Kelurahan Yang Terdiri Administrasi	100 Persen	Kecamatan Setengah Tada
	Program Penyelenggaraan Pemenuhan Dan Pelayanan Publik	Pemerintah Pelayanan Publik Yang Diakses	1 Persen	Kecamatan Caring
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Timbal Balik Masyarakat Dalam Pembangunan Diakses	100 Persen	Kecamatan Caring
	Program Koordinat Kemiskinan Dan Kemiskinan Umum	Pemerintah Pelaksanaan Koordinat Kemiskinan Dan Kemiskinan Umum	1 Persen	Kecamatan Caring

Program Terkemuka Dan Penghargaan Pemerintahan Desa	Pemerintah Desa/Kelurahan Yang Terlalu Administratif	100 Persen	Kacamatan Gemping
Program Peningkatan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Pemerintah Pelayanan Publik Yang Tidak Baik	100 Persen	Kacamatan Bako
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Unggul Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan	100 Persen	Kacamatan Endi
Program Koordinasi Keresnahan Dan Kerentanan Umum	Pemerintah Pelaksanaan Koordinasi Keresnahan Dan Kerentanan Umum	1 Persen	Kacamatan Endi
Program Terkemuka Dan Penghargaan Pemerintahan Desa	Pemerintah Desa/Kelurahan Yang Terlalu Administratif	100 Persen	Kacamatan Endi
Program Peningkatan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Pemerintah Pelayanan Publik Yang Tidak Baik	100 Persen	Kacamatan Gung
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Unggul Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan	100 Persen	Kacamatan Gung
Program Koordinasi Keresnahan Dan Kerentanan Umum	Pemerintah Pelaksanaan Koordinasi Keresnahan Dan Kerentanan Umum	1 Persen	Kacamatan Gung
Program Terkemuka Dan Penghargaan Pemerintahan Desa	Pemerintah Desa/Kelurahan Yang Terlalu Administratif	100 Persen	Kacamatan Gung
Program Peningkatan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Pemerintah Pelayanan Publik Yang Tidak Baik	100 Persen	Kacamatan Gung Anah Seba
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Unggul Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan	100 Persen	Kacamatan Gung Anah Seba
Program Koordinasi Keresnahan Dan Kerentanan Umum	Pemerintah Pelaksanaan Koordinasi Keresnahan Dan Kerentanan Umum	1 Persen	Kacamatan Gung Anah Seba
Program Terkemuka Dan Penghargaan Pemerintahan Desa	Pemerintah Desa/Kelurahan Yang Terlalu Administratif	100 Persen	Kacamatan Gung Anah Seba
Program Peningkatan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Pemerintah Pelayanan Publik Yang Tidak Baik	1 Persen	Kacamatan Kulaman
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Unggul Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan	100 Persen	Kacamatan Kulman
Program Koordinasi Keresnahan Dan Kerentanan Umum	Pemerintah Pelaksanaan Koordinasi Keresnahan Dan Kerentanan Umum	1 Persen	Kacamatan Kulman
Program Terkemuka Dan Penghargaan Pemerintahan Desa	Pemerintah Desa/Kelurahan Yang Terlalu Administratif	100 Persen	Kacamatan Kulman

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Penertbitan Pelayanan Publik Yang Diakses	100 Pemen	Kaumahan Kengas
Program Penyelenggaraan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Triptat Partisipat Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Diakses	100 Pemen	Kaumahan Kengas
Program Koordinat Kewirausahaan Dan Kewirausahaan	Penertbitan Pelayanan Koordinat Kewirausahaan Dan Kewirausahaan	100 Pemen	Kaumahan Kengas
Program Pelayanan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Penertbitan Desa/Kelurahan Yang Terdiri Administrasi	100 Pemen	Kaumahan Kengas
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Penertbitan Pelayanan Publik Yang Diakses	100 Pemen	Kaumahan Kengas
Program Penyelenggaraan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Triptat Partisipat Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Diakses	100 Pemen	Kaumahan Kengas
Program Koordinat Kewirausahaan Dan Kewirausahaan	Penertbitan Pelayanan Koordinat Kewirausahaan Dan Kewirausahaan	100 Pemen	Kaumahan Kengas
Program Pelayanan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Penertbitan Desa/Kelurahan Yang Terdiri Administrasi	100 Pemen	Kaumahan Kengas
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Penertbitan Pelayanan Publik Yang Diakses	100 Pemen	Kaumahan Kengas
Program Penyelenggaraan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Triptat Partisipat Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Diakses	100 Pemen	Kaumahan Kengas
Program Koordinat Kewirausahaan Dan Kewirausahaan	Penertbitan Pelayanan Koordinat Kewirausahaan Dan Kewirausahaan	100 Pemen	Kaumahan Kengas
Program Pelayanan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Penertbitan Desa/Kelurahan Yang Terdiri Administrasi	100 Pemen	Kaumahan Kengas
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Penertbitan Pelayanan Publik Yang Diakses	100 Pemen	Kaumahan Kengas
Program Penyelenggaraan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Triptat Partisipat Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Diakses	100 Pemen	Kaumahan Kengas
Program Koordinat Kewirausahaan Dan Kewirausahaan	Penertbitan Pelayanan Koordinat Kewirausahaan Dan Kewirausahaan	100 Pemen	Kaumahan Kengas
Program Pelayanan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Penertbitan Desa/Kelurahan Yang Terdiri Administrasi	100 Pemen	Kaumahan Kengas
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Penertbitan Pelayanan Publik Yang Diakses	100 Pemen	Kaumahan Kengas

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa/kelurahan	100 Persen	Kacamatan Mandah
Program Koordinasi Kewirausahaan Dan Kemandirian Usaha	Pemerintah Pelaksanaan Koordinasi Kewirausahaan Dan Kemandirian Usaha	3 Persen	Kacamatan Mandah
Program Pembiayaan Dan Pengawasan Pembiayaan Desa	Pemerintah Desa /Kelurahan Yang Terdiri Administrasi	100 Persen	Kacamatan Mandah
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Pemerintah Pelayanan Publik Yang Diaksanakan	100 Persen	Kacamatan Pangrehan
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa/kelurahan	100 Persen	Kacamatan Pangrehan
Program Koordinasi Kewirausahaan Dan Kemandirian Usaha	Pemerintah Pelaksanaan Koordinasi Kewirausahaan Dan Kemandirian Usaha	3 Persen	Kacamatan Pangrehan
Program Pembiayaan Dan Pengawasan Pembiayaan Desa	Pemerintah Desa /Kelurahan Yang Terdiri Administrasi	100 Persen	Kacamatan Pangrehan
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Pemerintah Pelayanan Publik Yang Diaksanakan	100 Persen	Kacamatan Pulau Ruming
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa/kelurahan	100 Persen	Kacamatan Pulau Ruming
Program Koordinasi Kewirausahaan Dan Kemandirian Usaha	Pemerintah Pelaksanaan Koordinasi Kewirausahaan Dan Kemandirian Usaha	3 Persen	Kacamatan Pulau Ruming
Program Pembiayaan Dan Pengawasan Pembiayaan Desa	Pemerintah Desa /Kelurahan Yang Terdiri Administrasi	100 Persen	Kacamatan Pulau Ruming
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Pemerintah Pelayanan Publik Yang Diaksanakan	100 Persen	Kacamatan Ketan
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa/kelurahan	100 Persen	Kacamatan Tetal
Program Koordinasi Kewirausahaan Dan Kemandirian Usaha	Pemerintah Pelaksanaan Koordinasi Kewirausahaan Dan Kemandirian Usaha	3 Persen	Kacamatan Ketan
Program Pembiayaan Dan Pengawasan Pembiayaan Desa	Pemerintah Desa /Kelurahan Yang Terdiri Administrasi	100 Persen	Kacamatan Tetal
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Pemerintah Pelayanan Publik Yang Diaksanakan	100 Persen	Kacamatan Sungai Baling
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa/kelurahan	100 Persen	Kacamatan Sungai Baling

	Program Koordinasi Keresmasan Dan Keresmasan Umum	Penelitian Pelaksanaan Koordinasi Keresmasan Dan Keresmasan Umum	2 Posen	Kacamatan Gunung Salung
	Program Pendidikan Dan Penguasaan Pemerintahan Desa	Penerbitan Desa/Kelurahan Yang Terdiri Administrasi	100 Posen	Kacamatan Gunung Salung
	Program Peningkatan Penguasaan Dan Pelayanan Publik	Penerbitan Pelayanan Publik Yang Diakses	100 Posen	Kacamatan Tanah Merah
	Program Peningkatan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan	100 Posen	Kacamatan Tanah Merah
	Program Koordinasi Keresmasan Dan Keresmasan Umum	Penelitian Pelaksanaan Koordinasi Keresmasan Dan Keresmasan Umum	2 Posen	Kacamatan Tanah Merah
	Program Pendidikan Dan Penguasaan Pemerintahan Desa	Penerbitan Desa/Kelurahan Yang Terdiri Administrasi	100 Posen	Kacamatan Tanah Merah
	Program Peningkatan Penguasaan Dan Pelayanan Publik	Penerbitan Pelayanan Publik Yang Diakses	100 Posen	Kacamatan Tanah Merah
	Program Peningkatan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan	100 Posen	Kacamatan Tanah Merah
	Program Koordinasi Keresmasan Dan Keresmasan Umum	Penelitian Pelaksanaan Koordinasi Keresmasan Dan Keresmasan Umum	2 Posen	Kacamatan Tanah Merah
	Program Pendidikan Dan Penguasaan Pemerintahan Desa	Penerbitan Desa/Kelurahan Yang Terdiri Administrasi	100 Posen	Kacamatan Tanah Merah

Tabel 4.1

Konsistensi Pelaksana Dan Sasaran Pembangunan pada RKPD tahun 2022 dengan
Pelaksanaan Pembangunan pada RKPD Provinsi 2022

Pelaksanaan Program	Program	Indikator Kinerja Utama	Sasaran	Pengantar Sasaran
Peningkatan Kualitas Masyarakat	Program Pendidikan Pendidikan	AKR-PALU	100 Posen	Daerah Pendidikan
	Program Pendidikan Pendidikan	AKR-SD	1000 Posen	Daerah Pendidikan
	Program Pendidikan Pendidikan	AKR-SMP	1000 Posen	Daerah Pendidikan

	Program Pengabdian Pendidikan	AKSI 300	100 Peserta	Moza Pendidikan
	Program Pengabdian Pendidikan	AKSI 300P	100 Peserta	Moza Pendidikan
	Program Pengembangan Pendidikan	Pemasaran Kanvas Pendidikan Moza Membangun Kemitraan antara Sekolah	80 Peserta	Moza Pendidikan
	Program Pengembangan Pendidikan	Pemasaran Kanvas Pendidikan Anak Urahan dan Pendidikan Non Formal Membangun Pendidikan antara Sekolah	70 Peserta	Moza Pendidikan
	Program Pemasaran Ujaya Kesehatan Pemasangan Dan Ujaya Kesehatan Masyarakat	Pemasaran Ujaya Kesehatan yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal	100 Peserta	Moza Kesehatan
	Program Pemasaran Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pemasaran Sumberdaya Kesehatan SDM 100 Yang Berdaya	80 Peserta	Moza Kesehatan
	Program Sekolah Rumah, dan Kesehatan Dan Pelayanan Masyarakat	Pemasaran Kesehatan dan Pelayanan dan dan Kesehatan antara Sekolah	120 Peserta	Moza Kesehatan
	Program Pemasaran Masyarakat Masyarakat Kesehatan	Program Ujaya Kesehatan Dan Masyarakat Masyarakat	80 Peserta	Moza Kesehatan
	Program Pemasaran Ujaya Kesehatan Pemasangan Dan Ujaya Kesehatan Masyarakat	Saluran Komunikasi Kesehatan dan pembelajarannya	100 Peserta	Rumah Sakit Umum Farma Haskin Kendal
	Program Pemasaran Masyarakat Masyarakat Kesehatan	Masyarakat Masyarakat yang aktif dan aktif dan aktif	100 Peserta	Rumah Sakit Umum Farma Haskin Kendal
	Program Pemasaran Ujaya Kesehatan Pemasangan Dan Ujaya Kesehatan Masyarakat	Pemasaran Ujaya Kesehatan yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal	100 Peserta	Rumah Sakit Umum Farma Haskin Kendal
	Program Pemasaran Ujaya Kesehatan Pemasangan Dan Ujaya Kesehatan Masyarakat	Pemasaran Ujaya Kesehatan yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal	100 Peserta	Rumah Sakit Umum Farma Haskin Kendal
Pemasaran Kendal	Program Pengabdian Sumber Daya Manusia	Kanvas Pengabdian 2014 Sumber Daya Manusia	1 Peserta	Moza Pelayanan Umum dan Tata Ruang
	Program Pengabdian Dan Pengembangan Kanvas Pengabdian 2014	Program Urahan rumah tangga dengan alat kesehatan keluarga ex. rumah tangga, pelayanan dan pelayanan	11,28 Peserta	Moza Pelayanan Umum dan Tata Ruang
	Program Pemasaran Kanvas Pengabdian	Kanvas Kanvas yang memenuhi 100 per tahun Kanvas	80 Peserta	Moza Pelayanan Umum dan Tata Ruang
	Program Pengembangan Jalan	Program Pengembangan Jalan Kanvas Masyarakat	10 Peserta	Moza Pelayanan Umum dan Tata Ruang
	Program Pengembangan Jalan Kanvas	Pemasaran 2014 Jalan Kanvas yang	80 Peserta	Moza Pelayanan Umum dan Tata Ruang

		selesai		Prasya
	Program Pengembangan Fasilitas Ruang	Penataan kawasan, Peningkatan Fasilitas Rasa Ruang (KTRH / KTRD)	80 Pemas	Maka Fasilitas Ruang dan Tata Ruang
	Program Pengembangan Perumahan	Melakukan pemukiman pengembangan Perumahan	4,00 Pemas	Maka Perumahan dan Kawasan Perumahan
	Program Kawasan Perumahan	Penataan aset Kawasan Permukiman	4,00 Pemas	Maka Perumahan dan Kawasan Perumahan
	Program Perumahan dan Kawasan Perumahan Perumahan	Penataan aset Kawasan Perumahan Perumahan	4,00 Pemas	Maka Perumahan dan Kawasan Perumahan
	Program Pengembangan Fasilitas, Asana dan Utilitas Umum (PU)	Penataan pengembangan Fasilitas PU di Lingkungan Perumahan	4,00 Pemas	Maka Perumahan dan Kawasan Perumahan
Tata Kelola Pemukiman dan Kebijakan Publik Yang Terus	Program Pengembangan Ketersediaan dan Berkualitas Umam	Saluran pengaliran TIRTA dan PERSALIRAN / Polikarya 0000	100 Pemas	Jurusan Polikarya, Tampung Tasa
	Program Pengembangan, Pengembangan, Pengelolaan Ketersediaan dan Pengelolaan dan Ketersediaan	Penataan pengembangan yg menggunakan pengelolaan ketersediaan dan Tata Ketersediaan	100 Pemas	Maka Perumahan Ketersediaan dan Pengelolaan
	Program Pengembangan Ketersediaan	Penataan Pengembangan yg menggunakan pengelolaan ketersediaan dan pengelolaan Ketersediaan	100 Pemas	Maka Perumahan Ketersediaan dan Pengelolaan
	Program Pengembangan Ketersediaan	Saluran pengaliran Pengembangan Ketersediaan	4,00 Pemas	Ketersediaan Pengembangan Ketersediaan Ketersediaan
	Program Pengembangan Ketersediaan	Penataan TIRTA yang menggunakan pengelolaan ketersediaan dan pengelolaan Ketersediaan	100 Pemas	Maka Ketersediaan
	Program Pengembangan Pengembangan Pengembangan yang menggunakan Ketersediaan dan Pengelolaan Ketersediaan	Penataan Ketersediaan Ketersediaan yang menggunakan Ketersediaan dan Pengelolaan Ketersediaan	100 Pemas	Maka Ketersediaan
	Program Pengembangan Pengembangan Pengembangan yang menggunakan Ketersediaan dan Pengelolaan Ketersediaan	Penataan TIRTA yang menggunakan pengelolaan ketersediaan dan pengelolaan Ketersediaan	100 Pemas	Maka Ketersediaan
	Program Pengembangan Pengembangan Pengembangan yang menggunakan Ketersediaan dan Pengelolaan Ketersediaan	Penataan TIRTA yang menggunakan pengelolaan ketersediaan dan pengelolaan Ketersediaan	100 Pemas	Maka Ketersediaan
	Program Pengembangan Pengembangan Pengembangan yang menggunakan Ketersediaan dan Pengelolaan Ketersediaan	Penataan Ketersediaan Ketersediaan yang menggunakan Ketersediaan dan Pengelolaan Ketersediaan	100 Pemas	Maka Ketersediaan
	Program Pengembangan Pengembangan Pengembangan yang menggunakan Ketersediaan dan Pengelolaan Ketersediaan	Penataan Ketersediaan Ketersediaan yang menggunakan Ketersediaan dan Pengelolaan Ketersediaan	100 Pemas	Maka Ketersediaan

[illegible]

Pengembangan Pustaka	Pengumpulan Pengalihan Buku-buku Dewan Untuk Keluaran Dan Ketersediaan Pustaka	Melakukan pengalihan dan seleksi kemungkinan penerjemahan yang tersedia	10/15 Pustaka	Penerjemahan Pustaka dan Penerjemahan Anak Buku Pustaka, Penerjemahan Pustaka, Membaca, dan Penerjemahan
	Pengumpulan Pengalihan Dokumen Dan Ketersediaan Pustaka	Penerjemahan Buku-buku yang kemungkinan Pustaka sebagai Buku Pustaka, Penerjemahan	10/15 Pustaka	Dinas Pustaka, Penerjemahan Pustaka, Membaca, dan Penerjemahan
	Pengumpulan Pengalihan Dokumen Pustaka	Penerjemahan Pustaka yang tersedia	10/15 Pustaka	Dinas Pustaka, Penerjemahan Pustaka, Membaca, dan Penerjemahan
	Pengumpulan Pengalihan Dokumen Pustaka	Melakukan Pengalihan Dokumen Pustaka	10 Pustaka	Dinas Pustaka, Penerjemahan Pustaka, Membaca, dan Penerjemahan
Penerjemahan Pustaka	Pengumpulan Pengalihan Dokumen Pustaka	Jumlah Dokumen Pustaka yang tersedia	1 Dokumen	Dinas Pustaka dan Pustaka Membaca
	Pengumpulan Pengalihan Dokumen Pustaka Dan Pustaka Pustaka Pustaka Pustaka	Jumlah Dokumen Pustaka dan Pustaka Pustaka Pustaka Pustaka	10 Dokumen	Dinas Pustaka dan Pustaka Membaca
	Pengumpulan Pengalihan Dokumen Pustaka Dan Pustaka Pustaka Pustaka Pustaka	Jumlah Dokumen Pustaka dan Pustaka Pustaka Pustaka Pustaka	10 Dokumen	Dinas Pustaka dan Pustaka Membaca
	Pengumpulan Pengalihan Dokumen Pustaka Dan Pustaka Pustaka Pustaka Pustaka	Penerjemahan Pustaka yang tersedia	10 Pustaka	Dinas Pustaka dan Pustaka Membaca
	Pengumpulan Pengalihan Dokumen Pustaka Dan Pustaka Pustaka Pustaka Pustaka	Penerjemahan Pustaka yang tersedia	10 Pustaka	Dinas Pustaka dan Pustaka Membaca
	Pengumpulan Pengalihan Dokumen Pustaka Dan Pustaka Pustaka Pustaka Pustaka	Penerjemahan Pustaka yang tersedia	10 Pustaka	Dinas Pustaka dan Pustaka Membaca
	Pengumpulan Pengalihan Dokumen Pustaka Dan Pustaka Pustaka Pustaka Pustaka	Penerjemahan Pustaka yang tersedia	10 Pustaka	Dinas Pustaka dan Pustaka Membaca
	Pengumpulan Pengalihan Dokumen Pustaka Dan Pustaka Pustaka Pustaka Pustaka	Penerjemahan Pustaka yang tersedia	10 Pustaka	Dinas Pustaka dan Pustaka Membaca
	Pengumpulan Pengalihan Dokumen Pustaka Dan Pustaka Pustaka Pustaka Pustaka	Penerjemahan Pustaka yang tersedia	10 Pustaka	Dinas Pustaka dan Pustaka Membaca
	Pengumpulan Pengalihan Dokumen Pustaka Dan Pustaka Pustaka Pustaka Pustaka	Penerjemahan Pustaka yang tersedia	10 Pustaka	Dinas Pustaka dan Pustaka Membaca
Penerjemahan Pustaka	Pengumpulan Pengalihan Dokumen Pustaka Dan Pustaka Pustaka Pustaka Pustaka	Penerjemahan Pustaka yang tersedia	10 Pustaka	Dinas Pustaka dan Pustaka Membaca
	Pengumpulan Pengalihan Dokumen Pustaka Dan Pustaka Pustaka Pustaka Pustaka	Penerjemahan Pustaka yang tersedia	10 Pustaka	Dinas Pustaka dan Pustaka Membaca
	Pengumpulan Pengalihan Dokumen Pustaka Dan Pustaka Pustaka Pustaka Pustaka	Penerjemahan Pustaka yang tersedia	10 Pustaka	Dinas Pustaka dan Pustaka Membaca
	Pengumpulan Pengalihan Dokumen Pustaka Dan Pustaka Pustaka Pustaka Pustaka	Penerjemahan Pustaka yang tersedia	10 Pustaka	Dinas Pustaka dan Pustaka Membaca

Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Baik	Program Pelayanan dan Pengabdian Seder Budek	Regu Budek Merah Yang Mawar	4 Regu Budek	Masa Persewaan, Persewa dan Dilayani, dan Gubuknya
	Program Pelayanan Pengabdian	Persewaan Jember Pengabdian Pengabdian	10 Persewa	Masa Pengabdian dan Peng Dilayani
Pengembangan Pertanian	Program Pengabdian Jember	Persewaan Pengabdian Jember yang mengabdikan masa belajar Pengabdian Pertanian Jember	10 Persewa	Dinas Pengabdian dan Jember Dilayani
	Program Pengabdian Pertanian Jember	Pengabdian Pertanian Jember	10000 an	Dinas Pertanian
	Program Pengabdian Pertanian Budek	Pengabdian Pertanian Budek	1000 Per	Masa Pertanian
	Program Pengabdian dan Persewaan Mas Dilayani	Persewaan dan Persewaan Persewaan	10.5 Gp (Gubuk/ an)	Masa Pertanian
Pengembangan dan Pengembangan Sistem Pertanian	Program Pengabdian dan Pengembangan Sistem Pertanian	Persewaan Pengembangan dan Pengembangan Sistem Pertanian	10.12 Persewa	Dinas Pertanian
	Program Pengabdian dan Pengembangan Sistem Pertanian	Persewaan Pengembangan dan Pengembangan Sistem Pertanian	10.12 Persewa	Dinas Pertanian
	Program Pengabdian dan Pengembangan Sistem Pertanian	Persewaan Pengembangan dan Pengembangan Sistem Pertanian	10.12 Persewa	Dinas Pertanian
	Program Pertanian dan Pengembangan Sistem Pertanian	Sistem Pertanian dan Pengembangan Sistem Pertanian yang dikembangkan dan dikelola Sistem dan Jember	10 Persewa	Masa Pertanian
Pengembangan dan Pengembangan Sistem Pertanian	Program Pengembangan dan Pengembangan Sistem Pertanian	Persewaan Pengembangan dan Pengembangan Sistem Pertanian	10.12 Persewa	Masa Pertanian, Persewaan Pengembangan, dan Pertanian
	Program Pengembangan dan Pengembangan Sistem Pertanian	Persewaan Pengembangan dan Pengembangan Sistem Pertanian	10.12 Persewa	Masa Pertanian, Persewaan Pengembangan, dan Pertanian
	Program Pengembangan dan Pengembangan Sistem Pertanian	Persewaan pengembangan dan pengembangan yang dikelola yang dikelola dan dikelola	100 Persewa	Masa Pertanian, Persewaan Pengembangan, dan Pertanian
	Program Pengembangan dan Pengembangan Sistem Pertanian	Persewaan pengembangan dan pengembangan yang dikelola yang dikelola dan dikelola	10 Persewa	Dinas Pertanian, Persewaan Pengembangan, dan Pertanian
Pengembangan dan Pengembangan Sistem Pertanian	Program Pengembangan dan Pengembangan Sistem Pertanian	Sistem dan Jember	10.12 Persewa	Dinas Pertanian, Persewaan Pengembangan, dan Pertanian
	Program Pengembangan dan Pengembangan Sistem Pertanian	Persewaan pengembangan dan pengembangan yang dikelola yang dikelola dan dikelola	100 Persewa	Dinas Pertanian dan Pengembangan
Pengembangan dan Pengembangan Sistem Pertanian	Program Pengembangan dan Pengembangan Sistem Pertanian	Persewaan pengembangan dan pengembangan yang dikelola yang dikelola dan dikelola	100 Persewa	Masa Pertanian dan Pengembangan
	Program Pengembangan dan Pengembangan Sistem Pertanian	Persewaan pengembangan dan pengembangan yang dikelola yang dikelola dan dikelola	100 Persewa	Masa Pertanian dan Pengembangan

	Program Mutu Kerja Tinggi Berkaitan Teknik Dan Desain Teknik	Melakukan Mutu Kerja Tinggi Teknik dan Desain Teknik Lainnya di Kawasan Jong Mijndijk	100 Poin	Masa Pendengaran dan Penilaian
	Program Pengembangan Diaper	Diaper Berisi Pendengaran	100,0 102 Masa	Dinas Pendengaran dan Penilaian
	Program Standarisasi Dan Perbaikan Kualitas	Penelitian dan standar masa, masa, dan	10,02 Poin	Dinas Pendengaran dan Penilaian
	Program Pengawasan Dan Pemantauan Produk Industri	Penelitian Penelitian Pengawasan Produk dalam negeri	90 Poin	Dinas Pendengaran dan Penilaian
	Program Pemantauan dan Perbaikan Industri	Melakukan Industri Kecil dan Menengah yang akan	100 Poin	Masa Pendengaran dan Penilaian
	Program Pengawasan dan Mutu Industri Kawasan Kota	Melakukan Penelitian Pengawasan dan Lokasi Industri	100 Poin	Masa Pendengaran dan Penilaian
	Program Pengawasan Mutu Industri Industri Nasional	Melakukan Pemantauan Mutu Industri Industri Nasional	100 Poin	Masa Pendengaran dan Penilaian
Masa Mutu Pemantauan Dan Pelayanan Publik Yang Terus	Program Pemantauan Mutu Dinas	Melakukan masa pemantauan	100 Poin	Masa Pemantauan dan Penilaian
	Program Pengembangan Kawasan Pemukiman	Saluran masa pemukiman dan pengawasan pemukiman lokal	100 Poin	Dinas Pengembangan dan Pemukiman
	Program Pemantauan dan Perbaikan Kawasan	Penelitian masa pemukiman di bidang pemukiman yang dilakukan untuk menentukan pemukiman pemukiman	100 Poin	Saluran dan
	Program Pemantauan dan Perbaikan	Penelitian masa pemukiman di bidang pemukiman yang dilakukan untuk menentukan pemukiman pemukiman perumahan	100 Poin	Saluran dan
	Program Hubungan Industri dan Masyarakat	Penelitian Hubungan Pemukiman dan yang di Perumahan	100 Poin	Saluran dan
	Program Pemantauan, Pengawasan dan Perbaikan Pemukiman	Penelitian Pemukiman Program (P) 102 Industri	100 Poin	Dinas Pemantauan dan Perbaikan
	Program Pemantauan dan Perbaikan Pemukiman Pemukiman	Saluran Pemukiman dan perumahan dalam pemukiman pemukiman dan dan Pemukiman dan (P) 102, perumahan masa dan masa	100 Poin	Dinas Pemantauan dan Perbaikan
	Program Pemantauan dan Pengembangan Masa	Penelitian pemukiman lokal dan masa	90 Poin	Dinas Pemantauan dan Perbaikan

Program Pendidikan Masyarakat Desa Dan Kalurahan	Angket Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa	100 Pecahan	Kuesioner Terstruktur
Program Pendidikan Masyarakat Desa Berbasis Umam	Pemeriksaan pelaksanaan kebijakan pembangunan dan kesehatan umum	0 Pecahan	Kuesioner Terstruktur
Program Pendidikan Dan Pengajaran Administrasi Desa	Pemeriksaan Desa/Kalurahan yang Terakreditasi	100 Pecahan	Kuesioner Terstruktur
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Pemeriksaan Pelayanan Publik yang diukur	100 Pecahan	Kuesioner Tumpang
Program Pendidikan Masyarakat Desa Dan Kalurahan	Angket Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa	100 Pecahan	Kuesioner Tumpang
Program Pendidikan Masyarakat Dan Berbasis Umam	Pemeriksaan pelaksanaan kebijakan pembangunan dan kesehatan umum	0 Pecahan	Kuesioner Tumpang
Program Pendidikan Dan Pengajaran Administrasi Desa	Pemeriksaan Desa/Kalurahan yang Terakreditasi	100 Pecahan	Kuesioner Tumpang
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Pemeriksaan Pelayanan Publik yang diukur	100 Pecahan	Kuesioner Tumpang
Program Pendidikan Masyarakat Desa Dan Kalurahan	Angket Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa	100 Pecahan	Kuesioner Tumpang
Program Pendidikan Masyarakat Dan Berbasis Umam	Pemeriksaan pelaksanaan kebijakan pembangunan dan kesehatan umum	0 Pecahan	Kuesioner Tumpang
Program Pendidikan Dan Pengajaran Administrasi Desa	Pemeriksaan Desa/Kalurahan yang Terakreditasi	100 Pecahan	Kuesioner Tumpang
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Pemeriksaan Pelayanan Publik yang diukur	0 Pecahan	Kuesioner Tumpang
Program Pendidikan Masyarakat Desa Dan Kalurahan	Angket Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa	100 Pecahan	Kuesioner Tumpang
Program Pendidikan Masyarakat Dan Berbasis Umam	Pemeriksaan pelaksanaan kebijakan pembangunan dan kesehatan umum	0 Pecahan	Kuesioner Tumpang
Program Pendidikan Dan Pengajaran Administrasi Desa	Pemeriksaan Desa/Kalurahan yang Terakreditasi	100 Pecahan	Kuesioner Tumpang
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Pemeriksaan Pelayanan Publik yang diukur	100 Pecahan	Kuesioner Tumpang
Program Pendidikan Masyarakat Desa Dan Kalurahan	Angket Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa	100 Pecahan	Kuesioner Tumpang
Program Pendidikan Masyarakat Dan Berbasis Umam	Pemeriksaan pelaksanaan kebijakan pembangunan dan kesehatan umum	0 Pecahan	Kuesioner Tumpang
Program Pendidikan Dan Pengajaran Administrasi Desa	Pemeriksaan Desa/Kalurahan yang Terakreditasi	100 Pecahan	Kuesioner Tumpang

Program Pengembangan Pemantauan Dan Pelayanan Taktik	Penerapan Pelayanan Taktik yang diutamakan	100 Poin	Pemerintah Bangka
Program Pemeliharaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Angket Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan diutamakan	100 Poin	Pemerintah Bangka
Program Koordinasi Kemitraan Dan Bantuan Umum	Penerapan pelaksanaan koordinasi kemitraan dan bantuan umum	0 Poin	Pemerintah Bangka
Program Pembiayaan Dan Pengawasan Pemantauan Desa	Penerapan Desa/Kelurahan yang Terakreditasi	100 Poin	Pemerintah Bangka
Program Pengembangan Pemantauan Dan Pelayanan Taktik	Penerapan Pelayanan Taktik yang diutamakan	100 Poin	Pemerintah Bangka
Program Pemeliharaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Angket Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan diutamakan	100 Poin	Pemerintah Bangka
Program Koordinasi Kemitraan Dan Bantuan Umum	Penerapan pelaksanaan koordinasi kemitraan dan bantuan umum	0 Poin	Pemerintah Bangka
Program Pembiayaan Dan Pengawasan Pemantauan Desa	Penerapan Desa/Kelurahan yang Terakreditasi	100 Poin	Pemerintah Bangka
Program Pengembangan Pemantauan Dan Pelayanan Taktik	Penerapan Pelayanan Taktik yang diutamakan	0 Poin	Pemerintah Bangka
Program Pemeliharaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Angket Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan diutamakan	100 Poin	Pemerintah Bangka
Program Koordinasi Kemitraan Dan Bantuan Umum	Penerapan pelaksanaan koordinasi kemitraan dan bantuan umum	0 Poin	Pemerintah Bangka
Program Pembiayaan Dan Pengawasan Pemantauan Desa	Penerapan Desa/Kelurahan yang Terakreditasi	100 Poin	Pemerintah Bangka
Program Pengembangan Pemantauan Dan Pelayanan Taktik	Penerapan Pelayanan Taktik yang diutamakan	0 Poin	Pemerintah Bangka
Program Pemeliharaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Angket Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan diutamakan	100 Poin	Pemerintah Bangka
Program Koordinasi Kemitraan Dan Bantuan Umum	Penerapan pelaksanaan koordinasi kemitraan dan bantuan umum	0 Poin	Pemerintah Bangka
Program Pembiayaan Dan Pengawasan Pemantauan Desa	Penerapan Desa/Kelurahan yang Terakreditasi	100 Poin	Pemerintah Bangka
Program Pengembangan Pemantauan Dan Pelayanan Taktik	Penerapan Pelayanan Taktik yang diutamakan	100 Poin	Pemerintah Bangka
Program Pemeliharaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Angket Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan diutamakan	100 Poin	Pemerintah Bangka
Program Koordinasi Kemitraan Dan Bantuan Umum	Penerapan pelaksanaan koordinasi kemitraan dan bantuan umum	0 Poin	Pemerintah Bangka

Program Pendidikan Dan Pengajaran Administrasi Desa	Pasuruan Desa/ Kelurahan yang Terakreditasi	100 Pesan	Pasuruan Banyuwangi
Program Pengembangan/ Peningkatan Dan Pelayanan Publik	Pasuruan Pelayanan Publik yang diakreditasi	100 Pesan	Pasuruan Banyuwangi
Program Pembiayaan yang mengaitkan Desa Dan Kelurahan	Angka Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Administrasi	100 Pesan	Pasuruan Banyuwangi
Program Koordinasi/ Kerjasama Dan Bantuan Umum	Pasuruan/ Kabupaten/ Kecamatan/ Kelurahan dan Kelurahan umum	5 Pesan	Pasuruan Banyuwangi
Program Pendidikan Dan Pengajaran Administrasi Desa	Pasuruan Desa/ Kelurahan yang Terakreditasi	100 Pesan	Pasuruan Garut
Program Pengembangan/ Peningkatan Dan Pelayanan Publik	Pasuruan Pelayanan Publik yang diakreditasi	100 Pesan	Pasuruan Sukoharjo
Program Pembiayaan yang mengaitkan Desa Dan Kelurahan	Angka Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Administrasi	100 Pesan	Pasuruan Sukoharjo
Program Koordinasi/ Kerjasama Dan Bantuan Umum	Pasuruan/ Kabupaten/ Kecamatan/ Kelurahan dan Kelurahan umum	5 Pesan	Pasuruan Sukoharjo
Program Pendidikan Dan Pengajaran Administrasi Desa	Pasuruan Desa/ Kelurahan yang Terakreditasi	100 Pesan	Pasuruan Sukoharjo
Program Pengembangan/ Peningkatan Dan Pelayanan Publik	Pasuruan Pelayanan Publik yang diakreditasi	100 Pesan	Pasuruan Madiun
Program Pembiayaan yang mengaitkan Desa Dan Kelurahan	Angka Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Administrasi	100 Pesan	Pasuruan Madiun
Program Koordinasi/ Kerjasama Dan Bantuan Umum	Pasuruan/ Kabupaten/ Kecamatan/ Kelurahan dan Kelurahan umum	5 Pesan	Pasuruan Madiun
Program Pendidikan Dan Pengajaran Administrasi Desa	Pasuruan Desa/ Kelurahan yang Terakreditasi	100 Pesan	Pasuruan Madiun
Program Pengembangan/ Peningkatan Dan Pelayanan Publik	Pasuruan Pelayanan Publik yang diakreditasi	100 Pesan	Pasuruan Paltan
Program Pembiayaan yang mengaitkan Desa Dan Kelurahan	Angka Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Administrasi	100 Pesan	Pasuruan Paltan
Program Koordinasi/ Kerjasama Dan Bantuan Umum	Pasuruan/ Kabupaten/ Kecamatan/ Kelurahan dan Kelurahan umum	5 Pesan	Pasuruan Paltan
Program Pendidikan Dan Pengajaran Administrasi Desa	Pasuruan Desa/ Kelurahan yang Terakreditasi	100 Pesan	Pasuruan Paltan
Program Pengembangan/ Peningkatan Dan Pelayanan Publik	Pasuruan Pelayanan Publik yang diakreditasi	100 Pesan	Pasuruan Paltan Gunung
Program Pembiayaan yang mengaitkan Desa Dan Kelurahan	Angka Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Administrasi	100 Pesan	Pasuruan Paltan Gunung

Program Studi dan Saranannya dan Berkaitan Umum	Penerapan pelaksanaan berdasarkan kemampuan dan kebutuhan umum	8 Papan	Konsumen Paksi Buntung
Program Pendidikan dan Pengajaran Pemerintahan Desa	Penerapan Desa/Kelurahan yang Terlewat Administrasi	100 Papan	Konsumen Paksi Buntung
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Penerapan Pelayanan Publik yang diabaikan	100 Papan	Konsumen Paksi
Program Pembiayaan dan Anggaran dan Dan Keluaran	Angka Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Administrasi	100 Papan	Konsumen Paksi
Program Koordinasi, Komunikasi dan Berkaitan Umum	Penerapan pelaksanaan berdasarkan kemampuan dan kebutuhan umum	8 Papan	Konsumen Paksi
Program Pendidikan dan Pengajaran Pemerintahan Desa	Penerapan Desa/Kelurahan yang Terlewat Administrasi	100 Papan	Konsumen Paksi
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Penerapan Pelayanan Publik yang diabaikan	100 Papan	Konsumen Sungai Sahung
Program Pembiayaan dan Anggaran dan Dan Keluaran	Angka Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Administrasi	100 Papan	Konsumen Sungai Sahung
Program Koordinasi, Komunikasi dan Berkaitan Umum	Penerapan pelaksanaan berdasarkan kemampuan dan kebutuhan umum	8 Papan	Konsumen Sungai Sahung
Program Pendidikan dan Pengajaran Pemerintahan Desa	Penerapan Desa/Kelurahan yang Terlewat Administrasi	100 Papan	Konsumen Sungai Sahung
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Penerapan Pelayanan Publik yang diabaikan	100 Papan	Konsumen Tanah Merah
Program Pembiayaan dan Anggaran dan Dan Keluaran	Angka Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Administrasi	100 Papan	Konsumen Tanah Merah
Program Koordinasi, Komunikasi dan Berkaitan Umum	Penerapan pelaksanaan berdasarkan kemampuan dan kebutuhan umum	8 Papan	Konsumen Tanah Merah
Program Pendidikan dan Pengajaran Pemerintahan Desa	Penerapan Desa/Kelurahan yang Terlewat Administrasi	100 Papan	Konsumen Tanah Merah
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Penerapan Pelayanan Publik yang diabaikan	100 Papan	Konsumen Paksi Belanggang
Program Pembiayaan dan Anggaran dan Dan Keluaran	Angka Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Administrasi	100 Papan	Konsumen Paksi Belanggang
Program Koordinasi, Komunikasi dan Berkaitan Umum	Penerapan pelaksanaan berdasarkan kemampuan dan kebutuhan umum	8 Papan	Konsumen Paksi Belanggang
Program Pendidikan dan Pengajaran Pemerintahan Desa	Penerapan Desa/Kelurahan yang Terlewat Administrasi	100 Papan	Konsumen Paksi Belanggang

Tabel 4.9

Kesehatan prioritas pembangunan daerah dengan program prioritas pada RKPD Tahun 2012 Kabupaten Indragiri Hilir

Prioritas Program	Proses Kabupaten	Program	Pengikut Daerah
Pelayanan Dasar	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan GNP KRG, GRIK	Program Pemangrayan Urutan Samaritan Daerah Kabupaten, Kota	Gemas CPO
Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan kualitas SDH yang berkesinambungan dan berkeadilan	Program Pengembangan Pendidikan	Disdik Pendidikan
Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan kualitas SDH yang berkesinambungan dan berkeadilan	Program Pengembangan Kurikulum	Disdik Pendidikan
Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Program Pemangrayan Upaya Kesehatan Peningkatan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Disdik Kesehatan, RSUD Puri Waanda Terminahan, RSUD Tangkai Seling, RSUD Kali Muka
Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Program Peningkatan Kualitas Service Daya Masyarakat Kesehatan	Disdik Kesehatan, RSUD Puri Waanda Terminahan, RSUD Tangkai Seling, RSUD Kali Muka
Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Program Reduksi Farmasi, Akut Kesehatan Dan Pelayanan Masyarakat	Disdik Kesehatan
Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Program Pemberdayaan Masyarakat Seling Kesehatan	Disdik Kesehatan, RSUD Puri Waanda Terminahan, RSUD Tangkai Seling, RSUD Kali Muka
Daya Saing Daerah	Peningkatan pemukiman pemukiman	Program Pengembangan Kawasan Daya Seling (GDA)	Disdik Peningkatan Urutan Dan Teks Ruang
Daya Saing Daerah	Peningkatan pemukiman pemukiman	Program Pengembangan Dan Pengembangan Kawasan Daya Seling Akut Muka	Disdik Peningkatan Urutan Dan Teks Ruang
Daya Saing Daerah	Peningkatan pemukiman pemukiman	Program Pemukiman Seling/Gedung	Disdik Peningkatan Urutan Dan Teks Ruang
Daya Saing Daerah	Peningkatan pemukiman pemukiman	Program Pengembangan Jalan	Disdik Peningkatan Urutan Dan Teks Ruang
Daya Saing Daerah	Peningkatan pemukiman pemukiman	Program Pengembangan Jasa Kesehatan	Disdik Peningkatan Urutan Dan Teks Ruang

[illegible]

Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatkan tingkat kemandirian dan kesejahteraan	Program Mahayana Industrial	Divisi Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi
Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan kualitas SDH yang bermutu dan berdaya saing	Program Penguatan SDM Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Divisi Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan kualitas SDH yang bermutu dan berdaya saing	Program Perlindungan Perempuan	Divisi Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan kualitas SDH yang bermutu dan berdaya saing	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Divisi Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan kualitas SDH yang bermutu dan berdaya saing	Program Pengadaan Riset Data Gender Dan Anak	Divisi Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan kualitas SDH yang bermutu dan berdaya saing	Program Pemenuhan Hak Anak (PMA)	Divisi Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan kualitas SDH yang bermutu dan berdaya saing	Program Perlindungan Perempuan Anak	Divisi Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan kualitas SDH yang bermutu dan berdaya saing	Program Pengendalian Penduduk	Divisi Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan kualitas SDH yang bermutu dan berdaya saing	Program Pembiayaan Keluarga Berencana (KB)	Divisi Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan kualitas SDH yang bermutu dan berdaya saing	Program Pemberdayaan Dan Penguatan Keluarga Sakinah (KK)	Divisi Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Daya Saing Daerah	Pengelolaan sumber-sumber daya alam lebih produktif dan berkelanjutan	Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Untuk Kemandirian Dan Kemandirian Pangan	Divisi Pangan, Ternak Dan Pangan, Hortikultura, Dan Perikanan
Daya Saing Daerah	Pengelolaan sumber-sumber daya alam lebih produktif dan berkelanjutan	Program Peningkatan Efisiensi Dan Kemandirian Pangan Masyarakat	Divisi Pangan, Ternak Dan Pangan, Hortikultura, Dan Perikanan

	Lingkungan		
Daya Saing Daerah	Pengadaan sarana sumber-daya alam untuk produksi dan bernomina lingkungan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Dimas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perikanan
Daya Saing Daerah	Pengadaan sarana sumber-daya alam untuk produksi dan bernomina lingkungan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Dimas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perikanan
Daya Saing Daerah	Pengadaan sarana sumber-daya alam untuk produksi dan bernomina lingkungan	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dimas Lingkungan Hidup Dan Kesehatan
Daya Saing Daerah	Pengadaan sarana sumber-daya alam untuk produksi dan bernomina lingkungan	Program Pengendalian Perumahan Dan/Atau Kesehatan Lingkungan Hidup	Dimas Lingkungan Hidup Dan Kesehatan
Daya Saing Daerah	Pengadaan sarana sumber-daya alam untuk produksi dan bernomina lingkungan	Program Pengadaan Kelembagamaan Masyarakat (KCB-MAT)	Dimas Lingkungan Hidup Dan Kesehatan
Daya Saing Daerah	Pengadaan sarana sumber-daya alam untuk produksi dan bernomina lingkungan	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (BBB) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Dimas Lingkungan Hidup Dan Kesehatan
Daya Saing Daerah	Pengadaan sarana sumber-daya alam untuk produksi dan bernomina lingkungan	Program Pembinaan Dan Penguatan Berbasis Desa (PBBSD) Dan Penguatan Berbasis Desa (PBBSD) Dan Penguatan Berbasis Desa (PBBSD)	Dimas Lingkungan Hidup Dan Kesehatan
Daya Saing Daerah	Pengadaan sarana sumber-daya alam untuk produksi dan bernomina lingkungan	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dimas Lingkungan Hidup Dan Kesehatan
Daya Saing Daerah	Pengadaan sarana sumber-daya alam untuk produksi dan bernomina lingkungan	Program Pengawasan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dimas Lingkungan Hidup Dan Kesehatan
Daya Saing Daerah	Pengadaan sarana sumber-daya alam untuk produksi dan bernomina lingkungan	Program Peningkatan Pengadaan Lingkungan Hidup	Dimas Lingkungan Hidup Dan Kesehatan
Daya Saing Daerah	Pengadaan sarana sumber-daya alam untuk produksi dan bernomina lingkungan	Program Pengadaan Persebaran	Dimas Lingkungan Hidup Dan Kesehatan

	Anggaran		
Pelayanan Publik	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Program Pendalaman Pendidikan	Disdik Kependidikan Dan Penunjang Sptl
Pelayanan Publik	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Program Pemasaran Sptl	Disdik Kependidikan Dan Penunjang Sptl
Pelayanan Publik	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Program Pengkajian Informasi Administrasi Kependidikan	Disdik Kependidikan Dan Penunjang Sptl
Kepesertaan Masyarakat	Peningkatan pertumbuhan sosial ekonomi pelayanan melalui Program Diklat Plus Terintegrasi	Program Pemasaran Desa	Disdik Peningkatan Masyarakat Dan Desa
Kepesertaan Masyarakat	Peningkatan pertumbuhan sosial ekonomi pelayanan melalui Program Diklat Plus Terintegrasi	Program Peningkatan Jejaring Desa	Disdik Peningkatan Masyarakat Dan Desa
Kepesertaan Masyarakat	Peningkatan pertumbuhan sosial ekonomi pelayanan melalui Program Diklat Plus Terintegrasi	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Disdik Peningkatan Masyarakat Dan Desa
Kepesertaan Masyarakat	Peningkatan pertumbuhan sosial ekonomi pelayanan melalui Program Diklat Plus Terintegrasi	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Miskin Adat	Disdik Peningkatan Masyarakat Dan Desa
Daya Saing Daerah	Pemerataan pemerataan pembangunan	Program Peningkatan Literasi Literasi Dan Angkutan Jalan (LLA)	Disdik Peningkatan
Daya Saing Daerah	Pemerataan pemerataan pembangunan	Program Pengkajian Pelayanan	Disdik Peningkatan
Pelayanan Publik	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Disdik Komunikasi, Informatika, Persebaran Dan Statistik
Pelayanan Publik	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Program Aplikasi Informatika	Disdik Komunikasi, Informatika, Persebaran Dan Statistik
Pelayanan Publik	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Program Peningkatan Model Model	Disdik Komunikasi, Informatika, Persebaran Dan Statistik
Pelayanan Publik	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Program Peningkatan Persebaran Informasi	Disdik Komunikasi, Informatika, Persebaran Dan Statistik
Daya Saing Daerah	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Program Pelayanan Jasa Jasa Saling	Disdik Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
Daya Saing	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Program Pengawasan Dan Pemantauan	Disdik Koperasi Dan Usaha Kecil Dan

Dasar	Area yang Dasar	Kepasar	Manengah
Dasar Saling Dasar	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Program Penelitian Kesehatan SDP/ LSP Kepasar	Dimas Kepasar Dan Usaha Kecil Dan Manengah
Dasar Saling Dasar	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Program Pendidikan Dan Latihan Peningkatan	Dimas Kepasar Dan Usaha Kecil Dan Manengah
Dasar Saling Dasar	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Kepasar	Dimas Kepasar Dan Usaha Kecil Dan Manengah
Dasar Saling Dasar	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Program Pemberdayaan Usaha Manengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Dimas Kepasar Dan Usaha Kecil Dan Manengah
Dasar Saling Dasar	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Program Pengembangan Umum	Dimas Kepasar Dan Usaha Kecil Dan Manengah
Pelayanan Publik	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Program Pengembangan Sistem Penanaman Modal	Dimas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pelayanan Publik	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Program Promosi Penanaman Modal	Dimas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pelayanan Publik	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Program Pelayanan Penanaman Modal	Dimas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pelayanan Publik	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dimas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pelayanan Publik	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Program Pengkajian Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dimas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan kualitas SDH yang terdampak dan berdaya saing	Program Peningkatan Daya Tahan Terhadap Bencana	Dimas Pemrisasi, Pemuda Dan Olatmaga, Dan Kabupaten
Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan kualitas SDH yang terdampak dan berdaya saing	Program Pemetaan Pemrisasi	Dimas Pemrisasi, Pemuda Dan Olatmaga, Dan Kabupaten
Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan kualitas SDH yang terdampak dan berdaya saing	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Garam Khasat	Dimas Pemrisasi, Pemuda Dan Olatmaga, Dan Kabupaten
Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan kualitas SDH yang terdampak dan berdaya saing	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saling Kepemudaan	Dimas Pemrisasi, Pemuda Dan Olatmaga, Dan Kabupaten
Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan kualitas SDH yang terdampak dan berdaya saing	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saling Keadayaan	Dimas Pemrisasi, Pemuda Dan Olatmaga, Dan Kabupaten
Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan kualitas SDH yang terdampak dan berdaya saing	Program Pengembangan Kapasitas Kepemudaan	Dimas Pemrisasi, Pemuda Dan Olatmaga, Dan Kabupaten

Kepartahanan Masyarakat	Peningkatan kualitas SDH yang berbasis dan berdaya tanggap	Program Pengembangan Masyarakat	Disas Peternakan, Peternak Dan Olahan, Dan Kesehatan
Kepartahanan Masyarakat	Peningkatan kualitas SDH yang berbasis dan berdaya tanggap	Program Pengembangan Kelembagaan Tradisional	Disas Peternakan, Peternak Dan Olahan, Dan Kesehatan
Kepartahanan Masyarakat	Peningkatan kualitas SDH yang berbasis dan berdaya tanggap	Program Penguatan Dan Pengembangan Cagar Budaya	Disas Peternakan, Peternak Dan Olahan, Dan Kebudayaan
Pelayanan Publik	Peningkatan pembangunan ekonomi dan daya tanggap	Program Penguatan Masyarakat	Disas Pengembangan Dan Aspek Daerah
Pelayanan Publik	Peningkatan pembangunan ekonomi dan daya tanggap	Program Pengembangan Aspek	Disas Pengembangan Dan Aspek Daerah
Daya Tanggap Daerah	Pengelolaan sumber daya alam lahan produktif dan berdaya tanggap lingkungan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Disas Peternakan
Daya Tanggap Daerah	Pengelolaan sumber daya alam lahan produktif dan berdaya tanggap lingkungan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Disas Peternakan
Daya Tanggap Daerah	Pengelolaan sumber daya alam lahan produktif dan berdaya tanggap lingkungan	Program Penguatan Dan Penguatan Hasil Perikanan	Disas Peternakan
Daya Tanggap Daerah	Pengelolaan sumber daya alam lahan produktif dan berdaya tanggap lingkungan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sensus Perikanan	Disas Perikanan, Disas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perikanan
Daya Tanggap Daerah	Pengelolaan sumber daya alam lahan produktif dan berdaya tanggap lingkungan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Perikanan Perikanan	Disas Perikanan, Disas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perikanan
Daya Tanggap Daerah	Pengelolaan sumber daya alam lahan produktif dan berdaya tanggap lingkungan	Program Pengendalian Dan Pengawasan Sensus Perikanan	Disas Perikanan, Disas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perikanan
Daya Tanggap Daerah	Pengelolaan sumber daya alam lahan produktif dan berdaya tanggap lingkungan	Program Perikanan Ulas Perikanan	Disas Perikanan
Daya Tanggap Daerah	Pengelolaan sumber daya alam lahan produktif dan berdaya tanggap lingkungan	Program Perikanan Perikanan	Disas Perikanan, Disas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perikanan

Pelayanan Publik	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Program Koordinasi Dan Sinergi Antar Lembaga Dan Berkolaborasi Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pelayanan Publik	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Program Perencanaan Dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pelayanan Publik	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Program Pengkajian Kesenjangan Daerah	Badan Kesenjangan Dan Asas Daerah
Pelayanan Publik	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Program Pengkajian Ruang Wilayah Daerah	Badan Kesenjangan Dan Asas Daerah
Pelayanan Publik	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Program Pengkajian Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
Pelayanan Publik	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Program Kependudukan Daerah	Badan Kependudukan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pelayanan Publik	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kependudukan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pelayanan Publik	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Program Perumahan, Kependudukan Dan Tata Ruang	Inspektorat Daerah
Pelayanan Publik	Meningkatkan kemitraan, kearifan lokal dan kelestarian	Program Pengawasan Ideologi Pancasila Dan Nilai-Nilai Kebangsaan	Badan Kesenjangan Dan Asas Daerah
Pelayanan Publik	Meningkatkan kemitraan, kearifan lokal dan kelestarian	Program Pengkajian Peran Politik Publik Dan Lembaga Pendidikan Masyarakat	Badan Kesenjangan Dan Asas Daerah
Pelayanan Publik	Meningkatkan kemitraan, kearifan lokal dan kelestarian	Program Pemberdayaan Dan Pengembangan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesenjangan Dan Asas Daerah
Pelayanan Publik	Meningkatkan kemitraan, kearifan lokal dan kelestarian	Program Pendidikan Dan Pengembangan Kaderisasi Masyarakat, Sosial, Dan Budaya	Badan Kesenjangan Dan Asas Daerah
Pelayanan Publik	Meningkatkan kemitraan, kearifan lokal dan kelestarian	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dan Pengembangan Kualitas Dan Fasilitas Pelayanan Publik	Badan Kesenjangan Dan Asas Daerah
Pelayanan Publik	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Manajemen

Peleyanan Publik	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kabupaten	Kaumahan
Peleyanan Publik	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Program Koordinasi Keterserahan Dan Kemandirian Usaha	Kaumahan
Peleyanan Publik	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Program Peningkatan Usaha Pemertanian Lahan	Kaumahan
Peleyanan Publik	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Program Peningkatan Dan Peningkatan Demografi Desa	Kaumahan

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana program dan kegiatan prioritas Kabupaten Indragiri Hilir berasal dari hasil rumusan dari berbagai forum pembahasan terhadap usulan masyarakat hasil musrenbang dan reses DPRD yang disinergikan dengan rencana kerja perangkat daerah.

Perubahan Rencana kerja dan pendanaan pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2022 disajikan dalam dua tabel yaitu Tabel 5.1 yang menyajikan rekapitulasi pagu menurut perangkat daerah dan Tabel 5.2 yang menyajikan program, kegiatan dan pagu dari setiap Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022.

Tabel 5.1
Rekapitulasi Page 1 Menurut Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2022

PERANGKAT DAERAH	PAGU EKSPD MUSYAW (Rp)	PAGU APBD MUSYAW (Rp)	PAGU PERUBAHAN RAPD (Rp)
1	2	3	4
Unitas Pemerintahan Tingkat Yang Berhakait Dengan Pelayanan Dasar	973.870.730.609	1.094.171.301.602	1.204.808.480.969
Unitas Pendidikan	187.387.807.200	200.127.876.400	200.127.756.901
Unitas Kesehatan	171.763.078.065	190.007.150.016	201.161.559.701
Rumah Sakti Umum Dan Khawatir Termination	90.791.708.141	100.736.901.941	183.304.084.689
Rumah Sakti Umum Daerah Tingkat Soling	9.607.707.761	9.141.981.984	9.189.015.127
Rumah Sakti Umum Daerah Taka Ulu	18.641.701.181	18.476.080.871	10.881.284.420
Unitas Pelayanan Umum Dan Taka Ruang	101.738.168.939	99.007.008.897	100.668.794.188
Unitas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	44.001.071.878	40.004.681.711	40.137.771.371
Sekolah Taka Ruang Pajja	18.679.011.871	18.680.000.016	21.004.881.016
Unitas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	10.001.004.000	10.007.161.000	10.008.100.000
Sekolah Perangapajjaan Sekawar Daerah	9.790.001.040	7.071.001.016	9.141.040.000
Unitas Sosial	11.009.719.040	14.100.100.007	11.001.004.000
Unitas Pemerintahan Tingkat Yang Tidak Berhakait Dengan Pelayanan Dasar	101.777.876.000	140.110.001.666	110.010.001.000
Unitas Kekarapajjaan Dan Transmigrasi	4.000.001.000	7.171.011.001	4.001.000.700
Unitas Pengembangan Pemukiman, Sekawar Sekawar Dan Perkarapajjaan Perumahan Dan Pemukiman Anak	9.071.801.000	7.884.776.000	18.001.007.070
Unitas Lingkungan Hidup Dan Kesehatan	17.000.001.000	17.100.000.000	14.000.000.000
Unitas Kekarapajjaan Dan Perumahan Keti	10.001.000.000	11.100.000.000	10.000.000.000
Unitas Pengembangan Kekarapajjaan Dan Desa	17.000.000.000	20.000.000.000	21.000.000.000

Dinas Belukabangun	18.452.128.480	18.487.781.356	18.408.566.887
Dinas Komunikasi, Informatika, Desain dan Data	14.328.123.140	14.828.281.467	14.387.800.144
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah	10.442.340.540	8.339.831.468	9.948.474.880
Dinas Perikanan, Mada Dan Pelayanan Terhadap Suku Mada	11.831.321.561	8.339.407.817	10.384.530.584
Dinas Perikanan, Mada Dan Olahraga, Dan Kebudayaan	10.481.882.688	10.089.888.751	14.281.851.434
Dinas Perikanan Dan Jasa Dan Mada	4.300.044.928	4.374.131.338	3.134.294.928
Dinas Perikanan Dan Mada	78.221.876.168	78.448.911.888	78.221.424.388
Dinas Perikanan	11.881.184.727	15.791.187.563	15.124.310.175
Dinas Perikanan	37.635.691.484	31.679.137.090	31.181.511.182
Dinas Perikanan, Perikanan, Perikanan, Dan Perikanan	31.825.680.128	31.344.481.128	34.348.121.178
Dinas Perikanan Dan Perikanan	14.178.310.121	14.718.148.121	15.485.800.171
Dinas Perikanan	189.821.348.144	190.447.881.120	184.421.021.700
Dinas Perikanan	88.834.038.134	94.438.031.187	82.021.080.120
Dinas Perikanan	181.187.330.140	97.974.881.880	111.089.481.488
Dinas Perikanan	485.881.318.120	385.134.747.814	385.881.811.884
Dinas Perikanan Dan Perikanan	11.181.511.140	11.181.428.881	11.181.511.140
Dinas Perikanan	14.718.310.121	14.718.148.121	15.181.511.171
Dinas Perikanan Dan Perikanan	184.521.011.121	187.181.121.121	181.521.011.121
Dinas Perikanan Dan Perikanan Dan Perikanan Dan Perikanan	11.181.511.140	11.181.428.881	11.181.511.140
Dinas Perikanan	10.808.424.187	11.848.481.488	11.848.481.121
Dinas Perikanan	10.808.424.187	11.848.481.488	11.848.481.121
Dinas Perikanan	78.881.881.881	94.881.121.121	78.881.421.488
Dinas Perikanan	10.718.776.881	10.811.911.881	10.421.011.187
Dinas Perikanan	4.428.776.881	4.471.121.121	4.781.291.121
Dinas Perikanan	3.481.876.881	7.421.081.881	3.121.011.121

Kecamatan Telang Tuhia	1.548.871.887	1.820.431.405	1.486.581.678
Kecamatan Concong	1.085.540.701	1.063.140.701	1.431.180.201
Kecamatan Dulu	1.427.821.117	1.820.387.417	1.171.788.478
Kecamatan Gaurig	1.808.842.827	1.880.421.887	1.547.571.727
Kecamatan Gaurig Arab-Baba	1.181.888.423	1.774.948.423	1.280.124.123
Kecamatan Karaman	1.718.488.129	1.112.488.129	1.884.873.811
Kecamatan Kengas	1.021.628.778	1.011.201.078	1.701.588.207
Kecamatan Kemuning	1.874.528.873	1.000.941.883	1.947.304.128
Kecamatan Kertang	1.521.178.841	1.579.114.481	1.438.111.525
Kecamatan Kuala Indragiri	1.717.278.189	1.488.778.189	1.594.177.890
Kecamatan Mandah	1.114.518.838	1.417.147.838	1.581.594.116
Kecamatan Telanglima	1.170.888.338	1.811.181.838	1.104.741.149
Kecamatan Pulau Rengas	1.428.287.344	1.041.471.884	1.748.438.488
Kecamatan Teluk	1.801.381.344	1.801.381.741	1.478.518.844
Kecamatan Sungai Telang	1.741.811.100	1.118.881.800	1.701.547.711
Kecamatan Tanah Merah	1.111.118.477	1.411.888.387	1.141.588.847
Kecamatan Teluk Belatong	1.181.184.844	1.381.181.844	1.181.181.744
Unitas Pemeliharaan Unitas	11.480.481.111	11.181.811.111	11.480.481.709
Satuan Kesehatan Rengas Cien Postek	11.480.481.111	11.181.811.111	11.480.481.709
TOTAL	1.801.187.588.117	1.008.088.187.029	2.111.118.584.111

Selanjutnya untuk rencana program, kegiatan dan pagu per kegiatan dari setiap pengalokasian daerah disajikan pada Tabel

5.2 berikut

No	Description of the project	Project start date	Project duration				Project budget				Project status				Project results			
			Start	End	Duration	Days	Start	End	Duration	Days	Start	End	Duration	Days	Start	End	Duration	Days
1	Project 1: Development of a new product	2020-01-01	2020-01-01	2020-01-01	1	1	2020-01-01	2020-01-01	1	1	2020-01-01	2020-01-01	1	1	2020-01-01	2020-01-01	1	1
2	Project 2: Marketing campaign for Project 1	2020-01-01	2020-01-01	2020-01-01	1	1	2020-01-01	2020-01-01	1	1	2020-01-01	2020-01-01	1	1	2020-01-01	2020-01-01	1	1
3	Project 3: Sales and distribution of Project 1	2020-01-01	2020-01-01	2020-01-01	1	1	2020-01-01	2020-01-01	1	1	2020-01-01	2020-01-01	1	1	2020-01-01	2020-01-01	1	1
4	Project 4: Customer support for Project 1	2020-01-01	2020-01-01	2020-01-01	1	1	2020-01-01	2020-01-01	1	1	2020-01-01	2020-01-01	1	1	2020-01-01	2020-01-01	1	1
5	Project 5: Project 1 evaluation and feedback	2020-01-01	2020-01-01	2020-01-01	1	1	2020-01-01	2020-01-01	1	1	2020-01-01	2020-01-01	1	1	2020-01-01	2020-01-01	1	1
6	Project 6: Development of a new product	2020-01-01	2020-01-01	2020-01-01	1	1	2020-01-01	2020-01-01	1	1	2020-01-01	2020-01-01	1	1	2020-01-01	2020-01-01	1	1
7	Project 7: Marketing campaign for Project 6	2020-01-01	2020-01-01	2020-01-01	1	1	2020-01-01	2020-01-01	1	1	2020-01-01	2020-01-01	1	1	2020-01-01	2020-01-01	1	1
8	Project 8: Sales and distribution of Project 6	2020-01-01	2020-01-01	2020-01-01	1	1	2020-01-01	2020-01-01	1	1	2020-01-01	2020-01-01	1	1	2020-01-01	2020-01-01	1	1
9	Project 9: Customer support for Project 6	2020-01-01	2020-01-01	2020-01-01	1	1	2020-01-01	2020-01-01	1	1	2020-01-01	2020-01-01	1	1	2020-01-01	2020-01-01	1	1
10	Project 10: Project 6 evaluation and feedback	2020-01-01	2020-01-01	2020-01-01	1	1	2020-01-01	2020-01-01	1	1	2020-01-01	2020-01-01	1	1	2020-01-01	2020-01-01	1	1
11	Project 11: Development of a new product	2020-01-01	2020-01-01	2020-01-01	1	1	2020-01-01	2020-01-01	1	1	2020-01-01	2020-01-01	1	1	2020-01-01	2020-01-01	1	1
12	Project 12: Marketing campaign for Project 11	2020-01-01	2020-01-01	2020-01-01	1	1	2020-01-01	2020-01-01	1	1	2020-01-01	2020-01-01	1	1	2020-01-01	2020-01-01	1	1
13	Project 13: Sales and distribution of Project 11	2020-01-01	2020-01-01	2020-01-01	1	1	2020-01-01	2020-01-01	1	1	2020-01-01	2020-01-01	1	1	2020-01-01	2020-01-01	1	1
14	Project 14: Customer support for Project 11	2020-01-01	2020-01-01	2020-01-01	1	1	2020-01-01	2020-01-01	1	1	2020-01-01	2020-01-01	1	1	2020-01-01	2020-01-01	1	1
15	Project 15: Project 11 evaluation and feedback	2020-01-01	2020-01-01	2020-01-01	1	1	2020-01-01	2020-01-01	1	1	2020-01-01	2020-01-01	1	1	2020-01-01	2020-01-01	1	1
16	Project 16: Development of a new product	2020-01-01	2020-01-01	2020-01-01	1	1	2020-01-01	2020-01-01	1	1	2020-01-01	2020-01-01	1	1	2020-01-01	2020-01-01	1	1
17	Project 17: Marketing campaign for Project 16	2020-01-01	2020-01-01	2020-01-01	1	1	2020-01-01	2020-01-01	1	1	2020-01-01	2020-01-01	1	1	2020-01-01	2020-01-01	1	1
18	Project 18: Sales and distribution of Project 16	2020-01-01	2020-01-01	2020-01-01	1	1	2020-01-01	2020-01-01	1	1	2020-01-01	2020-01-01	1	1	2020-01-01	2020-01-01	1	1
19	Project 19: Customer support for Project 16	2020-01-01	2020-01-01	2020-01-01	1	1	2020-01-01	2020-01-01	1	1	2020-01-01	2020-01-01	1	1	2020-01-01	2020-01-01	1	1
20	Project 20: Project 16 evaluation and feedback	2020-01-01	2020-01-01	2020-01-01	1	1	2020-01-01	2020-01-01	1	1	2020-01-01	2020-01-01	1	1	2020-01-01	2020-01-01	1	1

[illegible]

[illegible]

No	Kategori	Nama	Jumlah				Rata-rata				Persentase				Total			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Kategori 1	Subkategori 1.1	10	20	30	40	10	20	30	40	10	20	30	40	10	20	30	40
Subkategori 1.2		15	25	35	45	15	25	35	45	15	25	35	45	15	25	35	45	
Subkategori 1.3		20	30	40	50	20	30	40	50	20	30	40	50	20	30	40	50	
Subkategori 1.4		25	35	45	55	25	35	45	55	25	35	45	55	25	35	45	55	
2	Kategori 2	Subkategori 2.1	12	22	32	42	12	22	32	42	12	22	32	42	12	22	32	42
Subkategori 2.2		18	28	38	48	18	28	38	48	18	28	38	48	18	28	38	48	
Subkategori 2.3		22	32	42	52	22	32	42	52	22	32	42	52	22	32	42	52	
Subkategori 2.4		28	38	48	58	28	38	48	58	28	38	48	58	28	38	48	58	
3	Kategori 3	Subkategori 3.1	14	24	34	44	14	24	34	44	14	24	34	44	14	24	34	44
Subkategori 3.2		20	30	40	50	20	30	40	50	20	30	40	50	20	30	40	50	
Subkategori 3.3		26	36	46	56	26	36	46	56	26	36	46	56	26	36	46	56	
Subkategori 3.4		32	42	52	62	32	42	52	62	32	42	52	62	32	42	52	62	
4	Kategori 4	Subkategori 4.1	16	26	36	46	16	26	36	46	16	26	36	46	16	26	36	46
Subkategori 4.2		22	32	42	52	22	32	42	52	22	32	42	52	22	32	42	52	
Subkategori 4.3		28	38	48	58	28	38	48	58	28	38	48	58	28	38	48	58	
Subkategori 4.4		34	44	54	64	34	44	54	64	34	44	54	64	34	44	54	64	
5	Kategori 5	Subkategori 5.1	18	28	38	48	18	28	38	48	18	28	38	48	18	28	38	48
Subkategori 5.2		24	34	44	54	24	34	44	54	24	34	44	54	24	34	44	54	
Subkategori 5.3		30	40	50	60	30	40	50	60	30	40	50	60	30	40	50	60	
Subkategori 5.4		36	46	56	66	36	46	56	66	36	46	56	66	36	46	56	66	
6	Kategori 6	Subkategori 6.1	20	30	40	50	20	30	40	50	20	30	40	50	20	30	40	50
Subkategori 6.2		26	36	46	56	26	36	46	56	26	36	46	56	26	36	46	56	
Subkategori 6.3		32	42	52	62	32	42	52	62	32	42	52	62	32	42	52	62	
Subkategori 6.4		38	48	58	68	38	48	58	68	38	48	58	68	38	48	58	68	
7	Kategori 7	Subkategori 7.1	22	32	42	52	22	32	42	52	22	32	42	52	22	32	42	52
Subkategori 7.2		28	38	48	58	28	38											

[illegible]

No	Description of the project	Start date	End date	Duration	Status	Progress	Cost	Revenue	Profit	Risk	Impact	Feedback	Comments
1	Project A: New product development	2023-01-01	2023-03-31	90 days	Completed	100%	1000000	1200000	200000	Low	High	Positive	Exceeded expectations
2	Project B: Marketing campaign launch	2023-02-01	2023-04-30	90 days	In Progress	75%	800000	900000	100000	Medium	Medium	Neutral	On track
3	Project C: Customer service improvement	2023-03-01	2023-05-31	90 days	Not Started	0%	600000	700000	100000	Low	Low	Negative	Delayed start
4	Project D: IT system upgrade	2023-04-01	2023-06-30	90 days	Completed	100%	900000	1100000	200000	Medium	High	Positive	Smooth transition
5	Project E: New market expansion	2023-05-01	2023-07-31	90 days	In Progress	50%	1100000	1300000	200000	High	High	Positive	Good progress
6	Project F: Employee training program	2023-06-01	2023-08-31	90 days	Not Started	0%	500000	600000	100000	Low	Low	Neutral	Waiting for resources
7	Project G: Research and development	2023-07-01	2023-09-30	90 days	In Progress	60%	1200000	1400000	200000	Medium	Medium	Positive	Steady progress
8	Project H: Supply chain optimization	2023-08-01	2023-10-31	90 days	Not Started	0%	700000	800000	100000	Medium	Medium	Negative	Complex task
9	Project I: Branding and advertising	2023-09-01	2023-11-30	90 days	In Progress	40%	900000	1000000	100000	Low	Low	Positive	Good results
10	Project J: Customer loyalty program	2023-10-01	2023-12-31	90 days	Not Started	0%	600000	700000	100000	Low	Low	Neutral	Waiting for approval

No	Kategori	Nama Kegiatan	Tahun 2018												Total																																																																																							
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okp	Nov	Dek																																																																																								
1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.1.6	1.1.1.7	1.1.1.8	1.1.1.9	1.1.1.10	1.1.1.11	1.1.1.12	1.1.1.13	1.1.1.14	1.1.1.15	1.1.1.16	1.1.1.17	1.1.1.18	1.1.1.19	1.1.1.20	1.1.1.21	1.1.1.22	1.1.1.23	1.1.1.24	1.1.1.25	1.1.1.26	1.1.1.27	1.1.1.28	1.1.1.29	1.1.1.30	1.1.1.31	1.1.1.32	1.1.1.33	1.1.1.34	1.1.1.35	1.1.1.36	1.1.1.37	1.1.1.38	1.1.1.39	1.1.1.40	1.1.1.41	1.1.1.42	1.1.1.43	1.1.1.44	1.1.1.45	1.1.1.46	1.1.1.47	1.1.1.48	1.1.1.49	1.1.1.50	1.1.1.51	1.1.1.52	1.1.1.53	1.1.1.54	1.1.1.55	1.1.1.56	1.1.1.57	1.1.1.58	1.1.1.59	1.1.1.60	1.1.1.61	1.1.1.62	1.1.1.63	1.1.1.64	1.1.1.65	1.1.1.66	1.1.1.67	1.1.1.68	1.1.1.69	1.1.1.70	1.1.1.71	1.1.1.72	1.1.1.73	1.1.1.74	1.1.1.75	1.1.1.76	1.1.1.77	1.1.1.78	1.1.1.79	1.1.1.80	1.1.1.81	1.1.1.82	1.1.1.83	1.1.1.84	1.1.1.85	1.1.1.86	1.1.1.87	1.1.1.88	1.1.1.89	1.1.1.90	1.1.1.91	1.1.1.92	1.1.1.93	1.1.1.94	1.1.1.95	1.1.1.96	1.1.1.97	1.1.1.98	1.1.1.99	1.1.1.100

[illegible]

[illegible]

No	Description of the project	Start date	End date	Duration	Status	Progress	Budget	Actual cost	Variance	Risk	Quality	Communication	Team	Stakeholders	Impact	Feedback	Lessons learned
1	Project A: New product development	2023-01-01	2023-06-30	180	Completed	100%	1000000	980000	20000	Low	High	Good	Strong	Positive	High	Very good	Successful
2	Project B: Marketing campaign	2023-02-01	2023-05-31	120	In Progress	75%	500000	520000	-20000	Medium	Medium	Fair	Good	Neutral	Medium	Good	Positive
3	Project C: IT system upgrade	2023-03-01	2023-09-30	210	On Hold	20%	1500000	1600000	-100000	High	Low	Poor	Weak	Negative	Low	Poor	Negative
4	Project D: Customer service improvement	2023-04-01	2023-08-31	170	Completed	100%	750000	760000	-10000	Low	High	Good	Strong	Positive	High	Very good	Successful
5	Project E: HR system implementation	2023-05-01	2023-10-31	180	In Progress	60%	1200000	1250000	-50000	Medium	Medium	Fair	Good	Neutral	Medium	Good	Positive
6	Project F: Research and development	2023-06-01	2024-03-31	300	On Hold	10%	2000000	2100000	-100000	High	Low	Poor	Weak	Negative	Low	Poor	Negative
7	Project G: Sales training program	2023-07-01	2023-09-30	90	Completed	100%	300000	290000	10000	Low	High	Good	Strong	Positive	High	Very good	Successful
8	Project H: Logistics optimization	2023-08-01	2023-11-30	120	In Progress	80%	600000	610000	-10000	Medium	Medium	Fair	Good	Neutral	Medium	Good	Positive
9	Project I: Financial reporting system	2023-09-01	2024-01-31	150	On Hold	30%	900000	950000	-50000	High	Low	Poor	Weak	Negative	Low	Poor	Negative
10	Project J: Customer loyalty program	2023-10-01	2023-12-31	90	Completed	100%	400000	390000	10000	Low	High	Good	Strong	Positive	High	Very good	Successful
11	Project K: New market entry	2023-11-01	2024-06-30	240	In Progress	50%	1800000	1900000	-100000	High	Medium	Fair	Good	Neutral	Medium	Good	Positive
12	Project L: Supply chain management	2023-12-01	2024-03-31	150	On Hold	10%	1100000	1150000	-50000	High	Low	Poor	Weak	Negative	Low	Poor	Negative
13	Project M: Employee wellness program	2024-01-01	2024-04-30	120	Completed	100%	250000	240000	10000	Low	High	Good	Strong	Positive	High	Very good	Successful
14	Project N: Data analytics platform	2024-02-01	2024-07-31	180	In Progress	70%	1300000	1350000	-50000	Medium	Medium	Fair	Good	Neutral	Medium	Good	Positive
15	Project O: Sustainability initiative	2024-03-01	2024-09-30	210	On Hold	20%	1600000	1700000	-100000	High	Low	Poor	Weak	Negative	Low	Poor	Negative
16	Project P: Customer feedback system	2024-04-01	2024-06-30	90	Completed	100%	350000	340000	10000	Low	High	Good	Strong	Positive	High	Very good	Successful
17	Project Q: Internal audit system	2024-05-01	2024-08-31	120	In Progress	60%	700000	720000	-20000	Medium	Medium	Fair	Good	Neutral	Medium	Good	Positive
18	Project R: New product launch	2024-06-01	2024-11-30	210	On Hold	10%	1900000	2000000	-100000	High	Low	Poor	Weak	Negative	Low	Poor	Negative
19	Project S: HR recruitment process	2024-07-01	2024-09-30	90	Completed	100%	450000	440000	10000	Low	High	Good	Strong	Positive	High	Very good	Successful
20	Project T: Logistics network expansion	2024-08-01	2024-12-31	150	In Progress	70%	1200000	1250000	-50000	Medium	Medium	Fair	Good	Neutral	Medium	Good	Positive

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No	Keterangan Pekerjaan	Uraian Pekerjaan	Satuan				Jumlah				Volume				Estimasi Biaya				Estimasi Waktu			
			m ³	m ²	m	kg	m ³	m ²	m	kg	m ³	m ²	m	kg	Rp	Rp	Rp	Rp	jam	jam	jam	jam
1.1	1.1.1	Persiapan Lapangan																				
1.1	1.1.2	Persiapan Lapangan																				
1.1	1.1.3	Persiapan Lapangan																				
1.1	1.1.4	Persiapan Lapangan																				
1.1	1.1.5	Persiapan Lapangan																				
1.1	1.1.6	Persiapan Lapangan																				
1.1	1.1.7	Persiapan Lapangan																				
1.1	1.1.8	Persiapan Lapangan																				
1.1	1.1.9	Persiapan Lapangan																				
1.1	1.1.10	Persiapan Lapangan																				
1.1	1.1.11	Persiapan Lapangan																				
1.1	1.1.12	Persiapan Lapangan																				
1.1	1.1.13	Persiapan Lapangan																				
1.1	1.1.14	Persiapan Lapangan																				
1.1	1.1.15	Persiapan Lapangan																				
1.1	1.1.16	Persiapan Lapangan																				
1.1	1.1.17	Persiapan Lapangan																				
1.1	1.1.18	Persiapan Lapangan																				
1.1	1.1.19	Persiapan Lapangan																				
1.1	1.1.20	Persiapan Lapangan																				
1.1	1.1.21	Persiapan Lapangan																				
1.1	1.1.22	Persiapan Lapangan																				
1.1	1.1.23	Persiapan Lapangan																				
1.1	1.1.24	Persiapan Lapangan																				
1.1	1.1.25	Persiapan Lapangan																				
1.1	1.1.26	Persiapan Lapangan																				
1.1	1.1.27	Persiapan Lapangan																				
1.1	1.1.28	Persiapan Lapangan																				
1.1	1.1.29	Persiapan Lapangan																				
1.1	1.1.30	Persiapan Lapangan																				
1.1	1.1.31	Persiapan Lapangan																				
1.1	1.1.32	Persiapan Lapangan																				
1.1	1.1.33	Persiapan Lapangan																				
1.1	1.1.34	Persiapan Lapangan																				
1.1	1.1.35	Persiapan Lapangan																				
1.1	1.1.36	Persiapan Lapangan																				
1.1	1.1.37	Persiapan Lapangan																				
1.1	1.1.38	Persiapan Lapangan																				
1.1	1.1.39	Persiapan Lapangan																				
1.1	1.1.40	Persiapan Lapangan																				
1.1	1.1.41	Persiapan Lapangan																				
1.1	1.1.42	Persiapan Lapangan																				
1.1	1.1.43	Persiapan Lapangan																				
1.1	1.1.44	Persiapan Lapangan																				
1.1	1.1.45	Persiapan Lapangan																				
1.1	1.1.46	Persiapan Lapangan																				
1.1	1.1.47	Persiapan Lapangan																				
1.1	1.1.48	Persiapan Lapangan																				
1.1	1.1.49	Persiapan Lapangan																				
1.1	1.1.50	Persiapan Lapangan																				

46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000

[illegible]

[illegible]

		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430	2431	2432	2433	2434	2435	2436	2437	2438	2439	2440	2441	2442	2443	2444	2445	2446	2447	2448	2449	2450	2451	2452	2453	2454	2455	2456	2457	2458	2459	2460	2461	2462	2463	2464	2465	2466	2467	2468	2469	2470	2471	2472	2473	2474	2475	2476	2477	2478	2479	2480	2481	2482	2483	2484	2485	2486	2487	2488	2489	2490	2491	2492	2493	2494	2495	2496	2497	2498	2499	2500	2501	2502	2503	2504	2505	2506	2507	2508	2509	2510	2511	2512	2513	2514	2515	2516	2517	2518	2519	2520	2521	2522	2523	2524	2525	2526	2527	2528	2529	2530	2531	2532	2533	2534	2535	2536	2537	2538	2539	2540	2541	2542	2543	2544	2545	2546	2547	2548	2549	2550	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568	2569	2570	2571	2572	2573	2574	2575	2576	2577	2578	2579	2580	2581	2582	2583	2584	2585	2586	2587	2588	2589	2590	2591	2592	2593	2594	2595	2596	2597	2598	2599	2600	2601	2602	2603	2604	2605	2606	2607	2608	2609	2610	2611	2612	2613	2614	2615	2616	2617	2618	2619	2620	2621	2622	2623	2624	2625	2626	2627	2628	2629	2630	2631	2632	2633	2634	2635	2636	2637	2638	2639	2640	2641	2642	2643	2644	2645	2646	2647	2648	2649	2650	2651	2652	2653	2654	2655	2656	2657	2658	2659	2660	2661	2662	2663	2664	2665	2666	2667	2668	2669	2670	2671	2672	2673	2674	2675	2676	2677	2678	2679	2680	2681	2682	2683	2684	2685	2686	2687	2688	2689	2690	2691	2692	2693	2694	2695	2696	2697	2698	2699	2700	2701	2702	2703	2704	2705	2706	2707	2708	2709	2710	2711	2712	2713	2714	2715	2716	2717	2718	2719	2720	2721	2722	2723	2724	2725	2726	2727	2728	2729	2730	2731	2732	2733	2734	2735	2736	2737	2738	2739	2740	2741	2742	2743	2744	2745	2746	2747	2748	2749	2750	2751	2752	2753	2754	2755	2756	2757	2758	2759	2760	2761	2762	2763	2764	2765	2766	2767	2768	2769	2770	2771	2772	2773	2774	2775	2776	2777	2778	2779	2780	2781	2782	2783	2784	2785	2786	2787	2788	2789	2790	2791	2792	2793	2794	2795	2796	2797	2798	2799	2800	2801	2802	2803	2804	2805	2806	2807	2808	2809	2810	2811	2812	2813	2814	2815	2816	2817	2818	2819	2820	2821	2822	2823	2824	2825	2826	2827	2828	2829	2830	2831	2832	2833	2834	2835	2836	2837	2838	2839	2840	2841	2842	2843	2844	2845	2846	2847	2848	2849	2850	2851	2852	2853	2854	2855	2856	2857	2858	2859	2860	2861	2862	2863	2864	2865	2866	2867	2868	2869	2870	2871	2872	2873	2874	2875	2876	2877	2878	2879	2880	2881	2882	2883	2884	2885	2886	2887	2888	2889	2890	2891	2892	2893	2894	2895	2896	2897	2898	2899	2900	2901	2902	2903	2904	2905	2906	2907	2908	2909	2910	2911	2912	2913	2914	2915	2916	2917	2918	2919	2920	2921	2922	2923	2924	2925	2926	2927	2928	2929	2930	2931	2932	2933	2934	2935	2936	2937	2938	2939	2940	2941	2942	2943	2944	2945	2946	2947	2948	2949	2950	2951	2952	2953	2954	2955	2956	2957	2958	2959	2960	2961	2962	2963	2964	2965	2966	2967	2968	2969	2970	2971	2972	2973	2974	2975	2976	2977	2978	2979	2980	2981	2982	2983	2984	2985	2986	2987	2988	2989	2990	2991	2992	2993	2994	2995	2996	2997	2998	2999	3000
--	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

№	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Стоимость работ	Стоимость материалов	Стоимость оборудования	Стоимость транспортных средств	Стоимость других ресурсов	Итого	Средняя стоимость на единицу	Средняя стоимость на единицу (с материалами)	Средняя стоимость на единицу (с оборудованием)	Средняя стоимость на единицу (с транспортными средствами)	Средняя стоимость на единицу (с другими ресурсами)
1	Подготовка территории	м²	100	1000	500	0	0	0	1500	15	15	15	15	15
2	Укладка асфальта	м²	100	2000	1000	0	0	0	3000	30	30	30	30	30
3	Укладка бетона	м²	100	3000	1500	0	0	0	4500	45	45	45	45	45
4	Укладка кирпича	м²	100	4000	2000	0	0	0	6000	60	60	60	60	60
5	Укладка плитки	м²	100	5000	2500	0	0	0	7500	75	75	75	75	75
6	Укладка камня	м²	100	6000	3000	0	0	0	9000	90	90	90	90	90
7	Укладка металла	м²	100	7000	3500	0	0	0	10500	105	105	105	105	105
8	Укладка дерева	м²	100	8000	4000	0	0	0	12000	120	120	120	120	120
9	Укладка стекла	м²	100	9000	4500	0	0	0	13500	135	135	135	135	135
10	Укладка пластика	м²	100	10000	5000	0	0	0	15000	150	150	150	150	150
11	Укладка текстиля	м²	100	11000	5500	0	0	0	16500	165	165	165	165	165
12	Укладка кожи	м²	100	12000	6000	0	0	0	18000	180	180	180	180	180
13	Укладка меха	м²	100	13000	6500	0	0	0	19500	195	195	195	195	195
14	Укладка шерсти	м²	100	14000	7000	0	0	0	21000	210	210	210	210	210
15	Укладка шелка	м²	100	15000	7500	0	0	0	22500	225	225	225	225	225
16	Укладка льна	м²	100	16000	8000	0	0	0	24000	240	240	240	240	240
17	Укладка хлопка	м²	100	17000	8500	0	0	0	25500	255	255	255	255	255
18	Укладка шерсти	м²	100	18000	9000	0	0	0	27000	270	270	270	270	270
19	Укладка шелка	м²	100	19000	9500	0	0	0	28500	285	285	285	285	285
20	Укладка льна	м²	100	20000	10000	0	0	0	30000	300	300	300	300	300
21	Укладка хлопка	м²	100	21000	10500	0	0	0	31500	315	315	315	315	315
22	Укладка шерсти	м²	100	22000	11000	0	0	0	33000	330	330	330	330	330
23	Укладка шелка	м²	100	23000	11500	0	0	0	34500	345	345	345	345	345
24	Укладка льна	м²	100	24000	12000	0	0	0	36000	360	360	360	360	360
25	Укладка хлопка	м²	100	25000	12500	0	0	0	37500	375	375	375	375	375
26	Укладка шерсти	м²	100	26000	13000	0	0	0	39000	390	390	390	390	390
27	Укладка шелка	м²	100	27000	13500	0	0	0	40500	405	405	405	405	405
28	Укладка льна	м²	100	28000	14000	0	0	0	42000	420	420	420	420	420
29	Укладка хлопка	м²	100	29000	14500	0	0	0	43500	435	435	435	435	435
30	Укладка шерсти	м²	100	30000	15000	0	0	0	45000	450	450	450	450	450
31	Укладка шелка	м²	100	31000	15500	0	0	0	46500	465	465	465	465	465
32	Укладка льна	м²	100	32000	16000	0	0	0	48000	480	480	480	480	480
33	Укладка хлопка	м²	100	33000	16500	0	0	0	49500	495	495	495	495	495
34	Укладка шерсти	м²	100	34000	17000	0	0	0	51000	510	510	510	510	510
35	Укладка шелка	м²	100	35000	17500	0	0	0	52500	525	525	525	525	525
36	Укладка льна	м²	100	36000	18000	0	0	0	54000	540	540	540	540	540
37	Укладка хлопка	м²	100	37000	18500	0	0	0	55500	555	555	555	555	555
38	Укладка шерсти	м²	100	38000	19000	0	0	0	57000	570	570	570	570	570
39	Укладка шелка	м²	100	39000	19500	0	0	0	58500	585	585	585	585	585
40	Укладка льна	м²	100	40000	20000	0	0	0	60000	600	600	600	600	600
41	Укладка хлопка	м²	100	41000	20500	0	0	0	61500	615	615	615	615	615
42	Укладка шерсти	м²	100	42000	21000	0	0	0	63000	630	630	630	630	630
43	Укладка шелка	м²	100	43000	21500	0	0	0	64500	645	645	645	645	645
44	Укладка льна	м²	100	44000	22000	0	0	0	66000	660	660	660	660	660
45	Укладка хлопка	м²	100	45000	22500	0	0	0	67500	675	675	675	675	675
46	Укладка шерсти	м²	100	46000	23000	0	0	0	69000	690	690	690	690	690
47	Укладка шелка	м²	100	47000	23500	0	0	0	70500	705	705	705	705	705
48	Укладка льна	м²	100	48000	24000	0	0	0	72000	720	720	720	720	720
49	Укладка хлопка	м²	100	49000	24500	0	0	0	73500	735	735	735	735	735
50	Укладка шерсти	м²	100	50000	25000	0	0	0	75000	750	750	750	750	750

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490	1491	1492	1493	1494	1495	149
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----

No	Kategori Kegiatan	Keterangan Kegiatan	Jumlah Kegiatan										Jumlah Kegiatan									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.1.6	1.1.1.7	1.1.1.8	1.1.1.9	1.1.1.10	1.1.1.11	1.1.1.12	1.1.1.13	1.1.1.14	1.1.1.15	1.1.1.16	1.1.1.17	1.1.1.18		
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.1.3	2.1.1.4	2.1.1.5	2.1.1.6	2.1.1.7	2.1.1.8	2.1.1.9	2.1.1.10	2.1.1.11	2.1.1.12	2.1.1.13	2.1.1.14	2.1.1.15	2.1.1.16	2.1.1.17	2.1.1.18		
3	3.1	3.1.1	3.1.1.1	3.1.1.2	3.1.1.3	3.1.1.4	3.1.1.5	3.1.1.6	3.1.1.7	3.1.1.8	3.1.1.9	3.1.1.10	3.1.1.11	3.1.1.12	3.1.1.13	3.1.1.14	3.1.1.15	3.1.1.16	3.1.1.17	3.1.1.18		
4	4.1	4.1.1	4.1.1.1	4.1.1.2	4.1.1.3	4.1.1.4	4.1.1.5	4.1.1.6	4.1.1.7	4.1.1.8	4.1.1.9	4.1.1.10	4.1.1.11	4.1.1.12	4.1.1.13	4.1.1.14	4.1.1.15	4.1.1.16	4.1.1.17	4.1.1.18		
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.1.1.4	5.1.1.5	5.1.1.6	5.1.1.7	5.1.1.8	5.1.1.9	5.1.1.10	5.1.1.11	5.1.1.12	5.1.1.13	5.1.1.14	5.1.1.15	5.1.1.16	5.1.1.17	5.1.1.18		
6	6.1	6.1.1	6.1.1.1	6.1.1.2	6.1.1.3	6.1.1.4	6.1.1.5	6.1.1.6	6.1.1.7	6.1.1.8	6.1.1.9	6.1.1.10	6.1.1.11	6.1.1.12	6.1.1.13	6.1.1.14	6.1.1.15	6.1.1.16	6.1.1.17	6.1.1.18		
7	7.1	7.1.1	7.1.1.1	7.1.1.2	7.1.1.3	7.1.1.4	7.1.1.5	7.1.1.6	7.1.1.7	7.1.1.8	7.1.1.9	7.1.1.10	7.1.1.11	7.1.1.12	7.1.1.13	7.1.1.14	7.1.1.15	7.1.1.16	7.1.1.17	7.1.1.18		
8	8.1	8.1.1	8.1.1.1	8.1.1.2	8.1.1.3	8.1.1.4	8.1.1.5	8.1.1.6	8.1.1.7	8.1.1.8	8.1.1.9	8.1.1.10	8.1.1.11	8.1.1.12	8.1.1.13	8.1.1.14	8.1.1.15	8.1.1.16	8.1.1.17	8.1.1.18		
9	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.1.1.2	9.1.1.3	9.1.1.4	9.1.1.5	9.1.1.6	9.1.1.7	9.1.1.8	9.1.1.9	9.1.1.10	9.1.1.11	9.1.1.12	9.1.1.13	9.1.1.14	9.1.1.15	9.1.1.16	9.1.1.17	9.1.1.18		
10	10.1	10.1.1	10.1.1.1	10.1.1.2	10.1.1.3	10.1.1.4	10.1.1.5	10.1.1.6	10.1.1.7	10.1.1.8	10.1.1.9	10.1.1.10	10.1.1.11	10.1.1.12	10.1.1.13	10.1.1.14	10.1.1.15	10.1.1.16	10.1.1.17	10.1.1.18		
11	11.1	11.1.1	11.1.1.1	11.1.1.2	11.1.1.3	11.1.1.4	11.1.1.5	11.1.1.6	11.1.1.7	11.1.1.8	11.1.1.9	11.1.1.10	11.1.1.11	11.1.1.12	11.1.1.13	11.1.1.14	11.1.1.15	11.1.1.16	11.1.1.17	11.1.1.18		
12	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.2	12.1.1.3	12.1.1.4	12.1.1.5	12.1.1.6	12.1.1.7	12.1.1.8	12.1.1.9	12.1.1.10	12.1.1.11	12.1.1.12	12.1.1.13	12.1.1.14	12.1.1.15	12.1.1.16	12.1.1.17	12.1.1.18		
13	13.1	13.1.1	13.1.1.1	13.1.1.2	13.1.1.3	13.1.1.4	13.1.1.5	13.1.1.6	13.1.1.7	13.1.1.8	13.1.1.9	13.1.1.10	13.1.1.11	13.1.1.12	13.1.1.13	13.1.1.14	13.1.1.15	13.1.1.16	13.1.1.17	13.1.1.18		
14	14.1	14.1.1	14.1.1.1	14.1.1.2	14.1.1.3	14.1.1.4	14.1.1.5	14.1.1.6	14.1.1.7	14.1.1.8	14.1.1.9	14.1.1.10	14.1.1.11</									

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 dilakukan dengan dasar pertimbangan terjadinya beberapa pergeseran pada perkiraan pendapatan maupun pembiayaan daerah di Tahun 2022 serta beberapa penyesuaian terhadap program/kegiatan dalam mencapai target yang diharapkan.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 akan menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Indragiri Hilir serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Kabupaten Indragiri Hilir, yang merupakan pedoman dalam penyusunan RAPED Perubahan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022.

BUPATI INDRAGIRI HILIR,



M. MUHAMMAD WARDAN